



UNIVERSITAS INDONESIA



**KONSEP NETRALITAS DALAM KEBIJAKAN POLITIK  
LUAR NEGERI MALAYSIA PADA TAHUN 1968—1971:  
STUDI KASUS ZOPFAN (*ZONE OF PEACE, FREEDOM, AND  
NEUTRALITY*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora.**

**Dina Pangestu Rini**

**0606086905**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**KEKHUSUSAN SEJARAH ASIA TENGGARA**

**DEPOK**

**JULI 2010**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

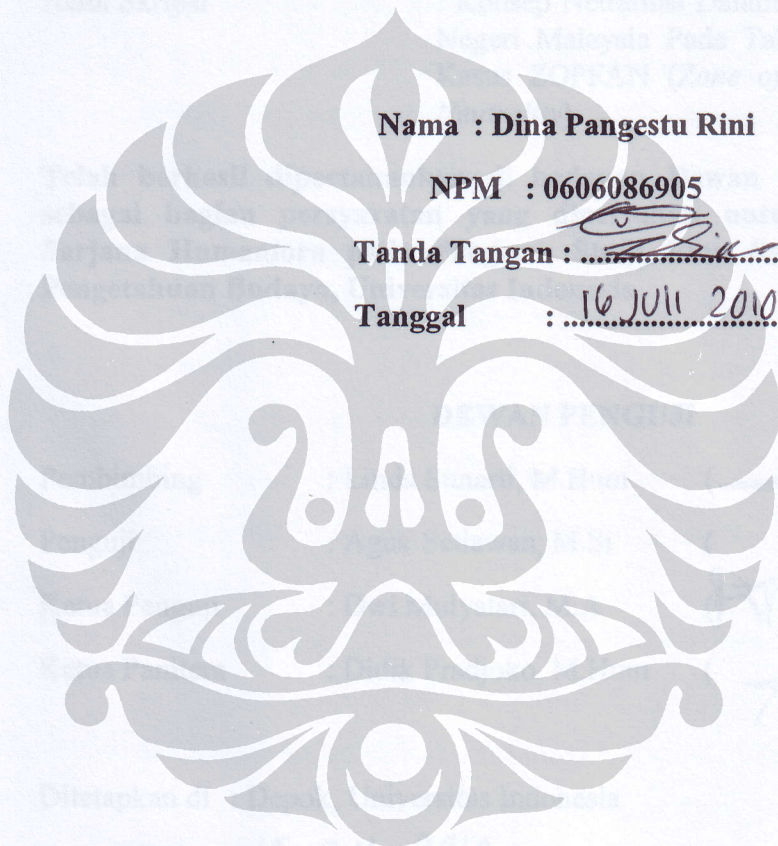
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dina Pangestu Rini**

**NPM : 0606086905**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 16 Juli 2010**



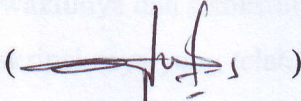

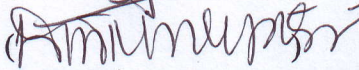

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dina Pangestu Rini  
NPM : 0606086905  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Skripsi : Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971: Studi Kasus ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Linda Sunarti, M.Hum (  )  
Penguji : Agus Setiawan, M.Si (  )  
Ketua Penguji : Dwi Mulyatari, M.A (  )  
Ketua Panitera : Didik Pradjoko, M.Hum (  )

Ditetapkan di : Depok, Universitas Indonesia

Tanggal : 16 Juli 2010

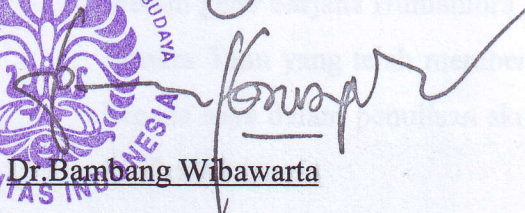
Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



  
Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 196 51023 199003 1 002

Konsep netralitas..., Dina Pangestu Rini, FIB UI, 2010

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Pangestu Rini

NPM : 0606086905

Program Studi : Ilmu Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971: Studi Kasus ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)**

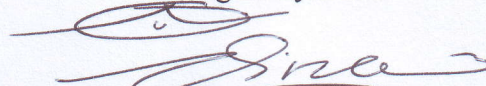
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulispencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Juli 2010

Yang menyatakan

  
( Dina Pangestu Rini )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mba Linda Sunarti, M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan saya dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari mba Linda mungkin skripsi ini tidak dapat selesai pada waktunya dan semestinya.
2. Mas Agus Setiawan, M.Si selaku pembaca skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan agar skripsi ini dapat menjadi penelitian yang semestinya.
3. Dosen-dosen pengajar program studi Ilmu Sejarah yang telah mengajar dan membagi ilmu dan pelajarannya mengenai sejarah sejak awal saya duduk di bangku perkuliahan hingga saat ini. Semoga ilmu dan pelajaran yang telah saya peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa, Amin. Terima Kasih banyak untuk semua dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Keluarga (papa, mama, Yoga dan Vera) yang telah memberikan bantuan moril dan materiil. Dengan dukungan yang penuh kasih sayang dari mereka, saya dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini, serta meraih gelar Sarjana Humaniora yang telah lama saya nanti-nantikan.
5. Hendra Tanu yang telah memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kasih sayangnya.

6. Teman-teman Geng-gong (Egi, Moti, Fira, Robi, Rima, dan Ari) yang menjadi teman seperjuangan selama 4 tahun kita berkuliah. Suka dan duka banyak dilalui dalam masa perkuliahan dan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, kalian adalah sahabatku sampai kapanpun.
7. Teman-teman se-angkatan 2006 (Andi Arif, Tommy, Firman, Erik, Gamal, Sukarno, Yoga, Pras, Acong, Keni, Syeni, Gembel, Hasyim, Engkong, Ilho, Boik, Rifky, Ashagi, Gonz, Luki, Adi, Dedi, Ratna, Winda, Amal, Reza, Gandhi, Dedi “kecil”, Gunawan). Kebersamaan yang penuh keriangannya telah terjalin antara kita semua dalam masa perkuliahan sejak empat tahun yang lalu. Semoga cita-cita kita untuk menyelesaikan bangku kuliah ini dapat tercapai semua, Amin.
8. Teman-teman program studi Ilmu Sejarah angkatan 2004, 2005, 2007, 2008 dan 2009, yang tidak pula dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman sekelas perkuliahan Akuntansi angkatan 9, Universitas Pancasila, yang telah memberikannya agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 15 Juli 2010

penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	8
I.3. Tujuan Penulisan .....	8
I.4. Ruang Lingkup .....	9
I.5. Metode Penelitian .....	9
I.6. Tinjauan Pustaka .....	11

I.7. Sistematika Penulisan .....	14
----------------------------------	----

**BAB II: KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA PADA  
TAHUN 1957—1968 ..... 16**

II.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pembuatan Kebijakan

Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1957—1968 .....	16
---	----

II.1.1. Faktor Internal .....	17
-------------------------------	----

II.1.2. Faktor Eksternal .....	22
--------------------------------	----

II.2. Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1957—1968...	23
--	----

ix

**BAB III: KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA PADA  
TAHUN 1968—1971 ..... 33**

III.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Kebijakan

Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971 .....	33
---	----

III.1.1. Faktor Internal .....	33
--------------------------------	----

III.1.2. Faktor Eksternal .....	35
---------------------------------	----

III.2. Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971..	37
--	----

III.3. Penandatanganan Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) .....	46
---	----

III.4. Asia Tenggara Sebagai Kawasan Damai, Bebas, dan Netral .....	49
---	----

**BAB IV: SIKAP NEGARA-NEGARA TERHADAP IDE ZOPFAN  
(ZONE OF PEACE, FREEDOM, AND NEUTRALITY) ..... 53**



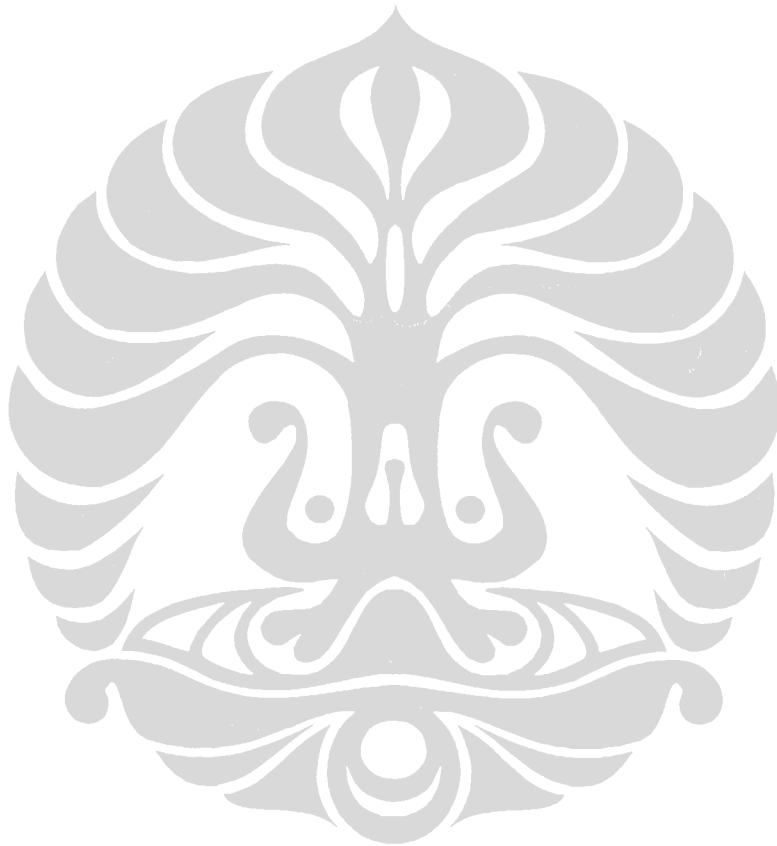
IV.1. Sikap Negara-Negara ASEAN .....	54
IV.1.1. Malaysia .....	54
IV.1.2. Singapura .....	56
IV.1.3. Indonesia .....	58
IV.1.4. Thailand .....	60
IV.1.5. Filipina .....	62
IV.2. Sikap Negara-Negara Bukan ASEAN di Asia Tenggara .....	64
IV.2.1. Brunei Darussalam .....	64
IV.2.2. Myanmar .....	64
IV.2.3. Indochina .....	65
IV.3. Sikap Negara-Negara Super Power .....	67
IV.3.1. Uni Sovyet .....	67
IV.3.2. Cina .....	70
IV.3.3. Amerika Serikat .....	71
<b>BAB V: KESIMPULAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tokoh-tokoh Malaysia ..... 81

Lampiran 2. Peta Malaysia ..... 86

Lampiran 3. Hubungan Baik Malaysia-Inggris .....	87
Lampiran 4. Gerakan Anti-Komunis Malaysia .....	89
Lampiran 5. Persidangan Netralitas dan ZOPFAN .....	91
Lampiran 6. Deklarasi ZOPFAN .....	93



**xi**

**DAFTAR SINGKATAN**

AMDA = *Anglo Malaysian Defence Agreement*

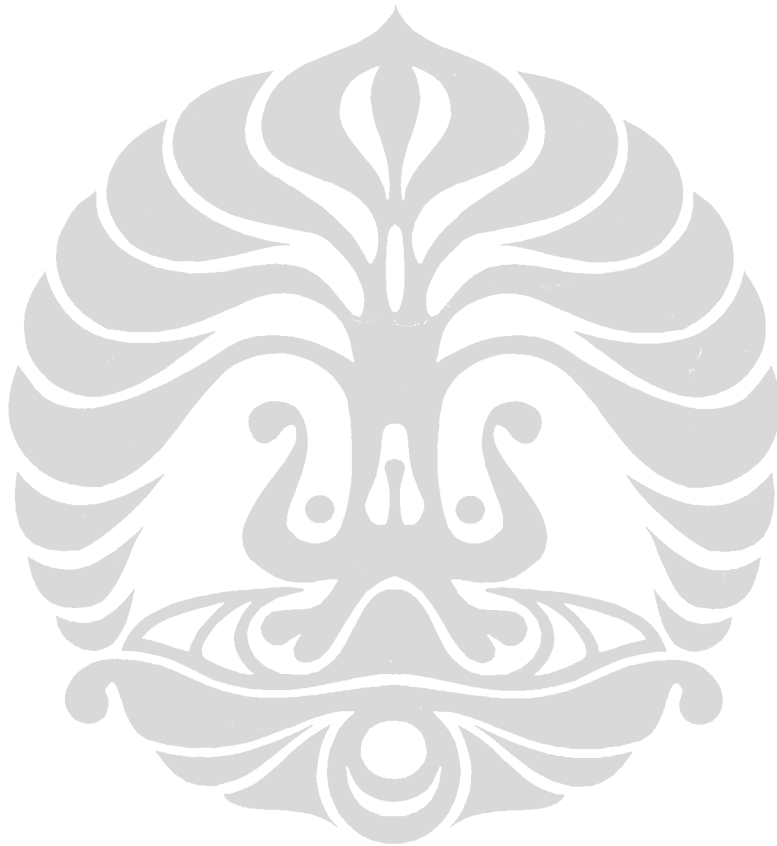
ASEAN	= <i>Association of South East Asian Nation</i>
CHOGM	= Persidangan Pemimpin-Pemimpin Negara Commonwealth
FPDA	= <i>Five Power Defence Arrangement</i>
MAGERAN	= Majelis Gerakan Negara
PBB	= Persatuan Bangsa-Bangsa
PKC	= Partai Komunis Cina
PKI	= Partai Komunis Indonesia
PKM	= Partai Komunis Malaya
NOC	= Majelis Keselamatan Negara
SEATO	= <i>South East Treaty Organization</i>
UMNO	= <i>United Malays National Organization</i>
ZOPFAN	= <i>Zone of Peace, Freedom, and Neutrality</i>



Adidaya	: negara-negara besar dunia yang terlibat dalam Perang Dingin.
Afro-Asia	: negara-negara berkembang yang terletak di Afrika dan Asia.
Anti-kolonialis	: bentuk penolakan terhadap penjajahan dan pendudukan pada sebuah negara.
<i>Commonwealth</i>	: persatuan negara-negara bekas jajahan Inggris yang menjalin hubungan baik dengan Inggris.
Dekolonisasi	: penghapusan daerah jajahan.
Demokrasi	: sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
<i>Detente</i>	: peredaan ketegangan.
Federasi Malaysia	: gabungan dari beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak, yang membentuk suatu federasi pada tahun 1963. Namun, Singapura memutuskan keluar dari federasi pada tahun 1965.
Indocina	: sebuah wilayah di Asia Tenggara yang terletak di antara timur India dan selatan Cina.
Kapitalisme	: suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Komunisme	: paham sebagai reaksi terhadap kapitalisme yang mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
Konfrontasi	: Cara menentang dengan cara berhadapan langsung dan terang-terangan kepada pihak yang dianggap musuh.
<i>Malayan Union</i>	: sebuah federasi bentukkan Inggris untuk menyatukan Semenanjung Malaya di bawah pemerintahan tunggal sehingga mempermudah sistem administrasi.

Neo-kolonialis : sebuah bentuk penjajahan baru terhadap sebuah negara yang pernah dijajahi sebelumnya.

Non-Blok	: kebijakan suatu negara untuk menjalankan konsep tidak berat sebelah/memihak pada pihak manapun yang berselisih pada masa Perang Dingin.
<i>Peaceful co-existence</i>	: hidup bersama dan damai.
Perang Dingin	: perang menyebarkan ideologi antara blok Barat dan blok Timur.
Pro-Barat	: kebijakan suatu negara yang memutuskan untuk lebih memihak kepada negara-negara Barat dalam menjalankan pemerintahannya.



( Dina Pangestu Rini)

vi

## ABSTRAK

Nama : Dina Pangestu Rini

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971: Studi Kasus ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)

Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik luar negeri Malaysia dalam usaha menerapkan konsep netralitas. Pada tahun 1968—1971 merupakan periode dimana Malaysia mendayausahakan konsep netralitas ini dapat diterima sebagai kebijakan politik luar negeri. Sebelumnya, Malaysia merupakan negara yang menganut konsep pro-Barat dan anti-komunis dalam kebijakan politik luar negerinya. Namun karena situasi dan kondisi dari dalam dan luar negeri mengalami perubahan, Malaysia berharap konsep netralitas ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, dari konsep netralitas ini menghasilkan sebuah deklarasi bernama ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*).

Kata kunci:

Malaysia, kebijakan, hubungan antarnegara, pertahanan, netralitas, ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)

**ABSTRACT**

Name : Dina Pangestu Rini

Study program: History

Title : The concept of neutrality in Malaysian foreign policy in 1968-1971: A study of case ZOPFAN (zone of peace, freedom and neutrality)

This thesis discusses about Malaysia's foreign policy in an attempt to apply the concept of neutrality. In the year 1968-1971 was a period that the concept of neutrality can be accepted as foreign policy in Malaysia. Earlier, Malaysia was a country that includes the concept of pro-Western and anti-communist in its foreign policy. But because of changes in domestic and international situations, Malaysia was hoping the concept of neutrality can be used as a basic program relationship between the countries in Southeast Asia. In the end, from concept to produce a declaration of neutrality named ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and neutrality).

Key words:

Malaysia, policy, relationship, defense, neutrality, ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and neutrality).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pada dasarnya sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri, karena setiap negara saling bergantung dengan negara lainnya. Oleh sebab itu, setiap negara perlu untuk menjalin dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jika suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain, hubungan tersebut dijalin melalui suatu bentuk kebijakan tertentu yang dikenal sebagai kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berperan sebagai panduan atau arahan bagi setiap tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri ini umumnya mengikuti kepentingan negara tersebut. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri suatu negara bersifat statis, bisa berubah menurut kondisi masa itu.<sup>1</sup>

Seperti halnya Malaysia, kebijakan luar negeri Malaysia digunakan dan diambil melalui keputusan kerajaan atas nama negara Malaysia dalam rangka hubungannya dengan negara lain dan dalam usaha mencapai tujuan nasional negara. Malaysia menekankan kepentingan dan keperluan nasional sebagai faktor utama dalam memformulasikan kebijakan luar negerinya. Tujuan utama kebijakan luar negeri Malaysia adalah untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional negara Malaysia yang merupakan suatu nilai yang harus dihargai dan diterapkan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Malaysia.<sup>2</sup> Perdana menteri adalah orang yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab untuk membuat keputusan serta menentukan jalan mana yang harus diikuti dalam pendirian kebijakan luar negeri Malaysia.

Secara geografis, Malaysia merupakan negara yang strategis, yang terletak di tengah-tengah lintasan yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan

---

<sup>1</sup> Faridah Jafaar. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007. Hal.15.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.16.



Samudera Pasifik. Hal ini menjadikannya sebagai sebuah lintasan laut yang ramai di kawasan Asia Tenggara. Sejak masa penjajahan bangsa-bangsa asing, kebanyakan perdagangan di antara Timur Jauh dan Timur Tengah menggunakan perairan Selat Malaka sebagai lintasan utama.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, banyak persaingan dan perebutan oleh bangsa-bangsa asing untuk membuka pelabuhan dan perniagaan sejak abad ke-16.<sup>4</sup> Berlatarbelakangkan letak geografis Malaysia yang amat strategis ini, perlu untuk diperhatikan oleh Malaysia agar tetap menjadi sebuah negara yang aman dan terhindar dari pengaruh-pengaruh luar. Oleh sebab itu, melalui kebijakan luar negeri Malaysia sekiranya dapat mengatasi segala masalah dari luar yang dapat mengancam keutuhan negaranya.

Kebijakan politik luar negeri Malaysia dimulai ketika negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1957. Dimulai dari tahun tersebut, Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Jauh sebelum Malaysia merdeka dan Tunku menjabat sebagai perdana menteri, Malaysia merupakan negara yang dekat dengan Inggris. Sejak abad ke-18, Inggris telah menjajah dan berkuasa di negara ini.<sup>5</sup> Di antara negara-negara lain yang menjajah Malaysia, hanya Inggris yang lama berkuasa di negara ini. Oleh sebab itu, Inggris begitu dekat dengan Malaysia baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Kedekatan dengan Inggris ini telah membawa implementasi kebijakan politik luar negeri Malaysia lebih memihak dan bergantung kepada Inggris.

Selain berlatarbelakangkan sejarah Malaysia yang dekat dengan Inggris, kepribadian Tunku juga sangat berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Malaysia pada masa kepemimpinannya ini. Tunku dikenal sebagai pribadi yang pro-Barat dan anti-komunis.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari sikap bergantungnya Malaysia pada negara Barat semasa pemerintahan Tunku, khususnya dengan Inggris. Misalnya, Tunku mengambil sikap untuk menjadikan Malaysia sebagai negara anggota *Commonwealth* setelah

---

<sup>3</sup> Fuziah Shaffie, dan Ruslan Zainuddin. *Sejarah Malaysia*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000. Hal. 565.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.153.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jafaar, *op. cit.*, hal.27.

merdeka. *Commonwealth* adalah persatuan negara-negara bekas jajahan Inggris yang menjalin hubungan baik dengan Inggris.<sup>7</sup>

Selain dalam bidang politik dan ekonomi, hubungan baik yang nampak antara Malaysia dan Inggris juga terlihat pada bidang pertahanan. Ketika Malaysia merdeka pada tahun 1957, dunia sedang memasuki era Perang Dingin. Asia Tenggara merupakan wilayah yang banyak menerima pengaruh dan dampak dari Perang Dingin ini. Perang Dingin merupakan perang antara dua blok yang berusaha mempengaruhi ideologi mereka di negara-negara dunia ketiga dimana terletak di kawasan strategis seperti di Asia Tenggara. Dua blok tersebut adalah blok Barat yang dikuasai Amerika Serikat (beserta sekutunya) berideologi kapitalis-demokrasi, dan blok Timur yang dikuasai Uni Soviet berideologikan komunis, tetapi pada akhirnya komunis dari Cina ikut pula mempengaruhi di beberapa negara di Asia Tenggara.

Pribadi Tunku yang anti komunis ini telah menimbulkan kekhawatiran pada dirinya dengan kehadiran Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara yang menurutnya berbahaya karena dapat mengancam keutuhan negara Malaysia. Beberapa kerjasama dalam bidang pertahanan antara Malaysia dan Inggris pun Tunku lakukan. Salah satunya adalah ditandatanganinya perjanjian AMDA (*Anglo Malaysian Defence Agreement*) pada tahun 1957.<sup>8</sup> AMDA merupakan perjanjian pertahanan dan bantuan keamanan dari barat.

Malaysia menjadi negara yang sering menerima bantuan dana dan militer dari Inggris, baik untuk membendung aliran komunis yang dapat mengancam pertahanan Malaysia, contohnya ketika Malaysia menghadapi ancaman konfrontasi dengan negara tetangganya yaitu Indonesia pada tahun 1964. Malaysia beranggapan konfrontasi Indonesia tersebut didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mendapat bantuan dari PKC (Partai Komunis Cina).<sup>9</sup> Oleh sebab itu, Malaysia sangat bergantung dengan Inggris, terutama dalam bidang pertahanan ini.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.51.

<sup>9</sup> Shaffie, *op. cit.*, Hal.571.

Hubungan diplomatik Malaysia pada masa pemerintahan Tunku tidak berjalan baik. Malaysia hanya mengharapkan bantuan dan bergantung pada Inggris saja. Kesan Malaysia di mata internasional ketika itu dapat dikatakan buruk, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga. Terlebih lagi pada saat Malaysia menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah politik dengan negara lain. Peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia, pemisahan Malaysia-Singapura, dan tuntutan Filipina atas Sabah telah banyak memberi kesan buruk terhadap kebijakan politik luar negeri yang dijalani oleh Tunku.<sup>10</sup>

Kedekatan yang teramat erat antara Malaysia dan Inggris telah memberikan dampak kerugian bagi Malaysia. Kerugian tersebut terlihat pada sikap Malaysia dalam menghadapi konfrontasi dan konflik dengan negara-negara tetangganya tersebut. Bila dalam menghadapi masalah-masalah tersebut mereka mendapat banyak perhatian dan dukungan dari negara-negara lain khususnya negara-negara dunia ketiga lainnya (Afro-Asia), lain halnya dengan Malaysia yang tidak memperoleh bantuan moril tersebut. Hal tersebut karena Malaysia tidak dekat dan dikenali oleh negara-negara dunia ketiga.

Ada beberapa orang di kabinet yang menyadari kelemahan kebijakan luar negeri yang dijalani oleh Tunku. Salah satunya adalah Tun Abdul Razak yang merupakan Wakil Perdana Menteri di masa pemerintahan Tunku. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan Tunku disadari oleh Tun Razak, termasuk dalam hal menghadapi masalah dengan negara-negara tetangga Malaysia tersebut. Namun, walaupun Tun Razak adalah orang yang paling dekat dengan Tunku selama di kabinet, Tun Razak tidak mempunyai kuasa yang penuh dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan hanya Tunku yang mempunyai kuasa penuh di dalam memutuskan segala keputusan negara. Meskipun Tun Razak tidak mempunyai hak tersebut, ia yang memiliki sikap sebagai seorang *innovator* ini tetap mencoba untuk meyakinkan Tunku bahwa kecondongannya terhadap Inggris akan merugikan bagi Malaysia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003. Hal.37.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Usaha yang dilakukan Tun Razak berhasil untuk meyakinkan Tunku. Malaysia mulai mengaktifkan dirinya dalam hubungan antarnegara. Dampak dari usahanya tersebut berhasil dengan diidapkannya dukungan moril dari negara-negara Afro-Asia dalam hal menghadapi konfrontasi dan konflik yang sedang dihadapinya. Walaupun usaha untuk menjadikan Malaysia lebih aktif dalam hubungan antarnegara berhasil, tetapi tidak lantas membuat Tunku merubah kebijakan politik luar negerinya. Oleh sebab itu, sejak tahun 1964 Malaysia menghadapi masa peralihan kebijakan politik luar negerinya yang lebih terbuka, walaupun belum benar-benar berubah.<sup>12</sup>

Ada seorang lagi tokoh Malaysia yang turut bersama Tun Razak meminta Tunku untuk merubah kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakannya tersebut, yaitu Tun Dr. Ismail yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri. Mereka sangat aktif memperhatikan kebijakan politik luar negeri yang Tunku laksanakan ini, karena mereka menganggap dan sadar yang menjadi kelemahan kebijakan luar negeri Malaysia pada masa kepemimpinan Tunku tersebut adalah tidak seimbang. Hal tersebut disebabkan Tunku yang menjalani kebijakan luar negeri hanya dengan negara-negara Barat dan sangat anti-komunis seperti Uni Sovyet, Cina, dan Vietnam Utara. Sebaliknya, Tunku mengabaikan kemampuan negaranya sendiri.<sup>13</sup>

Masa peralihan kebijakan politik luar negeri Malaysia tersebut diwarnai kembali oleh perubahan situasi politik dunia pada tahun 1968. Perubahan yang dimaksud dan paling berarti bagi Malaysia adalah penarikan pasukan Inggris dari Terusan Suez, serta dari Malaysia dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi dan strategi Inggris. Inggris sudah tidak lagi mampu menjadi polisi dunia, karena Inggris ingin lebih mementingkan strategi mereka di Eropa.<sup>14</sup> Keputusan penarikan tentara Inggris juga menyebabkan perjanjian pertahanan AMDA dihentikan pula.

---

<sup>12</sup> Shaffie, *op. cit.*, Hal.574.

<sup>13</sup> Hassan, *op. cit.*, hal.40.

<sup>14</sup> Chamil Wariya, dan B.A.Hamzah. *ZOPFAN: Mitos atau Realiti*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1992. Hal.19.

Hal tersebut telah membuat Tun Razak dan Tun Ismail menyadari bahwa penghentian perjanjian AMDA telah menyebabkan wujud kekosongan jaminan keselamatan dan pertahanan Malaysia. Keadaan tersebut akan menyebabkan negara-negara adidaya yang terlibat dalam Perang Dingin berusaha memasuki Malaysia, khususnya dari negara-negara berideologi komunis. Oleh sebab tidak adanya lagi perlindungan keamanan dari Inggris, Malaysia berharap diperlukannya bantuan dari negara-negara sahabat, dalam hal ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Bantuan yang dimaksud adalah kerjasama yang akan menciptakan keadaan damai di kawasan ini.

Pada bulan Januari 1968, Tun Ismail menyampaikan keinginannya di Parlemen untuk dapat melihat Malaysia dan Asia Tenggara dapat hidup tenang dan berdampingan.<sup>15</sup> Agar negara dan kawasan ini dapat hidup secara damai, maka tepatlah konsep netralitas digunakan sebagai kebijakan politik Malaysia dan diterapkan oleh Asia Tenggara. Konsep netralitas yang diinginkannya tersebut dinamai sebagai “Rancangan Keamanan Ismail” (*Ismail Peace Plan*).<sup>16</sup> Tun Ismail dalam parlemen tersebut menekankan pentingnya Malaysia mencari satu alat alternatif untuk menjamin keamanan kawasan setelah Inggris berusaha menarik diri dari Malaysia dan Singapura. Tun Ismail menyarankan agar konsep ini dijamin oleh negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Cina.<sup>17</sup>

Konsep netralitas dipilih karena konsep ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kepentingan nasional dari ancaman pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam Perang Dingin.<sup>18</sup> Dengan tidak memihaknya pada salah satu pihak, diharapkan Malaysia menjadi negara yang aman dan damai dari pengaruh luar. Untuk menunjang konsep ini, Malaysia harus memainkan peranan dalam menjalin hubungan sekawasan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Shaffie, *op. cit.*, Hal.574.

<sup>17</sup> Wariya, *op. cit.*, hal.20.

<sup>18</sup> Bilveer Singh. ZOPFAN and The New Security Order in The Asia-Pacific Region. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Bhd. 1992. Hal.27.

Sejak konsep tersebut dikumandangkan, terjadi kembali perubahan situasi dan kondisi politik dunia. Selain sebelumnya pengumuman penarikan tentara Inggris dari Terusan Suez serta dari Malaysia dan Singapura terjadi, ada beberapa kondisi internasional yang ikut mewarnai perubahan situasi politik dunia. Hal tersebut diantaranya: (1) Pengumuman Amerika Serikat tentang Doktrin Guam oleh Presiden Nixon mengenai pengurangan keterlibatan negara ini dalam perang di Vietnam pada bulan Juli 1969; (2) Perkembangan kepentingan Uni Sovyet yang diungkapkan oleh sekretaris umum Leonid Brezhnev dalam sebuah proposal untuk sistem keamanan kolektif Asia pada bulan Juni 1969; (3) Kemunculan RRC di politik dunia setelah berakhirnya Revolusi Budaya di tahun 1969 sejalan dengan meningkatnya konflik Sino-Soviet, bercermin pada perubahan sistem politik internasional ketika itu dari sistem bipolar menjadi multipolar; (4) Kemunculan era *detente* antara negara-negara Superpower; (5) Perkembangan penting Jepang yang tidak ingin ketinggalan menjadi kekuatan ekonomi dominan di dunia, khususnya di Asia Tenggara; dan (6) Menyebarnya perang di Vietnam ke negara-negara tetangganya seperti Kamboja dan Laos.<sup>19</sup>

Perubahan situasi politik dunia tersebut menjadi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan oleh Malaysia dan Asia Tenggara jika kawasan ini ingin tetap terjamin keselamatan dan pertahanannya. Berdasarkan faktor eksternal tersebut, maka tepat sekali konsep netralitas diusahakan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya agar kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengancam kepentingan dalam negeri masing-masing negara, dalam hal ini adalah pengaruh paham komunis yang semakin meluas sejak keterlibatan negara-negara Barat berkurang.

Dari penjelasan latar belakang di atas, telah membuat ketertarikan bagi penulis untuk menulis dan meneruskan penelitian mengenai kebijakan politik luar negeri Malaysia dalam menerapkan konsep netralitas. Sebelumnya belum ada penelitian-penelitian yang membahas secara keseluruhan gagasan netralitas di

---

<sup>19</sup> Heiner Hanggi. *ASEAN and the ZOPFAN Concept*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 1991, Hal. 13.

dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia yang pada akhirnya akan melahirkan Deklarasi ZOPFAN, dan akan diterapkan oleh Asia Tenggara dalam menghadapi kondisi dan situasi politik dunia pada saat itu. Dengan kata lain Malaysia adalah sebagai pelopor dibuatnya gagasan netralitas, baik untuk dirinya sendiri maupun negara-negara sekawasan di Asia Tenggara.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah:

Bagaimanakah Malaysia menerapkan konsep netralitas dalam kebijakan luar negerinya, dan memperjuangkan konsep tersebut agar dapat diterima oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan isu ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)?

Lalu, untuk mengembangkan permasalahan tersebut, maka diajukan oleh penulis beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya konsep netralitas oleh Malaysia?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Malaysia dalam memperjuangkan konsep netralitas agar diterima oleh negara-negara sekawasan di Asia Tenggara?
3. Bagaimana sikap negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara adidaya terhadap konsep netralitas dan Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*)?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa konsep netralitas dapat muncul dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia yang diperjuangkan untuk menjadi suatu konsep yang dapat diterapkan

oleh Asia Tenggara dan Malaysia sendiri, khususnya yang terkait dengan isu ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*). Penelitian ini menjadi penting karena konsep netralitas telah membuat perubahan pada kebijakan politik Malaysia yang lebih terbuka terhadap hubungan antarbangsa, serta telah membawa Asia Tenggara lebih menitik beratkan tujuannya kepada kerjasama regional yang lebih harmonis, jadi campur tangan kekuatan-kekuatan luar harus dihindari, terutama karena alasan kondisi Perang Dingin yang dihasilkan di Asia Tenggara.

#### **I.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah mulai dari tahun 1968 sampai dengan 1971. Alasan penulis mengambil tahun 1968 sebagai awal dari penelitian ini karena pada tahun 1968 seorang tokoh Malaysia yang bernama Tun Dr. Ismail yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri ketika itu, menyampaikan dan memperkenalkan suatu proposal netralisasi dalam Sidang Parlemen Malaysia. Hal ini merupakan langkah awal bagi pihak Malaysia untuk memperjuangkan konsep netralitas agar dapat diterima oleh Malaysia dan Asia Tenggara. Kemudian, tahun 1971 penulis ambil sebagai akhir periode penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut konsep netralitas dapat diterima dan diwujudkan dalam suatu deklarasi yang bernama Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) melalui persidangan negara-negara anggota ASEAN di Malaysia pada tanggal 27 November 1971.

#### **I.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Metode Sejarah. Metode Sejarah mengenal 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses mengumpulkan informasi dan data mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui tahap heuristik ini. Pada tahap pertama ini, penulis telah memperoleh beberapa sumber, yaitu berupa



buku dan jurnal, serta artikel sebagai sumber primer. Penulis telah mendapatkan beberapa sumber penelitian yang diperoleh dari beberapa tempat, seperti di Perpustakaan FIB, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan LIPI, Perpustakaan Sekretariat ASEAN, Perpustakaan Negara Malaysia, NUS Central Library, National Library Board of Singapore dan beberapa sumber yang didapatkan dari rekan-rekan dan pembimbing.

Dari tempat-tempat tersebut penulis menemukan buku, jurnal dan artikel yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Buku-buku tersebut antara lain *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*, Tun Abdul Razak Bin Dato' Hussein: *Dasar Luar Malaysia 1970—1976*, *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy 1957—1977*, *Studi Perebutan Pengaruh Super Power di Samudera Hindia dan Dampaknya Terhadap ZOPFAN, ASEAN and the ZOPFAN Concept*, *Malaysian Politics: the Second Generation*, *ZOPFAN: Mitos atau Realiti*, *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*, *Keamanan Sejagat: Peranan Malaysia Dalam Politik Antarabangsa, Cina dan Malaysia dalam Arena Perang Dingin 1949—74*, dan masih banyak lainnya. Sedangkan, untuk jurnal penulis dapatkan dari situs J-Store. Misalnya, jurnal yang berjudul "ASEAN and the Management of Regional Security." *Pacific Affairs*, Vol. 71, No. 2; dan "Foreign Policy Formulation in Malaysia." *Asian Survey*, Vol. 12, No.3, dan masih banyak lainnya. Sedangkan, artikel dari sebuah koran terbitan Malaysia penulis dapatkan dari Perpustakaan Negara Malaysia.

Tahap kedua adalah kritik. Tahapan ini adalah tahap pengujian dan penilaian yang dilakukan untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan. Tahap kritik terbagi menjadi dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan cara meneliti bentuk fisik sumber-sumber tersebut apakah palsu atau sejati. Sementara kritik intern dilakukan dengan cara memberi penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber data, dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber, sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang terpercaya dan dapat digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya pada tahapan ketiga adalah interpretasi. Pada tahapan ini penulis mencoba memberikan penilaian terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan. Fakta-fakta tersebut tidak semuanya dapat digunakan, karena hanya fakta-fakta yang setelah diinterpretasikan ternyata sesuai dan relevan yang dapat disatukan menjadi kisah sejaman. Penilaian secara subjektif sedapat mungkin dihindari dan diusahakan bersikap objektif.

Terakhir adalah tahapan historiografi. Tahapan ini merupakan rekonstruksi peristiwa yang akan penulis lakukan dengan cara merumuskan kembali peristiwa yang telah terjadi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui tiga tahapan sebelumnya.

## **I.6. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri Malaysia, khususnya yang terkait dengan konsep netralitas dan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) cukup banyak dilakukan. Ada beberapa sumber yang mengulas mengenai masalah tersebut, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel. Namun, untuk penulis penggunaan sumber buku lebih banyak dilakukan karena lebih lengkap dijelaskan dan lebih mendalam untuk hal-hal yang terkait dalam penelitian ini.

Misalnya, pada buku pertama adalah buku berjudul *Tun Abdul Razak Bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976* yang ditulis oleh Rozeman Abu Hassan. Kelebihan dari buku ini adalah Penulis mengkaji secara detail ketokohan Tun Abdul Razak terutama dalam pelaksanaan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara lain. Namun, kekurangan buku ini terhadap penulisan penelitian ini yaitu tidak menjelaskan secara jelas mengenai konsep ZOPFAN tersebut.

Buku kedua adalah buku berjudul *ZOPFAN: Mitos atau Realiti* yang ditulis oleh Chamil Wariya dan B.A. Hamzah. Usaha penulis untuk menjelaskan secara jelas mengenai asal-usul, strategi, dan sikap negara-negara lain terhadap

konsep ZOPFAN menjadikan kelebihan dari buku ini. Namun, kekurangannya dibanding penelitian ini adalah tidak menjelaskan konsep ZOPFAN dari kaca mata Malaysia sebagai penggagas secara detail. Selain itu, buku ini lebih banyak menjelaskan masa depan deklarasi ini, dimana hal tersebut jauh dari periodisasi penulisan skripsi ini.

Buku ketiga yaitu buku yang berjudul *Keamanan Sejagat: Peranan Malaysia Dalam Politik Antarabangsa*. Pada buku ini, penulis yang bernama Mokhtar A. Kadir menjelaskan bagaimana negara Malaysia dalam politik antar negara, khususnya mengenai keamanan yang menjadi isu utama dan penting semasa Perang Dingin, dimana hal tersebut sebagai usaha pelaksanaan hubungan diplomasinya dengan negara-negara lain. Namun, kekurangannya bagi penelitian skripsi ini adalah sedikit sekali penulis menjelaskan mengenai konsep netralitas yang kemudian terealisasi dalam bentuk deklarasi ZOPFAN. Buku ini lebih sering menekankan pentingnya keamanan secara umum semasa Perang Dingin berlangsung.

Buku keempat adalah buku berjudul *ASEAN: harapan dan Kenyataan*, yang ditulis oleh M. Sabir. Di dalam buku ini terdapat satu bab yang menjelaskan bagaimana kerjasama politik ASEAN dan lebih mengarah kepada kerjasama pertahanan, khususnya mengenai konsep netralitas dan ZOPFAN yang di cetuskan oleh Malaysia. Namun, buku ini tidak menjelaskan bagaimana kebijakan politik luar negeri dari Malaysia sendiri. Melainkan, di dalamnya hanya menceritakan perjalanan konsep tersebut dapat diterima oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Buku kelima merupakan buku yang ditulis oleh Heiner Hanggi yang berjudul *ASEAN and the ZOPFAN concept*, menerangkan lebih jauh lagi asal muasal gagasan netralitas. Yang menjadi kelebihan dari buku ini adalah, penjelasan dari penulis tentang situasi negara-negara Asia Tenggara hingga dibuatnya konsep ZOPFAN ini, serta faktor-faktor di Asia Tenggara yang mempengaruhi terbentuknya konsep ZOPFAN. Namun, pada buku ini tidak menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan politik luar negeri Malaysia secara khusus, hanya sebatas konteks ASEAN dan Asia Tenggara.

Buku keenam adalah yang berjudul *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*, yang ditulis oleh Faridah Jaafar. Buku yang berbahasa Melayu ini berisi ringkasan yang cukup lengkap tentang perdana menteri pertama Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman hingga Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi, serta kebijakan luar negeri yang seperti apa mereka terapkan untuk Malaysia di mata internasional. Di buku ini tentunya berisi kebijakan luar negeri pada era Tun Abdul Razak, yang nerapkan dasar netralitas dalam menjalaninya. Buku ini menjelaskan pula kepribadian masing-masing perdana menteri yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri apa yang mereka ambil. Tetapi kekurangan dalam buku ini adalah tidak menjelaskan secara rinci mengenai sejarah konsep netralitas yang digunakan oleh Malaysia pada era kepemimpinan Tun Abdul Razak, yang pada akhirnya ditandatangani deklarasi ZOPFAN.

Selain buku-buku tersebut, masih banyak buku yang mendukung penulisan skripsi ini, misalnya sebuah buku yang ditulis oleh Jayaratman Saravanamuttu berjudul *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy 1957—1977*, dan buku-buku lainnya. Secara keseluruhan, buku-buku yang telah dijelaskan di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis disini akan menjelaskan Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia 1968—1971, khususnya yang terkait dengan isu ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*).

Sejauh ini buku-buku yang ada tidak menjelaskan secara detail mengenai tema dan judul yang penulis ambil. Dengan kata lain, antara buku yang satu dengan lainnya membahas sebagian dari itu, misalnya hanya ada buku yang membahas sejarah netralitas Asia Tenggara dan Deklarasi ZOPFAN saja. Adapula buku yang hanya menjelaskan kebijakan politik luar negeri Malaysia saja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang akan ditulis dalam bentuk skripsi.

## I.7. Sistematika Penulisan

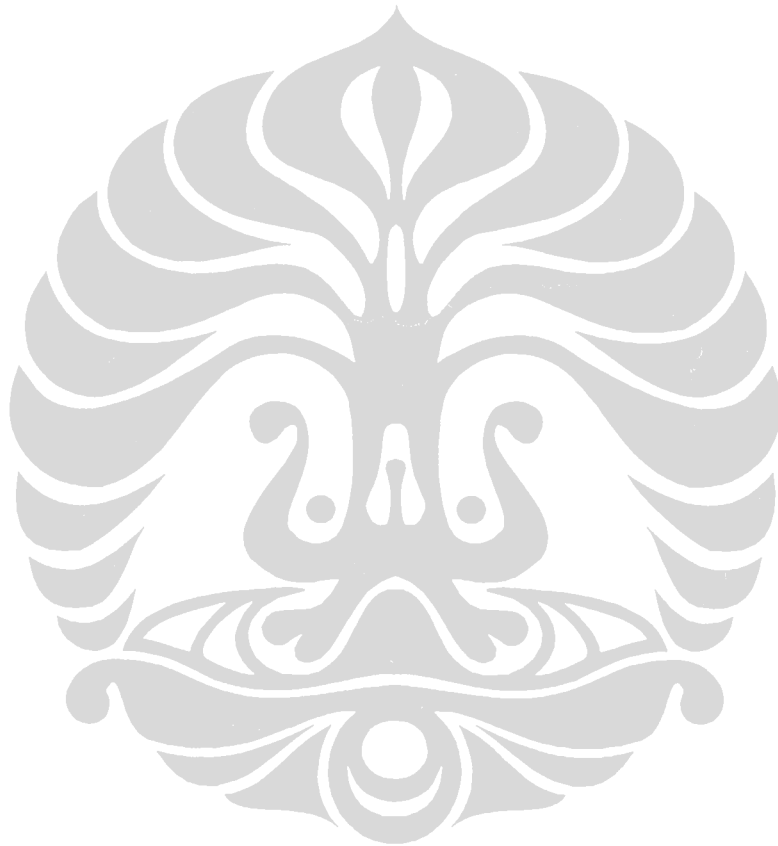
Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berjudul *Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia 1968—1971: Studi Kasus ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality)*, penulis membaginya menjadi 5 bab. Bab pertama menjelaskan pendahuluan dari penulisan penelitian ini, yang terdiri dari subbab latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1957—1968, yang terdiri dari subbab faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1957—1968, dimana diuraikan kembali dalam penjelasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, subbab berikutnya menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1957—1968.

Bab ketiga menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1968—1971, dimana berisi empat subbab diantaranya pertama faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1968—1971, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Kedua, kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1968—1971. Ketiga, penandatanganan Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*). Dan terakhir, keempat, mengenai Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas, dan netral.

Bab keempat menjelaskan tentang sikap negara-negara terhadap ide ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*), yang terdiri dari subbab sikap negara-negara ASEAN dimana dijelaskan lebih rinci sikap-sikap dari negara Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kemudian, subbab berikutnya adalah sikap negara-negara bukan ASEAN di Asia Tenggara, yang meliputi negara Brunei Darussalam, Myanmar, dan Indochina. Terakhir adalah subbab mengenai sikap negara-negara adidaya, yang terdiri dari Uni Sovyet, Cina, dan Amerika Serikat.

Bab kelima, sekaligus bab terakhir, adalah Kesimpulan. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan dari semua tulisan serta penjelasan dalam penelitian ini, termasuk penulis juga menjawab semua pertanyaan di dalam perumusan masalah dan tujuan penulisan.



## BAB II

### KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA PADA TAHUN 1957—1968

#### II.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1957—1968

Dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia didasari atas dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor ini merujuk kepada pengaruh situasi dan kondisi di dalam negeri. Situasi dan kondisi tersebut biasanya meliputi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri Malaysia.<sup>20</sup> Kebijakan politik luar negeri Malaysia pada tahun 1957—1968 sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah Malaysia yang begitu dekat dengan Inggris secara politik, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut dikarenakan Malaysia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing tersebut. Oleh karena itu, latar belakang sejarah keterlibatan Inggris di Malaysia menjadi faktor internal yang penting dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia.

Faktor kedua, faktor eksternal. Faktor ini bersumber pada lingkungan internasional.<sup>21</sup> Jadi, perubahan situasi atau kondisi internasional pada masa itu sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia. Keadaan politik dunia yang sedang berada dalam arena Perang Dingin, tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga terkena imbas dari perang ideologi tersebut. Oleh karena itu, Perang Dingin ini juga mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia sebagai faktor eksternal pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia.

Berdasarkan pada faktor-faktor di atas, perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia terjadi dan bercermin pada perubahan cara pandang pemimpin atau perdana menteri Malaysia pada masa itu. Cara pandang perdana menteri pada

---

<sup>20</sup> Jayaratman Saravanamuttu. *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy 1957—1977*. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 1983. Hal.7.

<sup>21</sup> *Ibid.*

akhirnya yang menentukan kebijakan politik luar negeri seperti apa yang ingin dibuat dan dilaksanakan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut dibuat berdasarkan beberapa hal yang terkait dengan faktor-faktor tersebut, tetapi akhirnya orang yang bertanggungjawab membuat keputusan dan menentukan jalan mana yang harus diikuti akan ditentukan oleh perdana menteri. Hal ini yang dinamakan sebagai idiosinkratik yang berkaitan erat dengan watak-watak individu yang membuat keputusan atas kebijakan politik luar negeri Malaysia.<sup>22</sup>

### II.1.1. Faktor Internal

Pada abad ke-16 dan ke-17, terjadi perebutan dan persaingan di kalangan negara-negara Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris untuk merealisasikan keinginan mereka mengambil hasil kekayaan yang terdapat di negara-negara koloni, termasuk Tanah Melayu dan Borneo. Setelah Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda pada tahun 1641, Inggris juga menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786 serta Singapura pada tahun 1819, dan kemudian menukar Bengkahulu (Sumatera Selatan) dengan Malaka yang diduduki oleh Belanda pada tahun 1824 dengan ditandatangani Perjanjian Inggris-Belanda.<sup>23</sup> Ketiga pelabuhan tersebut dikenal sebagai Negeri-negeri Selat. Pengunduran Belanda dari Tanah Melayu, telah membuka kesempatan kepada Inggris untuk memperluaskan kekuasaannya di wilayah ini.

Sejak dari awal pembentukan Negeri-negeri Selat, Inggris telah melaksanakan kebijakan untuk tidak campur tangan dalam negeri Tanah Melayu. Inggris juga tidak ingin meluaskan jajahan di negeri-negeri Melayu ataupun mengadakan perjanjian politik apapun dengan raja-raja Melayu. Kebijakan ini telah diperkenalkan untuk memelihara kepentingan pertahanan Inggris di India dan keselamatan perniagaannya di Timur. Namun, ada beberapa perkembangan yang berlaku, khususnya setelah tahun 1833. Perkembangan tersebut telah memaksa Inggris untuk berfikir ulang mengenai kebijakannya yang tidak mau ikut

<sup>22</sup> Idiosinkratik adalah sebuah faktor yang berkaitan erat dengan personaliti individu yang merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Faktor ini didalamnya mencakupi psikodinamik, kepribadian, sistem kepercayaan, dan persepsi individu yang membuat keputusan kebijakan tersebut. *Ibid.*, hal.132.

<sup>23</sup> Fuziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin. *Sejarah Malaysia*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000. Hal.153.



campur tangan dalam negeri-negeri Melayu.<sup>24</sup> Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan tersebut adalah faktor ekonomi.

Sejak awal kedatangannya ke Asia, Inggris hanya menginginkan pasaran dan pusat perniagaan saja. Namun, setelah Revolusi Perusahaan meletus di Eropa, kepentingan Inggris berubah kepada sumber daya alam.<sup>25</sup> Persediaan sumber daya alam yang banyak dan terus menerus hanya terjamin dan terealisasikan jika Inggris mempunyai tanah jajahan yang sesuai dan dapat memenuhi keperluan tersebut. Secara kebetulan, negeri-negeri Melayu kaya akan sumber daya alam dan dapat memenuhi kepentingannya tersebut. Tanah Melayu yang kaya dengan biji timah menjadi hal yang penting bagi Inggris.

Inggris mulai campur tangan di Tanah Melayu secara bertahap. Bermula dengan campur tangan secara tidak langsung melalui penglibatan Inggris dalam pemerintahan di beberapa tempat, hingga ikut campur tangan secara langsung di Perak pada tahun 1874 dan diikuti dengan negeri-negeri lainnya.<sup>26</sup> Pada ketika itu juga, penguasaan Inggris dalam sistem politik dan ekonomi di Tanah Melayu semakin stabil. Hal ini adalah hasil dari usaha-usaha yang dibuat terdahulu untuk mereda dan menghentikan beberapa konflik yang timbul karena keterlibatan Inggris dalam pemerintahan negeri setempat telah menimbulkan sikap penolakan dan kemarahan di kalangan rakyat. Dampak dari perkembangan tersebut, Inggris mulai memerankan peranan yang besar dalam pemerintahan di Tanah Melayu. Kekuasaan Sultan dan para pembesar Melayu secara perlahan-lahan dikurangkan dan disekat. Sultan dan para pembesar itu terpaksa tunduk di bawah kekuasaan Inggris.<sup>27</sup>

Sementara itu di kota-kota, golongan bangsawan Melayu dan beberapa orang pemimpin tradisional yang berpendidikan Inggris telah dibawa masuk untuk berperan sebagai pembantu dalam pemerintahan Inggris di Tanah Melayu. Mereka dibiayai pendidikannya oleh Inggris, dimana hal ini memperlihatkan hubungan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.204.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.205.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal.254.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.324.

yang dekat dan taat setia kepada Inggris.<sup>28</sup> Bagi orang Melayu di luar kota yang tidak berpendidikan Inggris, peluang untuk berperan dengan negara sangat tipis. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka lebih cenderung untuk terus menetap di kampung.

Di kalangan bangsa-bangsa asing yang menjajah Tanah Melayu, bangsa Inggris meninggalkan kesan yang mendalam khususnya pada aspek yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan hubungan antaretnis yaitu orang Melayu, Cina, dan India yang ada di Tanah Melayu. Namun, keadaan berubah setelah meletusnya Perang Dunia Kedua. Keterlibatan Inggris dalam perang tersebut telah memberi peluang kepada Jepang untuk memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara karena terdapat kekosongan kekuasaan dari Inggris. Dalam Perang Dunia Kedua ini telah membuat rencana besar Jepang di Asia yaitu 'Pemerintahan Baru Asia Timur Raya', dimana Jepang mulai datang ke Tanah Melayu pada tahun 1942.<sup>29</sup> Kekayaan sumber daya alam seperti biji timah, karet, dan biji besi telah mendorong Jepang membuat serangan ke Tanah Melayu.<sup>30</sup>

Dengan pendudukan Jepang di Tanah Melayu dan Singapura bermakna bentuk pemerintahan yang ada di negara ini telah dihapuskan. Buat pertama kalinya Tanah Melayu dan Singapura disatukan di bawah satu bentuk politik yang sebelumnya berstatus sebagai Tanah Jajahan Inggris. Pemerintahan banyak diisi oleh orang Jepang dan orang Melayu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai Inggris.<sup>31</sup>

Sejak tahun 1943, keunggulan Jepang mulai menurun ketika mereka mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan. Melalui beberapa persidangan yang diadakan, Jepang telah diminta supaya mengundurkan diri dan menyerah kalah tanpa syarat. Di Tanah Melayu, Jepang menyerah kalah secara resmi pada

---

<sup>28</sup> Faridah Jaafar. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007. Hal.24.

<sup>29</sup> Jan Pluvier. *South-East Asia From Colonialism to Independence*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974. Hal.175.

<sup>30</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.411.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.412.

tanggal 22 Februari 1946.<sup>32</sup> Walaupun pendudukan Jepang telah menciptakan beberapa masalah seperti kekurangan makanan, pengangguran, dan kemerosotan taraf kesehatan, tetapi di lain pihak kependudukan Jepang ini telah membawa suatu dampak positif bagi Tanah Melayu. Dampak positif tersebut adalah mengibarkan kembali semangat nasionalisme Melayu. Kesadaran memimpin negara sendiri muncul di kalangan orang Melayu. Anggapan bahwa Inggris sebagai suatu bangsa yang tidak dapat dikalahkan oleh bangsa Asia dengan ini dapat disingkirkan dengan kekalahan tentara Inggris di tangan tentara Jepang.<sup>33</sup>

Kejatuhan Tanah Melayu dan Singapura ke tangan Jepang dan kegagalan pemerintahan Inggris telah menghilangkan keyakinan orang Melayu terhadap Inggris. Pada dasarnya, penguasaan Inggris di Tanah Melayu harus dikemas ulang dan dikukuhkan kembali jika ingin terus menjaga kepentingan ekonomi dan strategi Inggris. Hal ini disebut sebagai kebijakan dekolonisasi Inggris di Tanah Melayu dan Singapura. Sebagai satu cara yaitu Inggris menukar bentuk pemerintahannya dari sebuah negara naungan kepada negara jajahan.<sup>34</sup>

Ketika Inggris kembali ke Tanah Melayu pada bulan September 1945, mereka merasakan bahwa suatu perubahan perlu dilakukan. Inggris telah memilih untuk melaksanakan kebijakan liberalisme dalam menjalankan undang-undang dan peraturan dalam hal pemerintahan, yang kemudian dibuatlah sebuah rancangan *Malayan Union* pada bulan Januari 1946 sebagai suatu bentuk pemerintahan yang baru bagi Tanah Melayu. Rancangan ini memiliki tujuan yaitu agar Tanah Melayu mencapai taraf pemerintahan sendiri, menciptakan satu dasar ketentaraan yang lebih mudah dipertahankan, dan satu tujuan yang timbul dari perasaan kecewa terhadap orang Melayu.<sup>35</sup> Faktor lain untuk Inggris adalah kepentingan ekonominya.

Namun, dalam pelaksanaannya banyak pertentangan yang kuat dari orang Melayu terhadap pembentukan *Malayan Union*. Inggris pun pada akhirnya membatalkan pembentukan rancangan tersebut. Inggris sadar tanpa dukungan dari

---

<sup>32</sup> Pluvier, *op. cit.*, hal.368.

<sup>33</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.417.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal.418.

<sup>35</sup> *Ibid.*

orang Melayu, rancangan mereka itu tidak akan berjalan semestinya. Untuk menggantikan rancangan *Malayan Union*, Inggris membentuk kembali rancangan yaitu Persekutuan Tanah Melayu melalui suatu perjanjian pada tanggal 21 Januari 1948.<sup>36</sup> Pada tahun 1951, Inggris telah memperkenalkan sistem pemerintahan dimana melantik beberapa warga negara Persekutuan Tanah Melayu menjadi pegawai dan menteri dalam pemerintahan. Sistem ini bertujuan memberikan peluang kepada pemimpin setempat memerintah negara sendiri dan sebagai latihan secara langsung untuk mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi.

Dampak dari perkembangan tersebut adalah diadakannya pemilihan umum agar penduduk Persekutuan Tanah Melayu dapat memilih pemimpin mereka sendiri. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1951 dan diikuti Pemilu kedua pada tahun 1955 untuk seluruh negeri di Tanah Melayu. Hasil Pemilihan Umum 1955 ini adalah dibentuknya kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu dimana Tunku Abdul Rahman terpilih menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dari Partai UMNO (*United Malays National Organization*) yang menang dalam Pemilihan Umum 1955.<sup>37</sup>

Kemenangan partai-partai dalam Pemilu tersebut telah mendorong pemerintahan untuk mempercepat kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Pada bulan Januari 1956, satu rombongan yang terdiri dari delapan orang berangkat ke London. Rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ini bertujuan untuk berunding dengan para pegawai Inggris sebagai usaha menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Pihak Inggris diketuai oleh Lord Lennox Boyd yang merupakan Pengurus Tanah Jajahan Inggris. Perundingan kemerdekaan berlangsung dari tanggal 18 Januari sampai 8 Februari 1956.<sup>38</sup> Beberapa persetujuan telah sukses dihasilkan oleh Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, dimana Tanah Melayu berada dalam lingkungan *Commonwealth* dan menjalankan pemerintahan yang demokratis.

---

<sup>36</sup> Pluvier, *op. cit.*, Hal.404.

<sup>37</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.434.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal.437.

*Commonwealth* merupakan persatuan negara-negara bekas jajahan Inggris yang menjalin hubungan baik dengan Inggris. Keputusan menjadikan Tanah Melayu sebagai anggota *Commonwealth* telah diputuskan oleh Tunku sebelum Tanah Melayu merdeka. Hal ini terlihat pada manifesto Partai Persemakmuran dalam Pemilihan Umum 1955. Manifesto ini menyatakan Tanah Melayu akan menjadi Negara anggota *Commonwealth* setelah merdeka.<sup>39</sup> Melalui persatuan negara-negara bekas jajahan Inggris ini, Tanah Melayu membuat dan melaksanakan kebijakan politik luar negerinya lebih condong kepada negara Barat, dalam hal ini adalah Inggris.

### II.1.2. Faktor Eksternal

Ciri utama politik internasional setelah Perang Dunia kedua ditandai oleh munculnya dua kutub kekuatan dunia yang terdiri dari Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet (US) beserta sekutunya. Antara kedua kekuatan ini yang disebut sebagai negara adidaya, telah terjadi pertentangan yang bermula dari perbedaan ideologi yang sangat berlainan.<sup>40</sup> Ideologi yang dimaksudkan adalah paham kapitalis (demokratis) oleh pihak Blok Barat dan paham komunis oleh pihak Blok Timur. Pertentangan ideologi ini dilanjutkan dalam bentuk Perang Dingin untuk saling memperluas lingkungan pengaruhnya masing-masing. Disebut sebagai Perang Dingin karena perang ini tidak berkompetisi secara langsung bagi negara-negara yang terlibat, melainkan berlomba-lomba menyebarkan ideologi masing-masing negara.

Persaingan antara kedua negara adidaya ternyata telah sangat mempengaruhi negara-negara kecil, baik yang sudah merdeka, baru merdeka dan yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya.<sup>41</sup> Negara-negara ini telah menjadi sasaran negara-negara adidaya melalui bantuan ekonomi dan militer yang memang sangat dibutuhkan oleh negara-negara baru dan akan lahir ini. Umumnya negara-negara yang tergolong lemah ini menghadapi dilema antara kebutuhan

<sup>39</sup> Jaafar, *op. cit.*, Hal.30.

<sup>40</sup> Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI. *Studi Perebutan Pengaruh Super Power di Samudera Hindia dan Dampaknya Terhadap ZOPFAN*. Jakarta: LIPI, 1983. hal.1.

<sup>41</sup> *Ibid.*

untuk melakukan konsolidasi dan pembangunan, dengan keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh luar sebagai perwujudan dari arti kemerdekaan itu sendiri.<sup>42</sup> Dalam keadaan demikian, pilihan pertamalah yang lebih mendesak untuk diterima, sehingga tidak dapat tidak pengaruh luar yang ingin dihindari itu sulit untuk ditolak.

Masalah tersebut dialami hampir seluruh negara-negara sedang berkembang, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan yang strategis. Oleh karena itu, sejak dari tahun 1947, Asia Tenggara sedang berada dalam arena Perang Dingin tersebut. Di Tanah Melayu juga tidak menutup kemungkinan terkena imbas dari penyebaran ideologi-ideologi tersebut. Karena Tanah Melayu masih berada di bawah jajahan Inggris yang merupakan negara blok Barat, maka paham komunis dari blok Timur di Tanah Melayu dapat disekat dan diminimalisasi ketika itu. Namun, pada kenyataannya paham komunis tersebut begitu menyebar di negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Karena negara-negara sekawasan tersebut dekat secara geografis dengan Tanah Melayu, maka melalui kebijakan politik luar negeri ini Tanah Melayu dapat mencegah paham komunis menyebar di negara ini yang memang ingin dihindarinya.

## **II.2. Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1957—1968**

Setelah Malaysia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957, Tunku menjabat sebagai perdana menteri pertama, sekaligus sebagai menteri luar negeri Malaysia. Tunku mendominasi sepenuhnya dalam merencanakan dan membentuk kebijakan politik luar negeri dimulai dari Tunku menjabatnya pada tahun 1957. Kebijakan politik luar negeri yang dijalani Tunku merupakan manifestasi dari kepribadian yang Tunku miliki.<sup>43</sup> Berlatarkan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.2.

<sup>43</sup> Tunku Abdul Rahman lahir di Alor Star, Kedah pada tanggal 8 Februari 1903. Tunku yang merupakan anak ketujuh Sultan Kedah yaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah, muncul sebagai seorang elit bangsawan yang terbiasa dengan kehidupan serba mewah. Hal ini menjadi salah satu dari beberapa faktor yang melatar belakangi kepribadian Tunku sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang anak bangsawan Melayu yang menjalani kehidupan masa kecilnya dengan penuh kemewahan, menjadikan Tunku sebagai seorang yang menyukai kehidupan yang serba

kepribadian sebagai seorang bangsawan dengan nilai-nilai Barat yang telah mengakar pada dirinya, Tunku telah membuat konsep kebijakan politik luar negerinya sendiri.<sup>44</sup> Sikap yang pro-Barat dan anti-komunis adalah sendi utama di dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan politik luar negeri Malaysia.

Sejak 1957 hingga berakhirnya masa pemerintahan Tunku, banyak kebijakan luar negeri Malaysia yang menonjolkan sikap hubungan yang begitu erat dengan negara-negara Barat. Pertama, hal ini dapat dilihat dari keputusan Tunku untuk menjadikan Malaysia sebagai negara anggota *Commonwealth* (Persemakmuran). Menurutny, *Commonwealth* sangat sesuai bagi negara-negara pasca merdeka.<sup>45</sup> Sejak tahun 1957 itulah kebanyakan implementasi kebijakan luar negeri Malaysia lebih memihak kepada Inggris dan *Commonwealth*.

Hal tersebut dipertegas dari aspek pertahanan Malaysia. Malaysia mengadakan suatu perjanjian pertahanan dengan Inggris. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama AMDA (*Anglo Malaysian Defence Agreement*). AMDA adalah perjanjian pertahanan dan bantuan ketentaraan dari Barat. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1957, sebelum Malaysia mencapai kemerdekaannya, antara Malaysia dan Inggris.<sup>46</sup> Melalui perjanjian tersebut, Inggris bertanggung jawab melindungi Malaysia dari segala ancaman negara-negara lain, serta Inggris berjanji melatih dan mengirim pasukan tentaranya di Malaysia.

Alasan Tunku mendatangi Perjanjian Pertahanan AMDA semasa pemerintahannya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Malaysia menghadapi masalah dalam soal sistem pertahanan dan keamanan yang lemah dan tidak kukuh. Ketika itu Malaysia

---

mudah dan sederhana. Peraturan istana menjadikannya sebagai seorang yang bangga dengan gaya hidupnya. Jaafar, *op. cit.*, hal.24.

<sup>44</sup> Pendidikan Inggris dan kehidupan bertahun-tahun di Inggris, kemewahan sebagai seorang anak raja Melayu dan seorang Muslim yang modern telah menjadikan Tunku sebagai seorang yang mencintai dan menyukai gaya hidup bangsawan Inggris. Hal ini berkaitan dengan tingkat sosialisasi Tunku dalam pergaulannya dengan masyarakat kota London sewaktu beliau masih bersekolah di University of Cambridge, dan proses sosialisasi yang dijalannya secara tidak langsung telah memberi suatu penyampaian nilai-nilai kehidupan bermasyarakat kota London kepada Tunku yang telah membentuk pribadinya sama dengan masyarakat tersebut. *Ibid.*, hal.26.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal.30.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal.51.

dikatakan hanya mempunyai satu pasukan Regimen Askar Melayu Diraja dan tidak mempunyai kekuatan militer udara maupun laut.<sup>47</sup> Terlebih lagi saat itu Malaysia tidak bisa menolak pengaruh dari Perang Dingin yang memang sedang dialami oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini adalah masalah ancaman dari dalam dan luar negeri yaitu komunis yang harus dihadapi oleh Malaysia. Oleh karena itu, Tunku berpendapat hal tersebut wajar bagi Malaysia untuk membuat satu perjanjian pertahanan dengan pihak Inggris untuk menjamin kestabilan negara Malaysia.

Tunku muncul sebagai pengikut negara-negara antikomunis dan menolak menjalin hubungan dengan negara yang menganut paham komunis. Paham antikomunis Tunku tercermin melalui hubungan Malaysia dengan Cina. Tunku tidak ingin mengadakan hubungan diplomatik apapun dengan negara komunis. Hal tersebut selain karena membenci paham tersebut, Tunku juga tidak ingin keselamatan Malaysia menjadi taruhannya dalam hubungan diplomatik tersebut. Hal ini diperjelaskan dengan pernyataan Tunku sebagai berikut:

“di mana terdapat konflik antara dua ideologi Barat dan Timur, maka dengan terus terang saya memihak kepada ideologi Barat ataupun paham demokrasi Barat.”<sup>48</sup>

Tunku tidak sama sekali bertoleransi dengan paham komunis sekaligus negara-negara yang menganutnya selama Tunku menjalani pemerintahan. Kesulitan memimpin negara yang dihadapinya karena ancaman komunis sehingga akan terjadi suatu keadaan kacau yang akhirnya menjadi titik tolak tersingkirnya Tunku dari pemerintahan negara, menjadikan Tunku membenci komunis. Hal ini diperjelas dengan pernyataannya sebagai berikut:

“saya bukan anti-komunis secara membabi buta. Saya hanya menentang negara komunis yang coba melalui kegiatan subversif dan cara-cara yang militan, untuk mengeksplot ideologi mereka ke negara kita. Dengan cara inilah saya anti-komunis.”<sup>49</sup>

Kebencian terhadap paham komunis semakin bertambah dengan gerakan komunis yang diwakili oleh PKM (Partai Komunis Malaya) yang berusaha

<sup>47</sup> Saravanamuttu, *op. cit.*, hal.21.

<sup>48</sup> Jaafar, *op. cit.*, hal.30.

<sup>49</sup> Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003. Hal.17.



menggulingkan pemerintahan Inggris di Malaysia secara kekerasan. Malah PKM sendiri mengungkapkan ketidakinginannya mendukung kerajaan Malaysia pimpinan Tunku melalui sistem demokrasi. Tunku beranggapan tanpa bantuan dan dukungan dari Cina, PKM tidak mungkin mampu untuk meneruskan perjuangan bersenjata menentang kerajaan.<sup>50</sup>

Sikap Malaysia yang antikomunis juga dapat dilihat dari keputusannya yang tidak ingin mengakui Cina dan mendukung kebijakan “dua Cina” di PBB. Malaysia tidak mendukung Republik Rakyat Cina sebagai perwakilan warga negara Cina di PBB.<sup>51</sup> Keputusannya tersebut dapat dipahami karena ketika itu Malaysia masih menentang dukungan yang diberikan oleh negara Cina terhadap gerakan komunis di Malaysia. Sebaliknya, Malaysia mengadakan hubungan baik dengan Taiwan. Malaysia mengkritik tindakan Cina di Tibet pada tahun 1959 dalam krisis Sino-India. Malah Tunku melancarkan “Tabung Selamatkan Demokrasi” sebagai usaha untuk mengumpulkan bantuan keuangan yang sukses mengumpulkan US\$ 1 juta untuk membantu India dalam mempertahankan diri dari tindakan agresi Cina.<sup>52</sup>

Di samping itu, Tunku juga menolak untuk bersikap netral dan ikut pada perjanjian-perjanjian negara netral karena menurutnya jika Malaysia ikut serta dalam perjanjian netral maka akan mempercepat Malaysia terjerumus dalam arena peperangan. Hal ini dapat dilihat dari sikap Malaysia yang tidak netral dalam persoalan Perang Dingin antara pihak Barat dan Timur. Pada tahun 1958, Tunku pernah menyampaikan suatu pernyataan hal tersebut di Parlemen:

“There is no question whatsoever of our adopting a neutral-policy while Malaya is at war with Communist. Only when we are certain that people here have become truly Malayan-minded and have set their minds on making Malaya their only home can the government declare our policy of neutrality. So long as this fight continues, I consider that we would be breaking faith with the people if this government were to enter into any form of diplomatic relationship with the communist countries ... let tell you that there are no much things as local communists. Communism is an international organization which aims for world domination, not by aggression if they can avoid it, but by the use of tactics and

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.18.

<sup>51</sup> Jaafar, *op. cit.*, hal.32.

<sup>52</sup> Saravanamuttu, *op. cit.*, hal.27.

methods among the sons of the country to overthrow democracy and to set up in its place a government after the pattern of all communist countries.”<sup>53</sup>

Mengenai permasalahan pergolakan di IndoCina, Malaysia memberi dukungannya kepada Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis di Vietnam Utara dan mendukung rezim antikomunis di Vietnam Selatan. Ketika itu Vietnam Selatan sedang berperang dengan Vietcong, sebuah rejim komunis di negara tersebut yang mendapat dukungan dari Vietnam Utara. Tunku pernah mengadakan kunjungan resminya yang pertama ke Vietnam Selatan pada tahun 1958. Dalam kunjungannya tersebut mengungkapkan kecaman keras terhadap paham komunis dan memberi jaminan persahabatan dengan Presiden Ngo Dinh Diem. Tunku juga mengundang Presiden Vietnam Selatan tersebut mengunjungi Malaysia pada tahun 1960.<sup>54</sup>

Walaupun Malaysia menjalankan kebijakan pro-Barat tetapi Tunku tidak mendukung Inggris dalam menjalankan paham kolonialisme dan imperialisme. Untuk itu, Tunku dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya juga menyertai paham antikolonialis dan imperialis. Hal ini karena Malaysia pernah merasakan bagaimana sulitnya Malaysia selama beberapa abad dijajah oleh bangsa asing. Tunku juga mendukung negara-negara yang menentang negara kolonial dan imperial.<sup>55</sup>

Kebijakan politik luar negeri Malaysia sedikit mengalami perubahan selepas tahun 1961, ketika Malaysia mulai menghadapi masalah, seperti konflik dan konfrontasi, dengan negara-negara tetangganya. Sebelum tahun tersebut, negara ini belum bernama Malaysia, melainkan Tanah Melayu. Perubahan nama Malaysia terjadi ketika diadakan suatu persidangan di Singapura pada tanggal 27 Mei 1961.<sup>56</sup> Saat itu Tunku mengumumkan konsep sebuah negara persekutuan

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.26.

<sup>54</sup> Zainal Abidin Abdul Wahid. *Malaysia: Warisan dan Perkembangan*. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1990. hal.413—414.

<sup>55</sup> Kebijakan antikolonial dan imperial juga terlihat dari sikap Tunku yang mengecam kebijakan Perancis di Algeria, mengkritik pendaratan Amerika Serikat di Lubnan pada tahun 1958, dan menentang pengiriman tentara ke Jordan oleh Inggris. Tunku secara konsisten mengecam penempatan Israel di Palestina dan kegagalan Israel mematuhi prinsip penarikan tentaranya dan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948. Pada periode yang sama, Malaysia mendukung segala hak yang tidak dapat diperoleh rakyat Palestina, termasuk hak kemerdekaan dan sebagai negara yang berdaulat. Jaafar, *op. cit.*, hal.32.

<sup>56</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.570.

yang lebih besar dimana berisikan Tanah Melayu, beserta negara-negara jajahan Inggris, yaitu Singapura, Sabah (Kalimantan Utara), Serawak, dan Brunei. Negara persekutuan ini akan dibentuk dengan nama Federasi Malaysia.<sup>57</sup> Singapura dan sebageian negara Kalimantan tersebut menyetujui karena pembentukan federasi ini akan menjadi jalan mempercepat datangnya kemerdekaan bagi mereka dari Inggris. Namun, berbeda dengan sikap yang diambil oleh Indonesia dan Filipina, yang merupakan negara tetangga terdekat dari negara ini, terhadap pembentukan federasi ini.

Pada bulan Juni 1962, Filipina membuat suatu tuntutan bahwa Sabah yang merupakan salah satu wilayah di dalam pembentukan Federasi Malaysia ini adalah milik mereka. Filipina beranggapan mereka mempunyai hak kedaulatan atas wilayah Sabah berdasarkan beberapa faktor, diantaranya ketika pada tahun 1878, menurutnya Sultan Sulu dari Filipina ini tidak menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris.<sup>58</sup> Hal tersebut berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur dengan Manila.<sup>59</sup>

Keadaan diperburuk dengan terjadinya suatu pemberontakan di Brunei oleh Partai Rakyat yang dipimpin oleh A.M. Azahari yang menginginkan pemerintahan sendiri dan tidak bergabung dengan Malaysia. Azahari beranggapan bahwa pembentukan federasi ini merupakan proyek Inggris yang ingin menguatkan kepentingan mereka di Asia Tenggara.<sup>60</sup> Namun, pada akhirnya keputusan akhir bergabung dengan Malaysia ada di tangan Sultan Brunei.

Sama halnya dengan sikap Indonesia terhadap pembentukan federasi ini. Awalnya, Indonesia menyetujui rancangan pembentukan Malaysia tersebut. Namun, pada bulan Januari 1963 Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia mengumumkan secara resmi menentang rancangan pembentukan Malaysia tersebut. Perubahan sikap Indonesia ini dikatakan karena didorong oleh PKI

<sup>57</sup> "Mighty Malaysia." *The Straits Times*, 29 Mei 1961.

<sup>58</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.571.

<sup>59</sup> Hubungan kedua negara kembali pulih setelah Tunku meminta Tun Abdul Razak untuk mengadakan pertemuan dengan Romulo di Rangoon pada tanggal 16 Desember 1969. Dalam pertemuan tersebut sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik tanpa syarat demi kepentingan kerjasama regional. Jaafar, *op. cit.*, hal.39.

<sup>60</sup> Shaffie, *op. cit.*

(Partai Komunis Indonesia) yang menyimpulkan bahwa rancangan ini sebagai sebuah bentuk penjajahan baru (neo-kolonialis) dari pihak Barat.<sup>61</sup>

Presiden Indonesia, Soekarno menyalahkan sikap Tunku yang tidak mau berunding dahulu dengannya mengenai pembentukan federasi ini. Karena menurutnya, pembentukan ini akan mengubah status-quo Asia Tenggara yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan negara-negara lainnya di kawasan ini. Lain halnya dengan Tunku yang menganggap kedudukannya lebih tinggi daripada Soekarno. Sebagai individu yang lahir dari keluarga bangsawan yang memiliki egonya sendiri, Tunku memutuskan tidak akan tunduk dengan kehendak Soekarno tersebut. Menurut Tunku, dalam membuat rancangan sebuah negara yang dinamakan Malaysia, Tunku tidak perlu memperoleh persetujuan dengan Soekarno.

Tanpa memperdulikan sikap dari negara-negara tetangganya tersebut, Tunku tetap melancarkan keinginannya tersebut dan mengadakan perundingan dengan Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia. Akhirnya pada tanggal 16 September 1963 pembentukan Malaysia diresmikan, walaupun pada akhirnya Brunei mengundurkan diri di saat-saat terakhir.<sup>62</sup> Peristiwa tersebut membuat Soekarno semakin marah. Pada tanggal 3 September 1964, Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan mengadakan kebijakan konfrontasi. Perang pun terjadi antara Malaysia dan Indonesia yang melibatkan tentara *Commonwealth* dan Tentara Kalimantan Utara.<sup>63</sup>

Di lain pihak, sikap pengunduran diri Singapura dari Federasi Malaysia juga mewarnai proses pembentukan federasi ini. Sikap Singapura tersebut berawal dari perbedaan kepribadian antara Tunku dengan Lee Kuan Yew. Tunku yang merupakan bangsawan penuh sopan santun lebih menitikberatkan orang Melayu. Sedangkan, Lee Kuan Yew yang seorang intelek Cina bersifat keras dan kasar lebih menitik beratkan orang Cina. Tunku lebih banyak tersinggung oleh sikap Lee Kuan Yew yang terlalu pedas dan cenderung menghina di dalam proses

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal.572.

tawar-menawar mengenai ekonomi negara.<sup>64</sup> Rasa tersinggungunya makin menjadi-jadi ketika Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. Sikap Singapura hanya berdiam diri karena lebih mementingkan profit ekonomi dengan Indonesia. Barulah Singapura mulai bereaksi untuk menentang konfrontasi ini ketika Indonesia mengadakan embargo perdagangan ke Singapura. Pada bulan Agustus 1965 pun Singapura resmi mengundurkan diri dari Malaysia.<sup>65</sup>

Di samping untuk pertahanan dan keselamatan negara, Konflik dan konfrontasi yang terjadi antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina serta pengunduran diri Singapura telah menyebabkan negara-negara tersebut bersaing untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lainnya dalam hal diplomatik untuk memperkuat kedudukan masing-masing. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menyadarkan Tunku bahwa Malaysia tidak harus terlalu memberatkan hubungannya dengan negara-negara Barat saja.

Kecondongan Malaysia terhadap Barat telah menyebabkan Malaysia seolah-olah dikucilkan di kalangan negara-negara berkembang Afro-Asia.<sup>66</sup> Hal tersebut dikarenakan Malaysia masih belum dikenali oleh negara-negara dunia ketiga tersebut. Jika negara-negara lainnya mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dalam persidangan-persidangan di tingkat PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dan di tingkat Afro-Asia, lain halnya dengan Malaysia yang tidak memperolehnya. Belajar dari kesalahannya tersebut, Malaysia mulai meningkatkan aktivitasnya dalam hal hubungan antarnegara. Oleh sebab itu, secara keseluruhan mulai dari tahun 1964 ini, terjadi suatu masa peralihan kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dijalani Tunku yang lebih terbuka.<sup>67</sup>

Tujuan diplomatik Malaysia yang ingin turut aktif dalam peringkat antarnegara ini adalah untuk memperoleh bantuan dan dukungan negara-negara lain dalam hal konfliknya dengan Indonesia. Tunku mengirimkan Tun Abdul Razak yang merupakan Wakil Perdana Menteri untuk menghadiri persidangan-

---

<sup>64</sup> Abdullah Ahmad. *Tunku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia 1963—1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1987. hal.107—109.

<sup>65</sup> Jaafar, *op. cit.*, hal.40.

<sup>66</sup> Shaffie, *op. cit.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal.574.

persidangan antarnegara, khususnya tingkat Afro-Asia. Usahnya tersebut tidak sia-sia, di PBB Malaysia meraih kemenangan moral melalui Resolusi Norwegia yang menyesali tindakan Indonesia di Malaysia. Pada tanggal 2 Juni 1966 melalui perundingan damai di Bangkok, hubungan bilateral kedua negara itupun berjalan kembali setelah tiga tahun konfrontasi berlangsung yang ditandai dengan penggulingan Soekarno dan kemunculan Orde Baru oleh Soeharto di Indonesia.<sup>68</sup> Malaysia juga tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet yang terjalin pada bulan Maret 1967, dan juga dengan Singapura pada bulan Juni 1968.<sup>69</sup>

ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) menjadi manifestasi perubahan sikap kerjasama antarnegara Tunku. ASEAN diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang merupakan aspirasi dari kelima Menteri Luar Negeri negara-negara di Asia Tenggara.<sup>70</sup> ASEAN merupakan wadah bagi para negara-negara anggotanya untuk berperan aktif dalam hal kebijakan politik luar negeri masing-masing negara. Tak terkecuali bagi Malaysia, keanggotaan dalam ASEAN menjadi simbol penerimaan Indonesia dan Filipina yang sebelumnya menentang pembentukan Malaysia. Secara tidak langsung negara-negara tersebut telah memberi legitimasi terhadap kebebasan dan kedaulatan negara Malaysia.

Tun Abdul Razak yang merupakan Wakil Perdana Menteri adalah satu-satunya orang dalam kabinet pemerintahan Tunku yang secara langsung aktif melaksanakan persoalan hubungan diplomatik Malaysia.<sup>71</sup> Tun Razak merasa

<sup>68</sup> Jaafar, *op. cit.*, hal.44.

<sup>69</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.572.

<sup>70</sup> Perwakilan tersebut antara lain Indonesia oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dan Pembangunan, Filipina oleh Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri, Singapura oleh S.Rajaratman sebagai Menteri Luar Negeri, dan Thailand oleh Thanat Khoman sebagai Menteri Luar Negeri. Sekretariat Nasional ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, 1992. hal.197.

<sup>71</sup> Tun Abdul Razak lahir pada tanggal 11 Maret 1922 di Pulau Keladi, Pahang. Razak merupakan anak pertama dari Dato' Hussein Bin Mohd. Taib yang merupakan salah satu dari empat orang besar Kerajaan Pahang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Istana Pahang. Razak dibesarkan dalam suasana kehidupan kampung dan penduduk sekitarnya yang berada dalam kemiskinan serta serba kekurangan. Walaupun lahir dari kalangan keluarga bangsawan, tetapi kehidupan masa kecilnya jauh dari dunia kebangsawanan. Lingkungan yang serba susah menjadikan Razak seorang yang sederhana, penuh pengertian terhadap penderitaan dan

kebijakan politik luar negeri yang Tunku terapkan tidak seimbang dimana terlalu memberatkan ke Barat, sehingga ia harus bertindak menyelesaikan masalah-masalah politik Malaysia dengan negara lainnya yang sudah terlalu banyak itu. Tun Razak menyadari kelemahan kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dijalankan oleh Tunku, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam memutuskan kebijakan politik luar negeri karena hanya Tunku yang memiliki kuasa penuh dalam memutuskan segala keputusan negara.

Tun Razak yang memiliki sikap sebagai seorang *innovator* yang bertindak sebagai pembantu, pemikir dan penasihat ini mencoba membujuk Tunku untuk mengubah kebijakan politik luar negeri Malaysia. Orang lain yang turut memikirkan ketidakseimbangan kebijakan politik luar negeri Tunku tersebut adalah Tun Dr. Ismail yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri.<sup>72</sup> Kedua orang ini merupakan teman dekat Tunku selama di kabinet. Mereka berusaha meminta Tunku untuk memperbaharui kebijakan politik luar negeri Malaysia yang lebih terbuka dan seimbang. Keberpihakannya yang pro-Barat ini lama-lama tidak menguntungkan bagi Malaysia.

Secara keseluruhan, kebijakan politik luar negeri Malaysia mengalami perubahan setelah tahun 1968. Malaysia memperlihatkan perubahan sikapnya yang semula berpendirian antikomunis dan pro-Barat, beralih kepada hidup bersama dan damai (*peaceful co-existence*) yang pada akhirnya menuju pada konsep netralitas.<sup>73</sup> Hal ini dapat dilihat dari hubungan yang baik antara Malaysia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, negara-negara Afro-Asia, dan dengan Uni Sovyet serta negara-negara komunis lainnya.

---

kekurangan akan kebutuhan masyarakat Tanah Melayu pada masa penjajahan Inggris. Walaupun Razak mendapat bantuan dana dari Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris, tetapi Razak tidak menjadikan barat sebagai arah dalam menjalani kebijakan politik luar negerinya kemudian ketika Razak menjabat sebagai Perdana Menteri. Hassan, *op. cit.*, Hal.21.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.37.

<sup>73</sup> Shaffie, *op. cit.*, hal.574.

### BAB III

## KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA PADA TAHUN 1968—1971

### III.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971

Setelah tahun 1968, kebijakan politik luar negeri Malaysia mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang terjadi baik dari dalam dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri atau internal tersebut adalah banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Malaysia yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Di samping itu, faktor eksternal yaitu situasi dan kondisi politik dunia yang sedang mengalami perubahan turut mewarnai perubahan Malaysia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri pada tahun 1968—1971. Yang menjadi ciri utama dari perubahan tersebut adalah perencanaan, pengenalan dan penggunaan konsep netralitas dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia pada masa ini.

#### III.1.1. Faktor Internal

Peristiwa pertama yang terjadi di dalam negeri yang mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia adalah pada saat pembentukan Federasi Malaysia. Pada saat itu yaitu setelah tahun 1961, Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia, serta konflik bersama Filipina dan Singapura. Konfrontasi dan konflik tersebut telah mengingatkan Malaysia bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara ini memerlukan suatu kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup hubungan regional yang lebih baik dan mengutamakan kerjasama dunia yang lebih terbuka.<sup>74</sup> Oleh sebab itu, sejak peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, Malaysia mengalami suatu masa peralihan dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, meskipun belum benar-benar berubah.

---

<sup>74</sup> Jayaratman Saravanamuttu. *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy 1957—1977*. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 1983. hal.131.



Perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia baru terjadi setelah tahun 1968. Pada tanggal 13 Mei 1969 terjadi suatu peristiwa penting yang telah merubah corak pemerintahan Malaysia. Peristiwa ini merupakan kerusuhan antaretnis yang terjadi pada saat Pemilihan Umum 1969 yang telah menyebabkan jurang perbedaan antaretnis di Malaysia.<sup>75</sup> Karena keadaan semakin memburuk, Tunku dengan segera membubarkan parlemen. Peristiwa tersebut telah membawa pada krisis kepemimpinan dalam partai koalisi yang berkuasa, khususnya di dalam UMNO.<sup>76</sup>

Pada akhirnya Tunku membuat sebuah pemerintahan sementara yang dinamakan MAGERAN (Majelis Gerakan Negara).<sup>77</sup> Dampak dari perubahan kepada pemerintahan sementara tersebut adalah berubahnya kepemimpinan negara Malaysia. Tun Abdul Razak sebagai orang kepercayaan Tunku dipilih sebagai ketua majelis tersebut. Jabatan ini mempunyai hak eksekutif yang mutlak untuk memimpin negara di bawah Undang-undang Darurat yang telah diserahkan kepada Tun Razak.<sup>78</sup> Tun Razak bertugas memulihkan sistem pemerintahan demokrasi yang telah terkubur pada waktu itu.

Peristiwa kerusuhan 13 Mei yang berbuah pada pergantian kepemimpinan ini, juga telah membawa Malaysia pada suatu perubahan kebijakan politik luar negerinya. Hal ini berdasarkan pada cara memimpin Tunku dan Tun Razak yang berbeda. Tunku selama menjabat sebagai perdana menteri telah melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang pro-Barat dan anti-komunis. Lain hal dengan Tun Razak yang sangat bercermin dari kesalahan dan ketidakseimbangan Malaysia dalam melaksanakan kebijakannya selama pemerintahan Tunku. Tun Razak lebih memainkan peran Malaysia dalam hal diplomasi. Menurutnya, kepentingan negara dapat dicapai melalui metode diplomasi yang aktif dimana

---

<sup>75</sup> Chamil Wariya, dan B.A.Hamzah. *ZOPFAN: Mitos atau Realiti*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1992. Hal.22.

<sup>76</sup> Saravanamuttu, *op. cit.*, hal.130.

<sup>77</sup> Wariya, *op.cit.*,

<sup>78</sup> Gordon P. Means. *Malaysian Politics: the Second Generation*. Singapore: Oxford university press, 1991. Hal.25.

hanya keadaan kawasan yang aman dan stabil yang akan dapat mewujudkan pembangunan dan kemajuan sosioekonomi suatu negara.<sup>79</sup>

### II.1.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia adalah pengurangan keterlibatan negara-negara Barat di Asia Tenggara. Hal tersebut bermula pada keputusan Inggris yang menarik tentaranya dari Terusan Suez pada tahun 1968 yang disebabkan oleh keadaan ekonomi Inggris yang tidak mampu lagi menjadi polisi dunia. Inggris telah merubah strateginya yang lebih mementingkan peranan mereka di Eropa.<sup>80</sup> Inggris juga menarik pasukannya di Malaysia dan Singapura. Keputusan penarikan tentara Inggris tersebut menyebabkan penghentian pula perjanjian pertahanan AMDA. Penghentian perjanjian ini pada akhirnya menghasilkan wujud kekosongan jaminan keselamatan dan pertahanan Malaysia.

Di samping Inggris membuat keputusan untuk menarik pasukannya di Asia Tenggara, Amerika Serikat juga membuat suatu keputusan untuk menarik diri dari keterlibatannya di Vietnam. Selama Perang Dingin berlangsung, negara-negara adidaya berusaha untuk ikut campur tangan dalam negeri Indocina, khususnya di Vietnam, sehingga terjadi perang yang disebut Perang Vietnam.<sup>81</sup> Negara-negara adidaya tersebut turut menyebarkan ideologi dan bantuan militernya di Vietnam, misalnya Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis (demokrasi) membantu Vietnam Selatan dan Uni Sovyet dengan ideologi komunis membantu Vietnam Utara. Namun, terjadi suatu perkembangan dari Perang

<sup>79</sup> Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003. Hal.12.

<sup>80</sup> Wariya, *op.cit.*, Hal.19.

<sup>81</sup> Perang Vietnam mengakibatkan pecahnya Negara menjadi 2 yaitu Vietnam Utara (komunis) dan Vietnam Selatan (Demokratis). Perpecahan berawal dari perseteruan Viet Minh dan Perancis yang ingin kembali menguasai Indocina. Perang dari tahun 1946-1954 ini berakhir dengan gencatan senjata, hasil konferensi di Jenewa tahun 1954. Dan ditetapkan titik garis 17 derajat sebagai demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara diperuntukkan bagi Viet Minh, dipimpin Ho Chi Minh. Vietnam Selatan diperuntukkan bagi Perancis, dipimpin PM Ngo Dinh Diem. Kesepakatan Jenewa tahun 1954 ini menghasilkan badan International Control Committee untuk melaksanakan pemilu untuk menyatukan 2 Vietnam. Namun, ditolak. Dalam pemerintahannya, Ngo Dinh Diem didukung AS. Kekuatan Viet Cong / Viet Minh semakin membesar dengan berdirinya organisasi National Front For Liberation of Vietnam sebagai penerus Viet Cong. Kebijakan Presiden AS John F. Kenedy mengirim bantuan ke Vietnam untuk mencegah agresi Viet Cong. Hassan, *op. cit.*, Hal.83.

Vietnam tersebut yaitu oleh ofensif Tet yang dilancarkan oleh Vietnam Utara dan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan pada akhir bulan Januari dan Februari 1968.<sup>82</sup> Perkembangan tersebut menandakan perubahan pada sikap Amerika Serikat mengenai keterlibatannya dalam perang tersebut. Akhirnya pada bulan Juli 1968 diumumkan oleh Presiden Nixon tentang Doktrin Guam. Dalam doktrin tersebut dinyatakan bahwa di masa-masa akan datang Amerika Serikat akan lebih banyak mengandalkan kepada pasukan setempat, yaitu Vietnam, untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri.<sup>83</sup>

Penarikan kedua negara Barat tersebut telah membuat rasa cemas bagi Malaysia jika paham komunis yang dibawa oleh Uni Sovyet dan RRC dapat menyebar luas di negara ini. Kekhawatiran Malaysia menjadi-jadi setelah menyebarnya perang di Vietnam tersebut ke negara-negara tetangganya seperti Kamboja dan Laos setelah Amerika Serikat menarik diri dari Vietnam.<sup>84</sup> Kekhawatiran Malaysia itu dikarenakan negara-negara tersebut merupakan negara tetangga Malaysia yang akan berpengaruh kepada Malaysia jika dibiarkan begitu saja. Jadi, apabila negara-negara tetangganya tersebut bergejolak, tidak menutup kemungkinan Malaysia juga terkena dampaknya. Apalagi hal tersebut didalangi oleh ideologi komunis yang terkenal dengan keradikalannya.

Perubahan kepada sistem multipolar antarnegara juga merupakan faktor eksternal lainnya dalam perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia. Misalnya, kemunculan RRC di politik dunia. Setelah berakhirnya Revolusi Budaya di tahun 1969 sejalan dengan meningkatnya konflik Sino-Soviet, RRC bercermin pada perubahan sistem politik internasional ketika itu dari sistem

---

<sup>82</sup> Serangan Tet ini menghasilkan serangan operasional yang menghancurkan bagi pemerintah Vietnam, dan melumpuhkan Viet Cong. Namun, serangan Tet ini dianggap sebagai titik balik dari perang di Vietnam; di sini pihak Vietnam Utara memperoleh kemenangan psikologis dan propaganda besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya dukungan rakyat Amerika Serikat terhadap Perang Vietnam dan akhirnya pasukan-pasukan Amerika Serikat pun ditarik mundur. Rajendran. *ASEAN's Foreign Relations: The Shift to Collective Action*. Kuala Lumpur: arenabuku Sdn. Bhd., 1985. Hal.23.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal.86.

<sup>84</sup> Heiner Hanggi. *ASEAN and the ZOPFAN Concept*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 1991, Hal. 13.

bipolar menjadi multipolar. Hal ini ditandai dengan diterimanya RRC sebagai anggota PBB pada tahun 1971.<sup>85</sup>

Selain kemunculan RRC tersebut, Uni Sovyet tidak mau kalah untuk berperan aktif kembali di dalam kawasan Asia Tenggara. Uni Sovyet memperluas pengaruhnya di kawasan ini, yaitu melalui pernyataan sekretaris umum Uni Sovyet Brezhnev dalam sebuah proposal untuk mengadakan sistem kolektif keamanan Asia pada bulan Juni 1969. Di samping itu, Jepang juga turut ingin menjadi kekuatan ekonomi dominan dunia. Kehadirannya dalam bentuk ekonomi yang makin meningkat, semakin terasa pula di seluruh kawasan Asia Pasifik pada umumnya, dan Asia Tenggara pada khususnya.<sup>86</sup>

Perubahan-perubahan situasi dan kondisi Asia Tenggara tersebut, telah membawa pada perubahan pola atau bentuk hubungan negara-negara Besar. Struktur Bipolar hubungan antar negara-negara adidaya yang pernah mewarnai kawasan Asia Tenggara pada tahun 1950, kini telah berubah menjadi kompleks dengan empat kehadiran negara-negara Besar, yaitu Uni Sovyet, Cina, Amerika Serikat, dan Jepang.<sup>87</sup> Selain itu, perubahan tersebut juga diwarnai oleh kemunculan era peradaan ketegangan (*detente*) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Hal-hal tersebut membuat Malaysia berfikir bahwa perubahan tersebut menjadi suatu kesempatan dan juga tantangan untuk merubah kebijakan politik luar negerinya, serta membentuk pola baru hubungan internasional melalui kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Pola baru tersebut akan memberikan peranan lebih besar kepada setiap negara di kawasan ini guna menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan internasional tersebut.

### III.2. Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971

Pada tanggal 23 Januari 1968, Tun Dr. Ismail Al-Haj, mantan Menteri Dalam Negeri Malaysia yang kemudian berperan sebagai seorang anggota parlemen, memperkenalkan sebuah proposal mengenai konsep netralitas di

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> M. Sabir. *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Hal.115.

<sup>87</sup> Rajendran. *Op. cit.*, hal.25.

Parlemen Malaysia.<sup>88</sup> Proposal tersebut dinamai sebagai “Rancangan Keamanan Ismail” (*Ismail Peace Plan*). Pengajuan proposal tersebut merupakan suatu bentuk kekecewaan Tun Ismail terhadap Tunku dalam hal menjalani kebijakan politik luar negerinya yang lebih memihak kepada negara Barat. Menurutnya, dengan tidak memihaknya pada salah satu pihak, diharapkan Malaysia menjadi negara yang aman dan damai dari pengaruh luar, khususnya dalam masa Perang Dingin ini.

Perkenalan proposal ini dilalui dengan perdebatan tentang masa depan keamanan Malaysia yang baru ditinggal oleh Inggris yang memutuskan untuk menarik pasukannya di Malaysia. Ketakutan akan kefakuman militer Malaysia dan kebenaran rencana keamanan pengganti yang tidak mungkin terjadi secara efektif, Tun Ismail berpendapat bahwa inilah saatnya untuk Malaysia melaksanakan konsep netralitas dan dapat diterapkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara jika menginginkan terciptanya suatu keadaan yang aman dan damai. Konsep netralitas ini menjadi suatu jalan atau alternatif untuk menjamin keamanan negara Malaysia dan Asia Tenggara. Untuk lebih efektif lagi, hal tersebut harus dijamin oleh negara-negara adidaya yang terlibat dalam Perang Dingin di Asia Tenggara, termasuk Cina.<sup>89</sup>

Namun, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tunku Abdul Rahman nampak berlawanan dengan proposal netralitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan dinginnya sikap pemerintahan Tunku terhadap proposal mengenai netralitas ini. Tunku berkeyakinan bahwa negara dan kawasan ini belum siap untuk menggunakan konsep netralitas, meskipun konsep ini menarik. Di samping dinginnya sikap Tunku tersebut, tidak lantas membuat Tunku langsung membuang ide dari proposal netralitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua pernyataannya sekitar tahun 1968. Pertama, pada saat menjawab pertanyaan di Parlemen pada akhir bulan Januari 1968, Tunku berpendapat:

“This [the neutralization proposal] is something which is worth giving thought to, but nevertheless it is something which is difficult of achieving without working

<sup>88</sup> Tindakan Tun Ismail tersebut dilakukan setelah ia keluar dari kabinet karena tidak setuju dengan beberapa konsep yang dijalani oleh Tunku Abdul Rahman pada masa pemerintahannya, dan ia hanya berperan sebagai anggota parlemen setelahnya. Wariya, *op.cit*.

<sup>89</sup> Ghazali Shafie. “The Neutralisation of Southeast Asia”. *Pacific Community*. Vol. 3, No.1 (Okt., 1971): 115.

hard and conscientiously for it. So while we bear his suggestion in mind, we will try and put it across to the countries, either in this region, or outside this region in the hope that such a proposal would find acceptance by them. We will begin to sound other nations as and when we are able to do so.”<sup>90</sup>

Lalu kedua, ketika ia ditanya dalam sebuah wawancara pada tanggal 29 Januari 1968 di Malaysia tentang masa depan rencana keamanan negara untuk menjaga kestabilan keamanan setelah terjadi peristiwa penarikan tentara Inggris, Tunku menjawab:

“One of the plans is to try and approach other countries for a non-aggression peace and for agreement to neutralize this zone against aggression, at the same time to get them to agree to a policy of coexistence. This will take time but an approach will certainly be made.”<sup>91</sup>

Dua pernyataan di atas jelas menjelaskan sikap Tunku yang tidak menolak langsung proposal netralitas yang diajukan oleh Tun Ismail tersebut, tetapi Tunku juga tidak menerimanya sebagai dasar pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Malaysia. Ia lebih memilih menjalin hubungan dekat mengenai keamanan negara dengan Inggris dan *Commonwealth*.<sup>92</sup> Sikap Tunku tersebut dapat dilihat dari pernyataannya ketika menghadiri suatu pertemuan tidak resmi dengan tema “Stabilitas dan Masa Depan Asia Tenggara” di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1968. Seperti dalam ucapannya berikut ini:

“however much money we spend on defence we can never be strong enough to protect ourselves, an aggressor very much stronger than we are and who has designs against us. So for us, the best plan is to make friends and in doing so we can expect to live in security and in peace.”<sup>93</sup>

Dalam pertemuannya tersebut, Tunku tidak secara terang-terangan menyinggung atau membicarakan konsep netral yang sedang hangat-hangatnya dibahas di dalam negeri Malaysia, tetapi ia menjelaskan tentang ketidakmampuan Asia Tenggara untuk melawan kehadiran ataupun kekuatan negara-negara besar di kawasan ini. Namun, pendirian Tunku tersebut tidak lama mengalami perubahan seiring berubah pula keadaan di dalam negeri. Malaysia mengalami perubahan kepemimpinan dari Tunku kepada Tun Abdul Razak, setelah terjadi peristiwa kerusuhan rasial 13 Mei 1969. Jika pada masa Pemerintahan Tunku gagasan

<sup>90</sup> Bilveer Singh. *ZOPFAN and The New Security Order in The Asia-Pacific Region*. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Bhd. 1992. Hal.27.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal.28.

<sup>92</sup> Jaafar, *op. cit.*, hal.30

<sup>93</sup> Singh, *op. cit.*, hal.29.

netralitas tersebut diabaikan, lain hal dengan Pemerintahan Tun Razak yang mencoba untuk menengahkan kembali gagasan netralitas tersebut.

Tun Razak rajin mengkampanyekan konsep netralitas Asia Tenggara dalam berbagai kesempatan. Ia menyiapkan berbagai hal untuk proses pengenalan dan proses memperoleh dukungan mengenai konsep netralitas ini. Misalnya, pada acara Sidang Ketiga Kementerian ASEAN pada tanggal 16 Desember 1969. Tun Razak berucap sebagai berikut:

“we in Malaysia have always believed strongly in regional cooperation and we see no other choice for newly developed countries of Southeast Asia but to shape our own destiny together and to prevent external intervention and interference.

Most of us have been dominated by colonial powers, either directly or indirectly, and even today we are not entirely free from the struggle for domination by outside powers.

Therefore, unless we are conscious of our responsibilities and ready to take decisive and collective actions to prevent the growth of inter-regional conflicts, our nations will continue to be manipulated against one another. The colonial powers have retreated from this region and the vacuum left by them must be filled by the growth of our own collective power and collective will to survive and prosper; otherwise, our future, individually, and jointly, will remain dangerously threatened.”<sup>94</sup>

Dalam persidangan tersebut, Tun Razak menjelaskan bahwa di dalam negeri Malaysia sedang hangat-hangatnya sebuah perbincangan mengenai kemampuan ASEAN agar dapat mengandalkan kerjasama regional. Malaysia menyatakan harapannya bahwa Asia Tenggara dapat bertahan hidup dan mengandalkan kemampuan sendiri dari dominasi negara-negara adidaya. Pada intinya, Tun Razak menjelaskan tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas regional melalui usaha saling bantu-membantu.

Kemudian, Malaysia mencoba kembali mengkampanyekan konsep tersebut ke forum yang lebih besar. Untuk pertama kalinya Pemerintahan Malaysia secara resmi mengenalkan langsung Proposal Netralitas ke depan para anggota Negara-negara Non-Blok, yaitu pada Sidang Persiapan Konferensi Non-Blok di Dar Es Salaam, Tanzania pada bulan April 1970. Pada persidangan tersebut, Tun Razak mengirim Tan Sri Ghazali Shafei, seorang Sekretaris Tetap

---

<sup>94</sup> Rajendran, *op. cit.*

Kementerian Luar Negeri, untuk mewakili Malaysia. Dalam persidangan tersebut, ia menyatakan:

“Adalah harapan Malaysia bahwa semua Negara Non-Blok dapat menerima (gagasan) netralitas tidak saja untuk wilayah Indocina tetapi juga untuk seluruh kawasan Asia Tenggara, yang dijamin oleh tiga kekuatan, RRC, Uni Sovyet, Amerika Serikat, terhadap semua bentuk campur tangan, ancaman dan tekanan luar.”<sup>95</sup>

Pernyataan dari Tan Sri Ghazali Shafei tersebut diulangi lagi oleh Tun Abdul Razak dalam Konferensi Non-Blok Ketiga di Lusaka, Zambia pada tanggal 9 September 1970. Ini merupakan untuk pertama kalinya Malaysia ikut serta dalam konferensi tingkat negara-negara Non-Blok.<sup>96</sup> Hal tersebut dilakukan untuk meminta dukungan terhadap konsep Malaysia tentang Netralitas, dimana pernyataan ini dilakukan tiga belas hari sebelum Tunku secara resmi mundur dari pemerintahan. Tun Razak menyatakan:

“It is my hope that in reaffirming the right of self-determination and non-interference in the Indochina area, the Non-Aligned Group would at the same time take positive stand in endorsing the neutralization of the area and possibly of the entire region of Southeast Asia, guaranteed by the three major powers, . . . I mention the need to extend the area of peace and neutralization to include all of Southeast Asia because it is obviously easier and wiser to strengthen the fabric of peace before it is ruptured rather than attempt to eliminate disorder and conflict once they have penetrated into the region.”<sup>97</sup>

Tun Razak menjelaskan bahwa dengan jaminan dari Negara-negara adidaya di Asia Tenggara secara tidak langsung akan dapat mengatasi masalah peperangan yang berlaku di Indocina. Tun Razak menekankan situasi di Vietnam ataupun di Negara-negara Indocina lainnya tidak boleh dianggap sebagai suatu masalah yang kecil dan peranan Negara-negara Non-Blok perlu untuk menegakkan kembali hak dan kemerdekaan Negara-negara tersebut.<sup>98</sup> Harapan Malaysia ingin melihat rakyat Kamboja, Vietnam, dan Laos diberikan kesempatan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa campur tangan dari Negara-negara

<sup>95</sup> Pernyataan tersebut disampaikan lima bulan sebelum Tunku mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Sabir, *op. cit.*, Hal.116.

<sup>96</sup> Malaysia tidak mengikutsertakan diri dalam dua Persidangan Pergerakan Negara-negara Non-Blok yang berlangsung sebelumnya karena ketika itu Malaysia sedang diasingkan oleh Negara-negara dalam organisasi tersebut akibat terjadinya Peristiwa Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Sidang Pertama pada tahun 1961 dan sidang kedua berlangsung pada tahun 1964 di Kaherah. Hassan, *op. cit.*, Hal.71.

<sup>97</sup> Singh, *op. cit.*, Hal.36.

<sup>98</sup> Rajendran, *op. cit.*, hal.24.



adidaya tersebut. Tindakan selanjutnya Malaysia menginginkan semua pangkalan dan pasukan asing ditarik keluar dari Negara-negara tersebut agar rakyat di Negara ini dapat menentukan nasib masa depan mereka sendiri.<sup>99</sup>

Dalam persidangan Negara-negara Non-Blok itu Tun Razak juga menyatakan pendirian Malaysia untuk mengakui kerajaan Lon-Nol sebagai sebuah kerajaan yang berkuasa penuh di Kamboja seperti yang telah diakui oleh PBB dan Negara-negara lainnya termasuk Uni Sovyet.<sup>100</sup> Perhatian Tun Razak terhadap pergolakan ini dikarenakan hal tersebut tersangkut dengan keselamatan dan pertahanan Malaysia dan kawasan lainnya. Jadi, jika pergolakan di Vietnam tersebut dapat diselesaikan maka faktor keselamatan Malaysia akan terjamin.

Usulan-usulan yang telah disarankan oleh Tun Razak mendapat perhatian dan dukungan oleh kalangan perwakilan Negara-negara dunia ketiga itu. Dalam usaha untuk mewujudkan netralitas di Asia Tenggara, Malaysia telah mendesak agar semua delegasi persidangan menolak permohonan perwakilan Vietcong dari Vietnam Utara dan Kamboja untuk turut ikut serta dalam persidangan tersebut.<sup>101</sup> Pada akhirnya, konsep netralitas yang diusulkan oleh Malaysia ini dalam persidangan tersebut berbuah manis. Konsep tersebut mendapatkan beberapa resolusi dari kalangan Negara-negara Non-Blok untuk mewujudkan konsep keselamatan dan keamanan di peringkat antarnegara maupun di peringkat regional.

Untuk memperoleh dukungan terhadap konsep tersebut, Malaysia juga mencarinya dalam forum-forum lain lagi seperti di PBB. Pada tanggal 15 Oktober 1970 Malaysia yang diwakili Tun Ismail mencari dukungan tersebut ke Dewan PBB dan berargumen:

“... the path to a peaceful settlement of the conflict lies in the application of the principles of non-interference, self-determination and neutralization of the Indochina area. The agonizing price that the people of Vietnam has paid in the last two decades surely points in that direction. At the same time, it is also the view of my government that the lessons of Vietnam have clearly shown the need for the neutralization of the region as a whole.

---

<sup>99</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.72.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.73.

I therefore wish to reiterate . . . my Government's call for the neutralization not only of the Indocina area but also of the entire region of Southeast Asia, guaranteed by the three superpowers . . . such a guaranteed neutrality will eliminate the seeds of potential conflict and will ensure durable and lasting peace."<sup>102</sup>

Pada bulan September 1970 Tunku secara resmi mengundurkan diri dari pemerintahan. Lalu, Tun Razak yang menggantikannya sebagai perdana menteri kedua ini memutuskan untuk memakai konsep netralitas tersebut sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Malaysia kemudian. Usaha untuk mendapatkan dukungan mengenai konsep tersebut, Tun Razak lakukan kembali untuk pertama kalinya setelah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri di peringkat Negara-negara *Commonwealth* pada Persidangan Pemimpin-Pemimpin Negara Commonwealth (CHOGM) di Singapura pada tanggal 15 Januari 1971.<sup>103</sup> Dalam persidangan tersebut, Tun Razak menjelaskan bahwa usaha Malaysia untuk mendapatkan dukungan di Lusaka tentang netralitas di kawasan Asia Tenggara, khususnya mengenai pergolakan di Indochina, telah terealisasi dengan diperolehnya beberapa resolusi. Seperti dalam ucapannya berikut ini:

“... the non-alignment principles to which Malaysia wholeheartedly subscribes, not only calls for an end to colonial bondage and racism, but also for restraint and consideration from the big powers in their actions and decisions which affect the smaller countries. In keeping with the latter, the non-aligned countries at Lusaka looked to the neutralization of Vietnam, Laos and Cambodia, Malaysia for its part has taken this a step further and called for the neutralization of Southeast Asia—a neutralization which necessarily requires the endorsement of the US, USSR, and China. Vietnam, Laos, and Cambodia cannot really be considered in isolation. They are very much a part of Southeast Asia which has all the potentialities of becoming an area of conflict of the superpowers intent on the extension on their sphere of influence. In our view therefore, peace and stability in this region can only be a reality if the neutralization which covers the entire area, is guaranteed by the United States, USSR, and China.”<sup>104</sup>

Selain daripada itu, Malaysia tentunya juga harus memperoleh dukungan dari Negara-negara sekawasannya di Asia Tenggara. Misalnya, pada tanggal 12 Maret 1971 diadakan Sidang Keempat Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina. Pada kesempatan itu, Tun Ismail yang merupakan Wakil Perdana Menteri pada masa Pemerintahan Tun Razak ini meminta dukungan sebagai berikut:

<sup>102</sup> Singh, *op. cit.*, Hal.36.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal.37.

<sup>104</sup> *Ibid.*

“Dengan Vietnam dalam pemikiran bersama-sama dengan pengunduran Inggris dan Amerika Serikat dari Asia Tenggara, pemerintahan saya menganjurkan politik netralisasi dari Asia Tenggara yang akan dijamin oleh Negara-negara besar, yaitu: Amerika Serikat, Uni Sovyet dan RRC. Politik ini akan mengambil bentuk sebagai satu proklamasi bahwa kawasan kita ini tidak akan dianggap lagi sebagai kawasan yang dapat dibagi-bagi dalam wilayah pengaruh Negara-negara besar.”<sup>105</sup>

Dalam persidangan tersebut, Tun Ismail berusaha meyakinkan bahwa konsep netralitas adalah benar jika diterapkan oleh kawasan Asia Tenggara, melihat perkembangan yang terjadi, baik pergolakan di Indocina maupun perubahan sikap negara-negara besar. Akhirnya Menteri-menteri Luar Negeri Asean lainnya sepakat untuk menyimpulkan bahwa netralitas Asia Tenggara adalah satu konsep yang ingin dicapai bersama-sama. Mereka juga menaruh harapan untuk mewujudkan satu paham mengenai kawasan yang aman, bebas, dan netral dalam konteks Asia Tenggara yang meliputi:

1. Penting meneruskan hubungan tidak resmi dari masa ke masa untuk memupuk kerjasama di kalangan Negara-negara ASEAN.
2. Negara-negara ASEAN harus memberi sumbangan yang konkrit bagi tercapainya penyelesaian masalah tentang pergolakan di Indochina.
3. Mengutuk ujian senjata nuklir di manapun kawasan dunia.<sup>106</sup>

Tun Razak mempersoalkan juga alasan kenapa Asia Tenggara tidak dapat hidup dengan damai selama dua dasawarsa sebelumnya adalah karena keterlibatan negara-negara besar dalam masalah dalam negeri Negara-negara di Asia Tenggara. Tun Razak juga menjelaskan bahwa “Malaysia melihat gagasan itu sebagai penyelesaian jangka panjang” dan dia menegaskan bahwa “dalam kita melihat ke depan, kita jangan sampai melupakan apa yang akan kita hadapi. Kita akan berdosa melalaikan kewajiban kita jika kita mengambil segala tindakan pencegahan untuk keperluan pertahanan kita.” Dalam hubungan ini Tun Razak menegaskan bahwa “Perjanjian Pertahanan Lima Negara (*Five Power Defence Arrangement-FPDA*) antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia dan Selandia

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal.116.

<sup>106</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.81.

Baru yang diresmikan pada bulan April 1971 di London, tidak bertentangan dengan gagasan netralitas kita dan pendirian Non-Blok kita. Perjanjian pertahanan tersebut adalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan kita sekarang dan bahwa perjanjian itu semata-mata bersifat defensif.”<sup>107</sup>

Setelah mendapat respon yang baik dari teman-temannya di ASEAN dan Negara *Commonwealth*, Tun Razak berusaha kembali menyampaikan bahwa konsep ini haruslah segera disetujui dan sekiranya mendapat dukungan dari organisasi dunia yaitu PBB, agar konsep netral tersebut dapat terealisasi dalam bentuk kebijakan yang dapat diterapkan di kawasan Asia Tenggara. Dalam Pertemuan ke-26 Dewan PBB tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1971, Tun Razak berucap sebagai berikut:

“This leads me to the policy of neutralization of Southeast Asia which Malaysia has been advocating in the past one year or so as the only viable long-term solution for peace and stability in Southeast Asia . . . what is required in Southeast Asia in our view is a new international order by which the region is free and isolated from competition and interference by outside powers and in which the neutrality of the region, and the independence and territorial integrity of the countries in it, are fully guaranteed.”<sup>108</sup>

Akhirnya, usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia tersebut mengenai netralitas Asia Tenggara telah diputuskan dan disetujui oleh PBB di New York, Amerika Serikat. Di samping itu, Malaysia pun diterima sebagai salah satu Negara anggota Non-Blok, dan delegasi 53 negara Non-Blok lainnya telah memberikan persetujuan terhadap konsep tersebut.<sup>109</sup> Dalam artikel 19 persetujuan perhimpunan menyatakan:

“Untuk membebaskan kawasan Asia Tenggara dari persaingan Negara-negara Super Power, konsep netralitas akan dapat menjamin sepenuhnya keamanan dan keselamatan kawasan ini, begitu juga dengan kemerdekaan dan penyatuan kawasan sebuah Negara.”<sup>110</sup>

<sup>107</sup> Sabir, *op. cit.*, Hal.117.

<sup>108</sup> Singh, *op. cit.*, Hal.40.

<sup>109</sup> Hassan, *op. cit.*, hal..75.

<sup>110</sup> *Ibid.*

### III.3. Penandatanganan Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality)

Malaysia menyadari betapa pentingnya konsep netralitas Asia Tenggara diwujudkan. Maka, diadakan suatu pertemuan lebih lanjut bagi para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 26—27 November 1971 di Kuala Lumpur. Menteri-menteri Luar Negeri itu terdiri dari Perdana Menteri Tun Abdul Razak yang mewakili Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik yang mewakili Indonesia, Menteri Luar Negeri Carlos P. Romulo yang mewakili Filipina, Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam yang mewakili Singapura, dan terakhir Utusan Khusus Dewan Eksekutif Nasional Thanat Khoman yang mewakili Thailand.<sup>111</sup> Para perwakilan Negara-negara ASEAN tersebut bertujuan untuk membicarakan rencana konsep netralitas Asia Tenggara lebih lanjut.

Pada tanggal 26 November 1971 di Wisma Putra, Kuala Lumpur yang memakan waktu kira-kira dua jam, tercapai suatu kesepakatan mengenai rencana tersebut yang ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai “kawasan damai” yang netral dan bebas oleh Menteri-menteri Luar Negeri melalui sidang hari pertamanya ini.<sup>112</sup> Kemudian, keesokan harinya dilaksanakan penandatanganan suatu deklarasi yang berlangsung sebelum upacara penutupan sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN tersebut pada pukul 11.30 pagi.<sup>113</sup> Perwakilan Negara-negara ASEAN tersebut telah setuju dengan rancangan Malaysia bahwa konsep Netralitas Asia Tenggara harus dilihat dari dua tingkat yang harus dilaksanakan dan disepakati, yaitu antara lain:

a. Peringkat Negara-negara Asia Tenggara:

- 1 Tiap-tiap negara di kawasan ini hendaklah menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing, tidak mencampuri baik secara langsung ataupun tidak langsung atau sebaliknya aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam

<sup>111</sup> Sekretariat Nasional ASEAN. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, 1992. hal.243.

<sup>112</sup> “Rantau damai: ASEAN Setuju.” Dalam Utusan Malaysia, 27 Januari 1971, Hal.1.

<sup>113</sup> *Ibid.*

keselamatan negara lain. Sikap non-agresif dan tidak mencampuri hal-hal dalam negeri masing-masing negara.

- 2 Semua kekuatan asing hendaklah dikeluarkan dari kawasan ini.
- 3 Kawasan ini tidak boleh digunakan sebagai kawasan konflik dalam perebutan kekuasaan antarnegara.
- 4 Tiap-tiap negara hendaklah berusaha mencari jalan dan memikul tanggungjawab bersama untuk mewujudkan perdamaian di kawasan ini.
- 5 Negara-negara Asia Tenggara hendaklah menganjurkan satu pandangan yang kolektif kepada negara-negara besar mengenai isu keselamatan.
- 6 Negara-negara Asia Tenggara hendaklah meningkatkan kerjasama regional.

b. Peringkat Negara-negara adidaya (Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Cina):

- 1 Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang netral.
- 2 Negara-negara besar hendaklah menetralkan negara-negara di kawasan ini dari perebutan dan persaingan kekuasaan di antara mereka.
- 3 Negara-negara besar hendaklah mencari cara-cara penyelesaian untuk menjamin netralitas Asia Tenggara di dalam perebutan kekuasaan antarnegara.<sup>114</sup>

Setelah mereka sepakat mengenai apa yang harus mereka lakukan satu sama lain demi tercapainya konsep netralitas ini, maka pada tanggal 27 November 1971 ditandatangani sebuah deklarasi bernama Deklarasi ZOPFAN yang berarti *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*, atau yang dapat disebut juga Deklarasi Kuala Lumpur.<sup>115</sup> Deklarasi ini telah mencapai kesuksesan bersejarah di antara kelima Negara untuk mencari jalan mewujudkan dan menghormati Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral dari campur tangan kekuatan-kekuatan asing. Deklarasi tersebut berbunyi sebagai berikut:

<sup>114</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.78.

<sup>115</sup> Rajendran, *op. cit.*, hal.27.

1. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bertekad untuk pada tahap pertama melancarkan usaha yang diperlukan guna memperoleh pengakuan dan penghormatan bagi Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral dari bentuk campur tangan negara-negara besar.
2. Bahwa negara-negara Asia Tenggara harus mengadakan usaha bersama untuk memperluas wilayah kerjasama yang akan menyumbang kekuatan, solidaritas dan hubungan erat mereka.
3. Setuju untuk mengadakan konsultasi satu sama lain untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam semua masalah dan perkembangan yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara.
4. Setuju membentuk satu panitia dari pejabat-pejabat senior negara-negara ASEAN pada tahap permulaan untuk mempelajari dan mempertimbangkan langkah selanjutnya apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan.<sup>116</sup>

Persetujuan yang dicapai oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut telah menjadikan konsep netralitas Asia Tenggara yang disarankan oleh Tun Razak menjadi kenyataan. Keinginan Tun Razak untuk membentuk suatu kawasan yang mementingkan kedamaian, kebebasan, dan netralitas yaitu ZOPFAN tercapai pada akhirnya. Selain konsep tersebut dapat terealisasi, negara-negara ASEAN ini juga mengharapkan kerjasama negara-negara Asia Tenggara dapat terus ditingkatkan, terutama untuk memperkuat konsep tersebut di kawasan ini. Deklarasi ini telah melahirkan suatu tujuan untuk menjamin dan membina satu kerangka politik yang memperbolehkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saling berhubungan untuk masalah-masalah ekonomi dan sosial.<sup>117</sup>

ZOPFAN juga berfungsi mengurangi keterlibatan negara-negara besar tersebut di kawasan ini dan membatasi mereka terlibat dalam politik serta pasukan-pasukan tentaranya di negara-negara tersebut. Negara-negara ASEAN ini setuju untuk bekerjasama meminta negara-negara besar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan berusaha menghalangi negara-negara besar tersebut dari keterlibatannya dalam konflik Perang Dingin di Asia Tenggara.

---

<sup>116</sup> Sabir, *op. cit.*, Hal.118.

<sup>117</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.79.

### III.4. Asia Tenggara Sebagai Kawasan Damai, Bebas, dan Netral

Telah dijelaskan bahwa ZOPFAN bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi satu kawasan yang damai, bebas, dan netral. Adapun perbedaan pengertian yang spesifik dari ketiga konsep tersebut yang harus dimengerti. Damai, bebas, dan netral memiliki pengertian sebagai berikut:

#### 1. Damai

Setiap negara adalah bebas merdeka dan mempunyai kedaulatan sendiri, serta tidak mempunyai kekuasaan atas negara lainnya. Negara adalah otoritas yang tertinggi dalam unit politik berkenaan. Di sekitar negara tersebut tidak ada sebuah otoritas internasional yang memperbolehkan untuk mengarahkan negara lain mengikuti kemauannya. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara, politik dan sistem antarnegara sering digambarkan oleh para pengkaji sebagai anarki.<sup>118</sup>

Dalam keadaan tersebut, hubungan di antara dan di kalangan negara-negara biasanya berkisar pada dua bentuk hubungan: keamanan dan permusuhan. Keadaan damai dapat terwujud jika tidak terjadi permusuhan di kalangan antarnegara, serta tidak ada perpecahbelahan dan persengketaan. Di Asia Tenggara juga tidak sepi dari permusuhan. Misalnya, Indonesia pernah melancarkan konfrontasi dengan Malaysia; Filipina juga pernah bermusuhan dengan Malaysia tentang tuntutan atas Sabah. Permusuhan biasanya membawa hasil kepada kerugian.

Oleh sebab itu, ASEAN ingin menjauhinya dan yang diperjuangkan adalah keamanan. Dengan keamanan, seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Ghazali Shafie, negara-negara Asia Tenggara bisa berdampingan bersama dengan aman dan damai dengan syarat jika timbul masalah, selesaikan dengan damai bukan dengan kekerasan dan perang. Dengan berpegang pada prinsip menegakkan keamanan, setiap negara juga tidak akan memasuki dengan kekerasan satu sama lain. Mereka juga akan membuat komitmen untuk menyetepikan kekerasan dan paksaan. Setiap negara juga tidak akan membiarkan dirinya diberi bantuan oleh negara lain untuk menyerang negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.4.

<sup>119</sup> Kadir, *op. cit.*, Hal.79.



## 2. Bebas

Negara-negara Asia Tenggara, kecuali Thailand, pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ketika berada di bawah penjajahan, negara-negara tersebut tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan masa depannya, mereka terikat dengan kekuasaan negara yang menjajahnya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara tersebut mendapat kebebasannya yang telah dirampas. Setelah merdeka, negara-negara tersebut bebas menentukan masa depannya, tetapi adakalanya kebebasan itu terbatas. Masih ada penguasa yang coba campur tangan dalam urusan negara lain. Jika hal ini terjadi, negara yang bersangkutan sebenarnya masih belum bebas sepenuhnya.

Melihat hal tersebut, ASEAN berkeinginan untuk menjadikan kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang benar-benar bebas. Seperti yang pernah dijelaskan oleh seorang diplomat Thailand, bebas dalam gagasan ZOPFAN ini bermaksud sebuah negara itu dikuasai oleh sebuah negara lain dalam mengendalikan hal-hal dalam dan luar negerinya.<sup>120</sup> Tan Sri Ghazali Shafie juga pernah menjelaskan bahwa pemahaman istilah bebas harus meliputi konsep hak bagi setiap negara tidak terikat dengan campur tangan luar kepada hal-hal dalam negeri negara tersebut yang secara singkat dapat mengganggu kebebasan, kemerdekaan, dan keutuhannya.<sup>121</sup>

## 3. Netral

Dalam perpolitikan antarnegara, konsep netralitas sebagai satu cara untuk mengurus kepentingan nasional dari ancaman oleh pihak manapun. Konsep ini merupakan konsep lama karena sebelumnya pernah dipakai oleh beberapa negara, misalnya negara Malta pernah memakainya pada tahun 1802 dan Switzerland pada tahun 1815, Belgium (1839), Luxemburg (1867), Austria (1955), Laos (1962), Zaire (1855), Honduras (1907) dan juga Vatikan (1929).<sup>122</sup> Negara-negara yang menggunakan konsep netral ini biasanya tidak memihak ke manapun kalangan yang sedang berperang. Dalam undang-undang antarnegara pula disebutkan bahwa negara-negara netral ini juga mempunyai hak untuk

---

<sup>120</sup> Wariya, *op.cit.*, Hal.5.

<sup>121</sup> Kadir, *op. cit.*, Hal.80.

<sup>122</sup> Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI. Studi Perebutan Pengaruh Super Power di Samudera Hindia dan Dampaknya Terhadap ZOPFAN. Jakarta: LIPI, 1983. Hal.89.

mengulurkan bantuannya kepada pihak-pihak yang wilayahnya digunakan untuk tujuan-tujuan peperangan. Bagaimanapun hubungan ekonomi seperti itu dibenarkan.

Konsep netral yang Asia Tenggara gunakan merupakan satu mekanisme yang dapat mencari jalan untuk menjauhi usaha negara-negara besar dalam rangka mencampuri urusan politik negara-negara tersebut. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keamanan regional dengan menitikberatkan persamaan tujuan, yaitu menghormati antara negara-negara Asia Tenggara agar tidak ada konflik antara sesama tetangga. Dalam konsep netral yang diutarakan oleh negara-negara Barat, yaitu yang diutamakan adalah jaminan dari negara-negara besar agar mereka sama-sama tidak campur tangan. Dengan kata lain, konsep netral ala Barat tersebut lebih mementingkan faktor eksternal. Hal ini berbeda dengan konsep netral ala ZOPFAN. Konsep tersebut lebih mementingkan faktor internal daripada faktor eksternal.<sup>123</sup>

Menurut negara-negara Barat, sebuah negara yang menggunakan konsep netral hendaknya menarik diri dari politik antarnegara dan diharapkan agar tidak mempunyai angkatan bersenjata dan tidak mempunyai pangkalan tentara asing di negaranya.<sup>124</sup> Hal tersebut merupakan dasar netralitas yang dipelopori oleh Barat. Konsep tersebut berbeda dengan apa yang diutarakan oleh deklarasi ZOPFAN dan ASEAN pada tahun 1971 yang membenarkan anggotanya mempunyai angkatan bersenjata sendiri. Pangkalan asing juga dibenarkan menetap di suatu negara selama tidak mengganggu keamanan negara-negara tetangganya. Kehadiran pangkalan asing seperti yang terdapat di Filipina dianggap sebagai satu fenomena sementara dan kehadirannya dibenarkan karena Filipina juga mempunyai kekuasaan dalam menentukan pengerahan atau menggunakan angkatan tentara asing tersebut. Dilihat dari sudut ini, maka hal tersebut tidak berlainan arah dengan ZOPFAN.

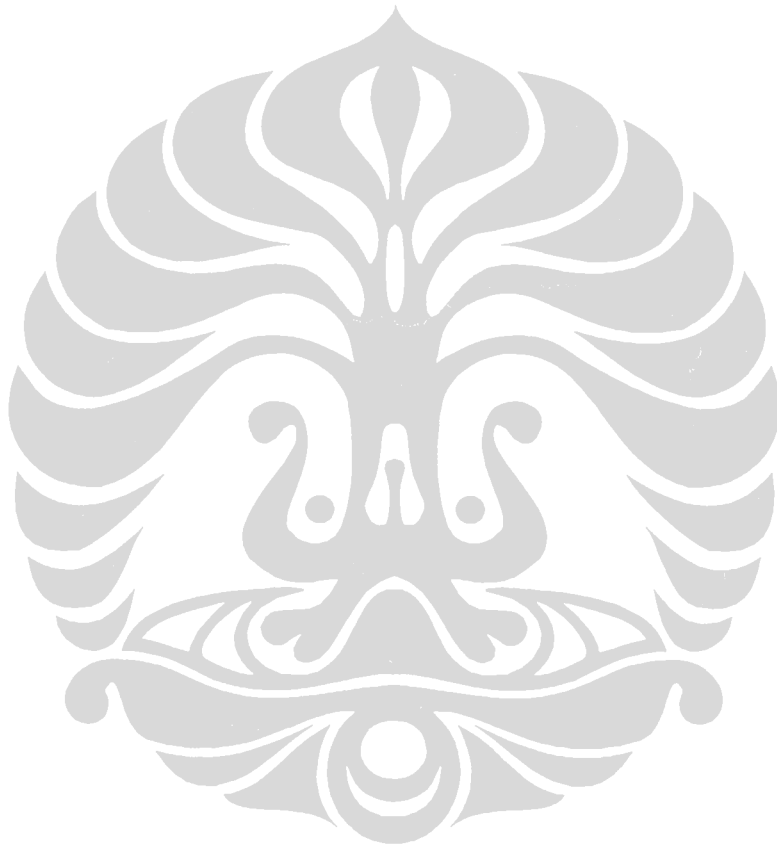
Misalnya, yang pernah dikatakan oleh Lee Kuan Yew dan Tun Dr. Ismail bahwa netralitas ini tidak pula bermakna bahwa kepentingan negara-negara Barat terhadap kawasan ini ditutup sama sekali. Kepentingan-kepentingan yang tidak mengancam keamanan, seperti ekonomi dan sebagainya, akan tetap dibenarkan.

---

<sup>123</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.7.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Hal.8.

Mereka mengakui bahwa Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang strategis memang tidak dapat dielakkan oleh kedatangan negara-negara besar atau Barat. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kehadiran mereka dapat diatur agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menghancurkan kawasan ini.<sup>125</sup>



---

<sup>125</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.79.

## BAB IV

### SIKAP NEGARA-NEGARA TERHADAP IDE ZOPFAN (*ZONE OF PEACE, FREEDOM, AND NEUTRALITY*)

Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) telah ditandatangani dan disetujui. Gagasan untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang damai, bebas, dan netral secara resmi telah diusahakan dan dilaksanakan Malaysia dalam berbagai kesempatan, misalnya dalam suatu forum besar yaitu Persidangan Negara-negara Non-Blok di Lusaka, Zambia. Oleh karena itu, hal tersebut bermakna konsep ini sudah menjadi kebijakan Malaysia dalam melaksanakan politik luar negerinya. Usaha untuk menjadikan konsep netralitas sebagai dasar kebijakan politik luar negeri Malaysia ini melahirkan dampak pada dalam negeri Malaysia. Dampak tersebut terlihat dari pro dan kontra masyarakat terhadap gagasan netralitas dan Deklarasi ZOPFAN. Di lain pihak, berbeda dengan pendirian dan sikap yang diberikan oleh rekan-rekan ASEAN-nya. Mereka lebih memberikan sikap yang dingin terhadap gagasan tersebut. Singapura, Indonesia, Filipina, dan Thailand tidak membantu dan bersikap dingin terhadap gagasan tersebut atas beberapa alasan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh para pemimpin negara berkenaan.

Sekalipun ZOPFAN bertujuan untuk meliputi seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak semua negara di kawasan ini telah terlibat secara langsung dalam mendayausahakannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proyek ini adalah inisiatif ASEAN yang terdiri dari lima negara yang merupakan negara bukan komunis di Asia Tenggara. Lima negara lainnya, yaitu Myanmar, Brunei Darussalam, dan tiga negara Indocina, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Negara-negara tersebut sejak awal telah tidak diajak untuk merundingkan mengenai gagasan netral ini. Hal tersebut dikarenakan mereka menjalani ideologi dan sistem politik yang bertentangan, serta yang lainnya dikarenakan belum dapat memperoleh kemerdekaan dan belum menjadi anggota

ASEAN. Dukungan mereka secara langsung dan tidak langsung hanya diminta setelah Deklarasi Kuala Lumpur diumumkan.

Di lain pihak, untuk merealisasikan ZOPFAN, ASEAN memerlukan dukungan dari negara-negara besar atau adidaya. Tanpa dukungan mereka, gagasan ini tidak mungkin menjadi kenyataan. Secara khusus, tiga negara besar tersebut adalah Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Cina. Ketika ZOPFAN dicetuskan, ketiga negara-negara besar tersebut sudah berada di kawasan ini guna memperluas pengaruhnya masing-masing. Pada mulanya ASEAN meminta agar ketiga negara ini menjadi penjamin ZOPFAN. Namun, permintaan tersebut jelas tidak dapat diterima oleh mereka. Sebaliknya, mereka melihat gagasan untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan damai, bebas, dan netral ini adalah bertujuan untuk mengusir mereka dari kawasan ini. Oleh sebab itu, tidak heran jika mereka tidak menjamin gagasan ASEAN tersebut. Maka, yang diharapkan ASEAN dari negara-negara besar ini ketika itu adalah dukungannya saja.

#### **IV.1. Sikap Negara-Negara ASEAN**

##### **IV.1.1. Malaysia**

Dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri di Malaysia, hak prerogatif diberikan kepada para anggota elit yang paling berperan terhadap kebijakan tersebut, misalnya Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri. Pengaruh elit-elit tersebut lebih dominan daripada anggota elit lainnya, seperti Menteri-menteri Kabinet lainnya dan Anggota Parlemen.<sup>126</sup> Peranan anggota lainnya ini hanya sebagai pelaksana terhadap kebijakan politik luar negeri yang telah diputuskan. Kekuatan kepribadian Perdana Menteri dan kredibilitas yang dimiliki oleh mereka yang begitu tinggi di kalangan elit pemerintahan ditambah faktor menduduki posisi Perdana Menteri menjadikan ide-ide mereka mudah diterima.

---

<sup>126</sup> Faridah Jaafar. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007. Hal.208.

Berdasarkan itu pula, keputusan penggunaan konsep netralitas sebagai dasar dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia mudah diterima oleh masyarakat lainnya. Konsep netralitas mendapat sambutan yang baik oleh rakyat Malaysia. Sebelumnya, rakyat negara ini menaruh sikap negatif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Tunku yang pro-Barat dan anti-komunis secara berlebihan. Seperti sikap yang diambil oleh para pemimpin UMNO terhadap sikap Tunku yang menandatangani perjanjian AMDA. Seorang anggota UMNO, bernama Tajuddin Ali beranggapan perjanjian AMDA akan merubah status kemerdekaan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat.<sup>127</sup>

Sikap serupa terjadi kembali ketika Tun Razak mengambil sikap untuk menandatangani sistem pertahanan FPDA pada tahun 1971 sebagai pengganti AMDA. Para peneliti kebijakan politik luar negeri Malaysia membuat tafsiran sendiri yang cenderung kepada sikap negatif terhadap tindakan yang diambil oleh Tun Razak yang ketika itu juga sedang mendayausahakan konsep netralitas untuk dapat diterima oleh negara-negara lainnya. Namun, Tun Razak menjelaskan bahwa tujuannya menandatangani rencana pertahanan tersebut adalah sebagai tindakan pertahanan dan bukannya untuk menyerang.<sup>128</sup> Tindakan Tun Razak bekerjasama dengan beberapa negara Barat semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan dan kestabilan Malaysia, mendapat pujian dan dukungan.

Di lain pihak, aktivitas komunis yang dilakukan oleh PKM semakin berkembang setelah konsep netralitas dan Deklarasi ZOPFAN ditandatangani. Komunis berusaha menjelek-jelekan pemerintahan Tun Razak dengan menyebarkan propaganda serta fitnah kepada rakyat melalui siaran radio 'Suara Revolusi Malaysia'.<sup>129</sup> Keganasan yang dilakukan oleh PKM tidak hanya terbatas di pedalaman, tetapi juga bergerak di beberapa kota. Bahkan, komunis telah memasuki ke negara Thailand yang telah menyebabkan pertempuran dengan pasukan keamanan Malaysia.

---

<sup>127</sup> Fuziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin. *Sejarah Malaysia*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000. Hal.567.

<sup>128</sup> Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003. Hal.66.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal.56.

Namun, Malaysia telah mencapai kesuksesan menghapus PKM di dalam negeri. Hal ini karena dibantu oleh usaha Malaysia yang mengadakan kerjasama regional di kalangan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Indonesia. Setelah ASEAN berhasil menandatangani ZOPFAN, kerjasama antar negara kawasan ini dapat ditingkatkan, terutama dalam usaha menentang pemberontakan komunis di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut terlihat pada Persidangan Ketua Negara ASEAN pada tanggal 23—24 Februari 1976.<sup>130</sup>

#### IV.1.2. Singapura

Singapura sebenarnya tidak sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk menerima ZOPFAN. Singapura menerima ZOPFAN karena terpaksa, bukan karena negara ini percaya bahwa gagasan ini dapat menjadi kenyataan, tetapi ada suatu kepercayaan bagi negara ini bahwa ZOPFAN diragukan akan dapat direalisasi. Seperti yang dikatakan oleh Bilver Singh, seorang peneliti Singapura, berpendapat bahwa Singapura menerima konsep tersebut karena gagasan itu kabur dan negara ini pun tidak akan dirugikan apa-apa jika menerimanya. Kawasan yang damai, bebas, dan netral yang disetujui di Kuala Lumpur tersebut tidak mengancam kepentingan politik, keselamatan dan ekonomi Singapura.<sup>131</sup>

Singapura juga tidak perlu bimbang tentang kemungkinan Amerika Serikat, yang telah dekat dengannya sejak tahun 1967 ini, akan meninggalkan Asia Tenggara karena persoalan mereka untuk menarik seluruh pangkalan militer asing tidak langsung disebut dan dijelaskan dalam Deklarasi Kuala Lumpur. Hal tersebut dikarenakan Singapura yang bersama dengan Malaysia telah terikat suatu perjanjian pertahanan yang disebut sebagai Perjanjian Pertahanan Lima Negara (FPDA).

Selain itu, bagi Singapura dukungan yang dibutuhkan oleh ZOPFAN hanya dukungan yang terlontar dari mulut saja bila negara ini menerima gagasan tersebut. Dengan berbuat demikian, Singapura mendapat keuntungan pula dari penandatanganan deklarasi tersebut, yaitu ZOPFAN telah memperkuat

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal.59.

<sup>131</sup> Chamil Wariya, dan B.A.Hamzah. *ZOPFAN: Mitos atau Realiti*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1992. Hal.38.

hubungannya dengan Malaysia dan Indonesia, ZOPFAN juga telah membawa Singapura untuk memperlihatkan ke-ASEAN-nya. Lebih dari itu, ZOPFAN membuat Singapura dapat mencapai tujuan kebijakan luar negerinya untuk bisa memberikan suara dan kontribusi yang dapat diterima di kawasan ini, tanpa perlu mengambil sikap yang berbeda dengan rekan-rekan ASEAN-nya yang lain.<sup>132</sup>

Namun di balik sikapnya yang menerima ZOPFAN, niat baik Singapura sebenarnya jelas tidak ada. Singapura tetap meneruskan kebijakan luar negerinya yang terang-terangan tidak membantu, sebaliknya memperlambat usaha merealisasikan ZOPFAN. Dalam forum-forum antarnegara, negara ini tidak mengusahakan ZOPFAN sebagai perjuangan utamanya. Sebaliknya, yang ditegaskan adalah kepercayaan Singapura pada pendekatan keseimbangan kekuasaan (*balance of power approach*) sebagai mekanisme untuk menstabilkan Asia Tenggara.<sup>133</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari ucapan Menteri Luar Negeri Singapura, Rajaratnam yang secara khusus menunjuk pada pergolakan yang terjadi di Vietnam. Ia pernah berkata:

“Tidak melihat adanya alasan kuat bahwa apa yang dikatakan detente itu berarti negara-negara besar tersebut telah meninggalkan permainan tradisional dalam penyebaran ideologi dan bahwa demi kepentingan perdamaian dan persaudaraan antar manusia, mereka akan membiarkan negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan masalah Asia Tenggara menurut cara dan waktunya sendiri.”<sup>134</sup>

Mengingat suasana yang tidak menentu ini, Singapura berpendapat bahwa kepentingannya dan kepentingan keterlibatan negara-negara besar dalam kawasan, sehingga prospek keseimbangan dapat lebih ditingkatkan.<sup>135</sup> Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Singapura menginginkan adanya pendekatan yang seimbang antara negara-negara besar dan juga negara-negara dunia ketiga. Pendekatan seperti ini sebenarnya bertolak belakang dengan ZOPFAN yang tidak ingin

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal.39.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Muthiah Alagappa. “The Major Powers and Southeast Asia.” *International Jurnal*, Vol. 44, No.3 (Summer, 1989): 552.



melihat kekuatan negara-negara Besar kekal dan campur tangan dalam negeri kawasan ini. Singapura sebaliknya ingin memperkuat kehadiran Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Selain itu, Singapura juga beranggapan yang negatif terhadap ZOPFAN karena negara ini melihat gagasan tersebut sebagai alat untuk negara-negara Asia Tenggara mendominasi negara ini. ZOPFAN juga dilihatnya telah memperbolehkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia untuk mempermasalahkan pendirian kebijakan luar negeri Singapura mengenai keputusan yang membenarkan Amerika Serikat mendapat kemudahan ketentaraan di negara ini. Keputusan ini tercetus ketika Singapura sedang bermusuhan dengan Malaysia.<sup>136</sup> Oleh karena itu, ZOPFAN dilihat sebagai suatu perlindungan bagi dominasi kawasan yaitu oleh Indonesia dan juga telah memperbolehkan negara-negara tetangga mengkritik kebijakan-kebijakan tertentu Singapura. Hal tersebut bercermin pada pengalaman pahit Singapura setelah disingkirkan dari Malaysia dan juga pernah berselisih dengan Indonesia.

Singapura juga melihat bahwa hanya perlindungan Amerika Serikat saja kepentingan nasionalnya dapat terselamatkan dari ancaman negara-negara tetangganya bila berniat jahat terhadapnya. Singapura yang merupakan negara kecil ini, berfikir bahwa Asia Tenggara yang nantinya menggunakan konsep netral tidak akan dapat memenuhi kepentingan dan keselamatan nasionalnya. Bahkan, Singapura merasa terancam oleh negara-negara tetangganya yang lebih besar tersebut akan menggunakan ZOPFAN untuk campur tangan dalam urusan negara ini.<sup>137</sup>

#### **IV.1.3. Indonesia**

Seperti Singapura, Indonesia juga pada awalnya bersikap dingin dan negatif terhadap ide Malaysia untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang netral. Beberapa bulan sebelum para menteri luar negeri ASEAN pada tanggal 26—27 November 1971, Indonesia beranggapan bahwa gagasan netralitas yang dicetuskan sebagai suatu bentuk baru kolonialisme kolektif, mengingat

<sup>136</sup> M. Sabir. *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Hal.118.

<sup>137</sup> Wariya, *op. cit.*, hal.40.

kepentingan negara-negara Superpower sungguh besar terhadap kawasan ini, maka sulit untuk negara-negara tersebut secara sukarela bagi menetralkan Asia Tenggara.<sup>138</sup>

Di samping itu, Indonesia merasa tersinggung karena tidak dirundingkan terlebih dahulu mengenai konsep tersebut. Sebagai sebuah negara besar di kawasan ini, Indonesia tersinggung karena Tun Abdul Razak tidak memberitahu Indonesia bahwa Malaysia akan mengemukakan usul ZOPFAN dalam Persidangan Negara-negara Non-Blok Ketiga di Lusaka, Zambia. Indonesia merasa telah dibelakangkan dalam suatu proyek penting di kawasan ini.<sup>139</sup>

Tetapi hal tersebut bukanlah alasan satu-satunya untuk Indonesia. Alasan yang lebih penting adalah konsep netralitas atau konsep ZOPFAN sebenarnya agak samar-samar maksudnya. Selain itu, Indonesia juga berpendapat bahwa oleh karena Malaysia mempunyai suatu ikatan dalam satu perjanjian pertahanan dengan Inggris melalui AMDA dan FPDA sebelumnya, maka Malaysia bukanlah pihak yang layak untuk mengusulkan konsep dari ZOPFAN ini.<sup>140</sup> Indonesia yang telah terlibat dalam pengusulan negara-negara Non-Blok berpendapat bahwa ide Malaysia itu tidak dapat diterima karena Indonesia sudah menjadikan negaranya sebuah negara netral atau Non-Blok terlebih dahulu. Bahkan, beberapa kalangan berpendapat bahwa deklarasi seperti itu seharusnya datang dari pihak Indonesia, mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara anggota yang bersih dari ikatan militer negara-negara besar.<sup>141</sup>

Namun, hal demikian mungkin adapula hikmahnya. Jika gagasan tersebut diprakarsai oleh Indonesia, mungkin tidak mustahil akan ditentang oleh anggota lainnya, dan besar sekali kemungkinannya akan ditolak. Indonesia belum dapat melupakan peristiwa pangkalan asing dalam perundingan pembentukan ASEAN

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Hal.36.

<sup>139</sup> Hassan, *op. cit.*, hal.71.

<sup>140</sup> Setelah Inggris resmi mencabut perjanjian pertahanannya dengan Malaysia dan Singapura melalui AMDA pada awal tahun 1971, dibuat kembali rencana pertahanan yang bernama FPDA (Five Power Defence Arrangement) pada tanggal 16 April 1971. Sekiranya kedua negara ini menghadapi ancaman luar maka keduanya akan berbincang di antara satu sama lain agar dapat diambil tindakan yang sewajarnya seperti yang disebutkan dalam Perkara 5 Sistem Pertahanan FPDA, meskipun ini bukanlah sebuah perjanjian pertahanan seperti AMDA. *Ibid.*, Hal.63.

<sup>141</sup> Wariya, *op. cit.*

yang nyaris saja menggagalkan semuanya.<sup>142</sup> Ketika itu, Indonesia menolak keterlibatan negara besar dalam urusan Asia Tenggara. Kini gagasan ini diprakarsai oleh Malaysia yang memang terikat dalam Perjanjian Pertahanan Lima Negara, tentu saja tidak dapat ditolak dengan mudah oleh anggota lainnya yang juga terikat dalam perjanjian pertahanan.

Bagaimanapun setelah Indonesia mendapat gambaran yang lebih jelas tentang konsep ZOPFAN, negara ini kemudian menjadi pendukung kuat ZOPFAN dan menjadikannya sebagai suatu unsur penting kebijakan luar negerinya. Indonesia pada akhirnya lebih besar dalam mempromosikan ZOPFAN dalam forum-forum antarnegara. Dari keempat anggota ASEAN lainnya hanya Indonesia yang memberikan dukungan penuh.<sup>143</sup>

#### **IV.1.4. Thailand**

Thailand, seperti Singapura dan Indonesia, pada awalnya tidak menyukai tentang usaha untuk menetralkan Asia Tenggara. Thailand melihat bahwa kawasan Asia Tenggara yang netral akan merugikannya yang pada waktu itu mempunyai ikatan pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat, baik melalui SEATO ataupun perjanjian pertahanan yang telah ditandatangani untuk melindungi negaranya dari ancaman komunis yang berpusat di Hanoi. Sesuai dengan ide awal Malaysia itu, kawasan Asia Tenggara yang netral akan menghalangi negara-negara besar tersebut terlibat di kawasan ini serta mencegah usaha negara-negara tersebut menempatkan pangkalan asingnya di negara-negara ASEAN. Ketika itu, Thailand menjadi tuan rumah bagi pangkalan tentara Amerika Serikat dan memperbolehkan negaranya digunakan untuk menyerang Vietnam Utara.<sup>144</sup> Thailand menganggap tanpa payung keamanan Amerika Serikat, keselamatan dan kepentingan nasional negara ini akan terancam. Oleh karena itu, Thailand tidak dapat langsung menerima apa yang diusulkan oleh Malaysia mengenai konsep netralitas tersebut.

---

<sup>142</sup> Sabir, *op. cit.*, Hal.119.

<sup>143</sup> *Ibid.*, Hal. 118.

<sup>144</sup> Alagappa, *loc. Cit.*, hal.553.

Namun, setelah Thailand menyadari bahwa negaranya tidak dapat selamanya bergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat untuk menyelamatkan kepentingan nasionalnya. Thailand akhirnya membuat perubahan sikap terhadap pengusulan ZOPFAN ini. Thailand menerima gagasan tersebut atas dua alasan. Pertama, karena Amerika Serikat sudah memberikan peringatan untuk menarik diri dari Vietnam Selatan dan secara implikasi juga dari Thailand. Selain itu, Cina yang sebelumnya belum dapat tempat dalam kebijakan politik luar negeri Thailand, akhirnya muncul juga sebagai aktor utama dalam politik antarnegara. Thailand perlu menjamin hubungan dengannya dan ZOPFAN bisa menjadi jembatan untuknya mendekati negara berideologi komunis tersebut. Kedua, Thailand sendiri melihat bahwa ZOPFAN adalah suatu proyek jangka panjang untuk menjadi kenyataan.<sup>145</sup> Setelah mendapat penjelasan di Kuala Lumpur bahwa ZOPFAN tidak akan menghalang Thailand terus mendapat perlindungan pertahanan Amerika Serikat yang dianggap sebagai sementara, maka Thailand merasa tidak ada ruginya untuk memperjuangkan ZOPFAN juga.

Dukungan Thailand terhadap ZOPFAN bagaimanapun tidak seperti Singapura yang sejak awal memang tidak percaya pada konsep netralitas tersebut dan berpegang pada pendekatan keseimbangan dengan negara-negara besar maupun dengan negara dunia ketiga. Thailand yang benar-benar menginginkan melihat kawasan ini bebas dari campur tangan negara-negara besar sebagai tujuan jangka panjangnya dan karena itu ikut berkontribusi dan menggunakan forum-forum antarnegara untuk memperkenalkan konsep tersebut.

Namun, Thailand akan tetap pada pendirian yang ada mengenai keterlibatannya dengan negara-negara besar, seperti yang tercermin dari keterangan Thanat Khoman, Utusan Khusus Dewan Eksekutif Nasional sekembalinya ke Bangkok setelah penandatanganan ZOPFAN. Ia menegaskan “Thailand akan tetap mempertahankan perjanjian pertahanannya sekarang sampai tiba waktunya apabila perdamaian, kebebasan, dan kenetralan sungguh-sungguh telah terjamin.”<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.44.

<sup>146</sup> Sabir, *op. cit.*, Hal.119.

#### IV.1.5. Filipina

Awalnya, Pendirian Filipina terhadap ZOPFAN seperti Thailand yaitu negatif. Filipina seperti Thailand, mempunyai hubungan pertahanan yang dekat dengan Amerika Serikat yang sebelum Perang Dunia Kedua pernah menjajahnya. Hubungan tersebut adalah penting untuk menjamin keselamatan nasional negara tersebut di dalam situasi dunia yang ketika itu negara-negara di beberapa belahan dunia saling bermusuhan. Filipina bukan saja mempunyai perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, tetapi Amerika juga menempatkan dua pangkalan militernya di negara tersebut, satu pangkalan di laut Teluk Subik dan satu lagi pangkalan tentara udara di Clark.<sup>147</sup> Kedua pangkalan tersebut bukan saja memberi manfaat pertahanan, tetapi juga ekonomi kepada Filipina. Seandainya kedua pangkalan tersebut ditutup, Filipina pun akan mengalami kerugian. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Presiden Marcos yang menegaskan bahwa yang penting bagi Filipina adalah untuk mendapatkan bantuan dari ancaman partai komunis yang sedang dihadapinya. Bagi Filipina juga, kehadiran Amerika memberi bantuan keuangan dan peluang atau kesempatan kerja untuk rakyatnya.<sup>148</sup>

Oleh karena itu, jika Filipina mendengar bahwa gagasan netralitas Asia Tenggara bertujuan untuk menghalangi negara-negara besar mempunyai pangkalan militernya di kawasan ini, Filipina tidak bisa memberikan persetujuannya terhadap gagasan tersebut. Kerugian Filipina bukan saja dalam bentuk ekonomi, tetapi juga negara ini akan kehilangan payung pertahanan untuk menghadapi pemberontakan komunis dalam negeri yang mendapat dukungan dari Cina dan Uni Sovyet tersebut. Terlebih lagi gagasan tersebut datangnya dari Malaysia, negara yang ketika itu pernah bermusuhan dengan Filipina terkait dengan tuntutan atas Sabah. Tentu sulit bagi Filipina untuk menerimanya apalagi untuk bekerjasama merealisasikannya.

Bagaimanapun setelah dijelaskan bahwa ZOPFAN memperbolehkan pangkalan tentara asing yang dianggap sebagai suatu fenomena sementara di

---

<sup>147</sup> Alagappa, *loc. Cit.*

<sup>148</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.46.

negara-negara Asia Tenggara, Filipina akhirnya menyetujui Deklarasi ZOPFAN ini yang bertujuan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Walaupun komitmen negara ini tidak sehebat dengan Malaysia dan Indonesia, tetapi Filipina tidak mengambil sikap bermuka dua seperti Singapura yang pada satu sisi menyetujui untuk berpegang pada konsep ZOPFAN, di lain pihak melaksanakan hal-hal yang dapat mengancam gagasan tersebut.

Filipina memberi dukungan bukan saja dengan menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur, tetapi juga ikut berkontribusi memperkenalkan konsep ini melalui forum-forum antarnegara. Filipina melihat ZOPFAN sebagai suatu ide untuk kepentingan jangka panjang. Filipina sadar mengenai keadaan bahwa kehadiran negara-negara besar jika tidak ditangani dengan segera dan benar, maka mereka dapat memporak-porandakan Asia Tenggara dan menghalalkan berbagai cara mereka untuk campur tangan hal-hal dalam negeri negara-negara di kawasan ini.<sup>149</sup> Menurut penilaian Filipina, ZOPFAN dapat menangani masalah kehadiran negara-negara besar tersebut di kawasan ini.

Walaupun setelah penandatanganan, Filipina pernah tidak yakin terhadap konsep ini yang dapat dilihat dari pernyataan Carlos Romulo, Menteri Luar Negeri Filipina. Ia mengakui bahwa “Menlu ASEAN hanya berhasil menyetujui prinsip dalam garis besarnya saja. Ia menganggap bahwa masih terdapat pendirian mendalam dan kebiasaan kuno yang sulit untuk diubah ... Misalnya kita harus kembali meninjau aliansi tradisional, dan mengadakan perubahan dalam tata cara yang sudah lama dibuat. Dalam hal ini diperlukan satu masa peralihan, satu masa percobaan sebelum komitmen akhir dibuat terhadap ZOPFAN.”<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Sabir, *op. cit.*, Hal.120.

## IV.2. Sikap Negara-Negara Bukan ASEAN di Asia Tenggara

### IV.2.1. Brunei Darussalam

Ketika Deklarasi Kuala Lumpur ditandatangani pada tanggal 27 November 1971, Brunei Darussalam belum menjadi anggota ASEAN karena negara ini masih berada di bawah jajahan Inggris dan belum merdeka. Oleh karena itu, negara ini tidak terlibat secara langsung dengan inisiatif ZOPFAN, khususnya pada waktu penandatanganan deklarasi ini. Ketika Brunei sudah mencapai kemerdekaan dan ikut serta dalam ASEAN, negara ini memberi pengakuan untuk menerima ZOPFAN. Namun, pada awalnya Brunei sependapat dengan pendirian Singapura yang sama-sama negara kecil di antara negara-negara di Asia Tenggara terhadap kawasan damai, bebas, dan netral ini.<sup>151</sup>

Di kalangan elit-elit Brunei pernah menyampaikan, sekalipun pendirian ini tidak dinyatakan secara terbuka. Mereka menjelaskan bahwa terdapat kebingungan oleh Brunei bahwa ZOPFAN akan menjadi alat untuk negara-negara kawasan ini yang lebih besar di Asia Tenggara akan mencoba mencampuri urusan negara-negara yang lebih kecil. Oleh karena itu, Brunei memang diketahui tidak begitu sependapat dengan ZOPFAN.<sup>152</sup> Tetapi karena negara ini juga mengambil sikap seperti Singapura bahwa untuk merealisasikan ZOPFAN adalah tipis, maka tidak ada ruginya bagi negara ini menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Dengan menerima ZOPFAN, Brunei akan dapat menjalin ikatan lebih akrab dengan Malaysia dan juga Indonesia, dua negara ASEAN yang memang diakui besar kontribusinya terhadap ZOPFAN.

### IV.2.2. Myanmar

Di antara negara-negara bukan ASEAN di Asia Tenggara, Myanmar adalah yang pertama menyatakan dukungan untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran yang diberikan oleh Tun Abdul Razak yang telah mengadakan kunjungan khusus ke Myanmar untuk meminta dukungan terhadap konsep

---

<sup>151</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.47.

<sup>152</sup> *Ibid.*

ZOPFAN tersebut. Namun dalam menyatakan dukungan tersebut, Myanmar juga menyatakan harapan agar netralitas Asia Tenggara yang diperjuangkan oleh ASEAN itu benar-benar netral dan tidak berpihak pada negara-negara manapun.<sup>153</sup> Pendirian ini secara tidak langsung menyatakan kebingungan negara ini bahwa usaha ASEAN itu akan lebih memihak ke Barat.

Myanmar tidak sulit menyatakan dukungannya untuk menjadikan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral, karena ketika penandatanganan gagasan tersebut negara ini sudah mengambil pendirian kebijakan politik luar negeri yang netral dalam berinteraksi dengan dunia luar. Negara ini telah mengambil sikap yang tidak memihak ke Blok Barat maupun Blok Timur. Negara ini mengambil sikap netral yang berorientasikan kepada pengasingan dan pemencilan.<sup>154</sup>

Di bawah kebijakan tersebut, negara ini tidak membuka pintunya pada pengaruh negara-negara besar manapun. Konsep netralitas adalah satu-satunya konsep yang dapat memelihara kepentingan dan keselamatan nasionalnya. Kebijakan yang *pro* pada pihak manapun hanya akan membawa negara tersebut ke dalam kancah konflik yang memang ingin dijauhinya. Setelah bebas dari penjajahan, negara ini ingin memastikan bahwa keutuhan wilayah dan kebebasan politiknya tidak lagi diganggu oleh pihak manapun. Oleh karena itu, negara ini tidak ada masalah untuk mendukung ZOPFAN. Bahkan, Netralitas Myanmar ini telah membantu ZOPFAN untuk memenuhi cita-cita tersebut.

#### **IV.2.3. Indocina**

Tiga negara terakhir bukan ASEAN di Asia Tenggara adalah Indochina, yang terdiri dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ketika ZOPFAN dicetuskan dan ditandatangani pada tahun 1971, Indocina belum menjadi negara komunis sepenuhnya. Ketika itu, Vietnam masih terbagi menjadi dua negara yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Vietnam Utara merupakan satu-satunya negara

<sup>153</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.77.

<sup>154</sup> Kebijakan politik luar negerinya yang netral, dilaksanakan Myanmar setelah merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. Pilihan ketika itu adalah apakah seperti Malaysia yang berpihak kepada Barat, atau Vietnam yang berpihak kepada Blok Timur, ataupun berdiri di tengah-tengah. Sekalipun ketika itu terdapat tanggapan bahwa netralitas adalah satu konsep yang tidak bermoral, pemimpin Myanmar jelas tidak setuju dengan pandangan tersebut. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa netralitas adalah satu konsep yang sesuai untuk negara ini. *Ibid.*



komunis di Indocina, dan Vietnam Selatan adalah negara berekonomi demokratis (kapitalis) yang didukung oleh Amerika Serikat. Laos dan Kamboja adalah dua negara yang mempunyai status netral ketika itu.<sup>155</sup>

Sebelum dan sesudah menjadi negara berideologi komunis, pendirian negara-negara Indochina tersebut terhadap ZOPFAN mengalami perubahan seiring keadaan politik di kawasan itu. Sebelum diperintah oleh pemerintahan komunis, Vietnam Selatan, Laos, dan Kamboja mendukung gagasan ZOPFAN tersebut. Vietnam Selatan menyatakan dukungan karena negara ini melihat bahwa dengan menjadikan Asia Tenggara netral, kedudukannya akan terselamatkan dari ancaman Vietnam Utara yang dibantu oleh Uni Sovyet dan Cina. Laos dan Kamboja juga berpendapat usaha ASEAN tersebut adalah sejalan dengan status mereka yang merupakan negara netral. Dengan menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral, kedudukan kedua negara ini yang sebagai negara netral juga akan menjadi lebih kukuh.

Namun, pendirian negara-negara bukan komunis tersebut berubah ketika berubahnya pula keadaan kawasan tersebut.<sup>156</sup> Vietnam Utara meyebar ke negara-negara Indocina lainnya dan membawa ideologi komunis. Seluruh Indochina setelah itu berada di bawah telunjuk Vietnam Utara. Pemerintahan komunis juga mengambil alih kekuasaan. Oleh sebab itu, seluruh negara tersebut mengambil sikap seperti Vietnam, yaitu menentang persetujuan ZOPFAN di Asia Tenggara.

Vietnam Utara memang sejak awal tidak menyetujui gagasan tersebut karena negara ini melihat ASEAN lebih bertujuan untuk menyekat penyebaran komunis di Asia Tenggara yang dipelopori oleh Vietnam. Negara tersebut melihat ZOPFAN adalah proyek dunia kapitalis untuk menyekat perjuangan rakyat yang sudah berhasil menyebarkan ideologi komunis di Indocina. ZOPFAN juga

---

<sup>155</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.50.

<sup>156</sup> Pada tahun 1973, Amerika Serikat telah resmi mengundurkan diri dari Vietnam Selatan dua tahun setelah Vietnam Selatan kehilangan payung pertahanan Amerika Serikat, Vietnam Utara menyerang Negara tersebut dan juga berhasil menduduki kedua Negara lainnya, yaitu Laos dan Kamboja menjadi Negara komunis pada tahun 1975. Di Laos, komunis yang mengambil alih kekuasaan sejak pertama adalah berkiblat kepada Hanoi, Vietnam Utara. Sedangkan, di Kamboja, Khmer Merah mengambil alih kekuasaan dari rezim Lon-Nol yang pro-Cina dan tidak berpihak kepada Hanoi. Namun, pada tahun 1978, Hanoi membuat keputusan untuk menggulingkan Khmer Merah dan didirikan sebuah pemerintahan komunis yang pro-Hanoi pimpinan Heng Samrin. Dengan itu, penguasaan Vietnam ke wilayah Indochina adalah mutlak. Hassan, *op. cit.*, Hal.86.

merupakan strategi negara-negara anti-komunis di kawasan ini untuk menyelamatkan diri masing-masing setelah Amerika Serikat menarik diri dalam Perang Vietnam. Vietnam berpendapat bahwa ASEAN bukan pihak yang sesuai dan pantas untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi damai, bebas, dan netral. Hal tersebut karena ASEAN mempunyai ikatan dengan Amerika Serikat, musuh utama Vietnam.

Dalam keadaan demikian, Vietnam mempunyai alasan yang kuat untuk menentang ZOPFAN. Pendirian ini ditegaskan oleh negara tersebut melalui pernyataan yang dibuat oleh Wakil Perdana Menterinya, bahwa Hanoi tidak berminat untuk menyertai ASEAN atau menyukseskan gagasan kawasan yang damai untuk waktu ini.<sup>157</sup> Vietnam tidak mau menerima gagasan ASEAN tersebut. Selain daripada itu, Vietnam justru mengemukakan gagasan alternatifnya sendiri untuk menyaingi gagasan yang telah dikemukakan oleh ASEAN tersebut. Gagasan yang dikemukakan oleh Vietnam mempunyai tujuan yang sama seperti ASEAN dengan menambah kata merdeka di tengah-tengahnya. Jika gagasan ASEAN dikenal sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, maka gagasan Vietnam dikenal sebagai kawasan yang damai, merdeka, dan netral.<sup>158</sup> Jelas bahwa Vietnam tidak dapat menerima gagasan ASEAN, karena negara ini ingin mengemukakan gagasannya sendiri.

### **IV.3. Sikap Negara-Negara Adidaya**

#### **IV.3.1. Uni Sovyet**

Ketika ZOPFAN ditandatangani pada tahun 1971, Uni Sovyet tidak memberi sambutan yang diharapkan. Negara ini seolah-olah tidak menganggap gagasan ASEAN itu penting. Sikap dingin Sovyet, yang merupakan negara besar komunis ini dikarenakan pada tahun 1969 telah mengemukakan gagasannya untuk

---

<sup>157</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.51.

<sup>158</sup> Gagasan Vietnam diperkenalkan oleh Menteri Luar Negerinya di New York pada bulan Juli 1978 dan dijelaskan kepada ASEAN dalam kunjungannya ke Negara-negara kawasan ini pada akhir tahun yang sama. Jimmy Barichaldi. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap ASEAN dalam Mengantisipasi Konsep ZOPFAN di Asia Tenggara (1975—1981)*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1997. Hal.70.

Asia Tenggara melalui satu sistem keselamatan bersama untuk Asia yang telah disampaikan oleh Leonid Brezhnev. Di bawah rancangan itu dikenal sebagai *Asia Collective Security System*.<sup>159</sup> Sovyet memasukkan negara-negara Asia Tenggara, kecuali negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, India, RRC, ke dalam satu sistem keselamatan bersama yang akan dipimpin oleh Sovyet. Dalam keadaan seperti itu, Kremlin, pemimpin Uni Sovyet, melihat bahwa ZOPFAN hanya akan menghalangi gagasannya tersebut. Oleh karena itu, Sovyet menolak ZOPFAN.

Walaupun secara resmi pendirian tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, tetapi tulisan-tulisan para ilmuwan Sovyet yang di muat dalam acara-acara resmi negara, bahwa pendirian tersebut dapat dianggap sebagai membayangkan pendirian Kremlin semata. Pada bulan November 1971, Pravda, seorang ilmuwan Sovyet, mengatakan bahwa tugas menyukseskan ZOPFAN tidaklah mudah. Pada awal tahun 1972, Izvestiya juga mengatakan bahwa ZOPFAN adalah tidak perlu. Ia berpendapat selagi terdapat pangkalan militer asing di Asia Tenggara, merujuk pada kehadiran tentara Amerika Serikat di Filipina, ZOPFAN tidak mungkin menjadi kenyataan.<sup>160</sup>

Pendirian resmi Kremlin terhadap ZOPFAN hanya terucap ketika Tun Abdul Razak mengadakan kunjungan ke Moscow pada akhir tahun 1972. Dalam kunjungannya tersebut, Tun Razak meminta Sovyet memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan ZOPFAN. Ia juga menjelaskan bahwa gagasan tersebut tidak bertujuan untuk menghalangi hak negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, setelah pertemuan tersebut, para pemimpin Sovyet lebih memahami ZOPFAN. Namun, dukungan yang diharapkan tidak diperoleh.<sup>161</sup> Sovyet juga menyarankan agar gagasan Malaysia tersebut diperluas untuk meliputi kawasan yang lebih luas lagi, sejajar dengan gagasan keselamatan bersama Sovyet yang telah dikemukakan. Namun, Tun Razak menyatakan ketidaksetujuannya, dan berpendapat bahwa gagasan tersebut hanya akan

---

<sup>159</sup> Heiner Hanggi. *ASEAN and the ZOPFAN Concept*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 1991, Hal. 13.

<sup>160</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.56.

<sup>161</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.82.

membawa negara-negara kecil di Asia Tenggara ke dalam arena besar yang tidak akan mampu untuk mereka selesaikan.<sup>162</sup>

Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh para pemimpin Sovyet, setelah kunjungan Tun Razak, jelas tidak mendukung ZOPFAN. Bahkan, setelah Sovyet menjalin hubungannya dengan Vietnam pada akhir 1978, Sovyet menolak mentah-mentah dalam usaha untuk memuaskan hati Vietnam yang menjadi sekutu barunya di Asia Tenggara.<sup>163</sup> Ketika itu, Vietnam sudah mengemukakan gagasannya sendiri untuk Asia Tenggara bagi menyaingi gagasan yang telah dikemukakan ASEAN.

Sovyet meragukan bahwa tidak mungkin bagi lima negara ASEAN tersebut untuk menyelesaikan persoalan ini (ZOPFAN) secara sendiri, memandang mereka tidak mempunyai kekuatan politik, ekonomi, dan tentara yang cukup untuk menghalangi negara-negara imperialis (Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya) meninggalkan Asia Tenggara untuk membebaskan rakyat di kawasan ini agar dapat menentukan masa depannya sendiri. Kesimpulannya, Sovyet beranggapan bahwa ZOPFAN adalah tidak realistis, dan gagasan Sovyet tersebut untuk mewujudkan suatu sistem keselamatan bersama yang melibatkan setiap negara di Asia Tenggara adalah lebih realistis dan dapat dilaksanakan.

Dilihat dari kenyataan tersebut, jelas Sovyet masih menilai bahwa ZOPFAN hanya lebih menguntungkan negara-negara besar yang ingin tetap berada di kawasan ini, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Kremlin berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara yang netral akan memberi manfaat kepada Cina dan Amerika Serikat, serta dapat mengancam kedudukannya di kawasan ini. Sovyet baru saja mendapat kedudukannya di kawasan ini, oleh karena itu Sovyet tidak akan membenarkan ZOPFAN menjadi kenyataan karena bimbang bahwa kepentingan negara ini akan dihalangi di Asia Tenggara.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Wariya, *op. cit.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*, Hal.57.

### IV.3.2. Cina

Seperti Uni Sovyet, Cina, satu lagi negara besar yang diminta oleh ASEAN untuk menjadi penjamin ZOPFAN. Cina pada awalnya juga mengambil sikap dingin terhadap gagasan untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Setelah bulan Juni 1973, Cina memberikan penjelasan bahwa negara ini tidak dapat menerima permintaan untuk menjadi penjamin ataupun pendukung resmi ZOPFAN. Alasannya adalah, Cina tidak dapat dianggap sebagai sebuah negara besar. Statusnya tidak dapat disamakan dengan Amerika Serikat dan Uni Sovyet.<sup>165</sup>

Namun setelah itu, Cina bersedia menjadi pendukung kuat menyukseskan ZOPFAN. Tetapi ternyata dukungan ini tidak benar-benar ikhlas. Menurut para pemerhati politik internasional berpendapat bahwa dukungan Cina tersebut dipengaruhi dua faktor. Pertama, atas dasar keinginan Cina untuk memperkenalkan dirinya agar dapat diterima oleh ASEAN.<sup>166</sup> Kedua, sebagai usaha untuk menyetop Uni Sovyet, musuhnya, dari memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.<sup>167</sup> Oleh karena Uni Sovyet tidak menyetujui ZOPFAN, Cina berfikir bahwa tidak ada ruginya mendukung ZOPFAN.

Cina yang berbeda ideologi dengan Uni Sovyet, memulai usaha untuk menghalangi pengaruh Sovyet meluas di selatan negara itu termasuk di Asia Tenggara. Namun, menurutnya Amerika Serikat tidak lagi begitu dipermasalahkan kehadirannya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, hubungan

<sup>165</sup> Kemenangan Vietnam di Indochina, hal ini telah membuat kedudukan Cina semakin kuat di Asia Tenggara. Hassan, *op. cit.*, Hal.85.

<sup>166</sup> Di kalangan Negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Indonesia dan hingga batas-batas tertentu Thailand dan Filipina ketika itu, Cina memang sebuah Negara yang diragui. Bukan saja karena Cina memiliki gerakan-gerakan komunis yang melancarkan pemberontakan di Negara-negara ASEAN tersebut, Cina juga diketahui ingin menggunakan warga Negara Cina yang tinggal di Indonesia dan Malaysia sebagai tonggak untuk memperluas kepentingan nasionalnya. Negara-negara ASEAN melihat kedua kegiatan Cina tersebut akan mengancam keselamatan nasional mereka. Selain itu, Cina juga tidak senang dengan Filipina dan Thailand yang mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Serikat sebelum revolusi komunis berhasil jalan di Cina pada tahun 1949 yang merupakan sekutu kerajaan Kuomintang pimpinan Jenderal Chiang Kai Shek. Oleh karena itu, Cina ingin memperbaiki *image* nya di kalangan Negara-negara Asia Tenggara bahwa Negara ini bukan Negara yang harus ditakuti. Abdullah Dahana. *Cina dan Malaysia dalam Arena Perang Dingin 1949—74*. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002. Hal.35.

<sup>167</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.58.

antara Cina dan Amerika Serikat pulih setelah tahun 1970-an. Bahkan, Cina berpendapat bahwa Amerika dapat bekerjasama dengan Cina dan juga negara-negara ASEAN untuk menghalangi pengaruh Sovyet. Jadi, jika ASEAN mencoba untuk meminta dukungan agar gagasan ZOPFAN dapat terealisasikan, maka Cina tidak keberatan untuk menyatakan dukungannya.

Oleh karena itu, setelah Sovyet menandatangani perjanjian persahabatan dengan Vietnam, yang diikuti oleh Kamboja pada akhir tahun 1978, Cina meningkatkan dukungannya terhadap ASEAN dan juga gagasan ZOPFAN-nya. Dukungan tersebut lebih bertujuan untuk menjaga kepentingan Cina setelah Vietnam menguasai Laos dan Kamboja. Cina merasa terancam, karena dibalik Vietnam adalah dukungan dan bantuan dari Sovyet.

#### **IV.3.3. Amerika Serikat**

Ketika ZOPFAN diketengahkan pada tahun 1971, Amerika Serikat sudah memberikan pernyataan untuk menarik diri dari keterlibatannya pada Perang Vietnam. Pernyataan tersebut tercantum dalam Doktrin Guam oleh Presiden Nixon, yang menurutnya perang tersebut telah membebankan negara. Melalui doktrin ini, Amerika tidak akan lagi mengirimkan pasukan-pasukan militernya untuk mempertahankan negara manapun di Asia Tenggara yang menghadapi ancaman dari luar.

Namun, lain hal sikap yang diambil oleh Amerika terhadap Thailand dan Filipina yang juga memiliki perjanjian pertahanan dengannya. Amerika memberikan jaminan bahwa negara ini akan menghormati perjanjian pertahanannya dengan Thailand dan Filipina, tidak seperti sikapnya untuk menarik semua pasukannya di Vietnam Selatan tidak lama setelah ZOPFAN dilancarkan. Dua pangkalan tentaranya di Filipina tidak ditutup sama sekali.<sup>168</sup> Dari hal-hal tersebut menggambarkan bahwa kepentingan-kepentingan lain Amerika di Asia Tenggara selain dari pasukan-pasukan militer yang baru ditariknya tersebut setelah mengundurkan diri dari Vietnam tahun 1973, sebenarnya masih besar.

---

<sup>168</sup> Alagappa, *loc. Cit.*

Pendirian Amerika terhadap ZOPFAN sebenarnya membayangkan sikap Amerika terhadap gagasan netralitas. Para ilmuwan politik internasional Amerika setelah tahun 1945, memang menentang usaha untuk menetralkan negara-negara manapun di dunia ini. Kebijakan netralitas dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral.<sup>169</sup> Juga terdapat anggapan bahwa negara-negara netral sebenarnya tidak benar-benar netral, sebaliknya tidak lebih dari sebuah alat bagi Sovyet dalam percaturan politik antarnegara. Pemikiran tersebut dilontarkan oleh John Foster Dulles, pegawai negara Amerika pada tahun 1960-an, dan juga pegawai-pegawai pemerintahan lainnya ketika itu.<sup>170</sup>

Namun karena ZOPFAN dikemukakan oleh negara-negara ASEAN yang dekat dengan Amerika, maka negara ini tidak dapat langsung menolak gagasan tersebut mentah-mentah. Misalnya, ketika Tun Razak mengunjungi negara itu untuk mendapatkan dukungan terhadap ZOPFAN, para pemimpin Amerika yang ditemui Tun Razak telah berjanji untuk membantu menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral.<sup>171</sup> Namun, dukungan yang diberikan Amerika tersebut hanyalah untuk menyenangkan hati Tun Razak saja. Sebenarnya, negara ini juga tidak ingin memberikan dukungannya terhadap gagasan tersebut.

Alasan Amerika tidak ingin memberikan dukungannya adalah karena gagasan tersebut akan membatasi kehadiran Amerika di kawasan ini. Selain itu, jika Asia Tenggara menjadi kawasan yang netral dan Amerika meninggalkan kawasan ini, maka akan timbul kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Sovyet atau Cina. Jika itu terjadi, Amerika akan kehilangan kedudukannya yang telah ada dalam genggamannya sejak tahun 1945.<sup>172</sup> Oleh karena itu, seperti Sovyet dan Cina, Amerika juga menolak sebagai penjamin bagi menyukseskan gagasan ZOPFAN.

---

<sup>169</sup> Wariya, *op. cit.*, Hal.60.

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Hassan, *op. cit.*, Hal.87.

<sup>172</sup> Wariya, *op. cit.*, hal.61.

## BAB V

### KESIMPULAN

Konsep netralitas muncul pada tahun 1968 oleh seorang mantan Menteri Dalam Negeri Malaysia, yaitu Tun Dr. Ismail. Kemunculan konsep ini merupakan bentuk kekecewaan Tun Ismail terhadap kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dijalani oleh Tunku Abdul Rahman. Kebijakan yang pro-Barat dan sangat anti-komunis lama-lama merugikan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Tunku tersebut dianggap sudah tidak layak lagi untuk menghadapi perubahan situasi dan kondisi politik dunia saat itu. Malaysia menjadi negara yang tidak dikenal oleh negara-negara dunia ketiga karena Malaysia hanya menjalin hubungan dengan negara-negara Barat, khususnya dengan Inggris. Dalam hal ini, Malaysia harus belajar dari kesalahannya menghadapi konflik dan konfrontasi dengan negara-negara tetangganya.

Sikap yang perlu diubah untuk pertama kali bagi kebijakan politik luar negeri Malaysia adalah sikap terbuka dalam melaksanakan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lainnya selain negara Barat. Sikap tersebut dilaksanakan jika Malaysia ingin kepentingan negaranya tercapai, yaitu keselamatan dan keamanan negara tetap terjamin. Apalagi setelah Inggris mengambil sikap untuk menarik pasukannya dari Terusan Suez, serta dari Malaysia dan Singapura. Hal tersebut telah membuat wujud kekosongan bagi pertahanan Malaysia karena perjanjian AMDA yang sangat diandalkan oleh Malaysia ini harus dihentikan pula. Oleh karena itu, Malaysia harus mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak bisa selalu mengandalkan bantuan dari negara Barat.

Situasi dan kondisi politik dunia makin berubah setelah tahun 1969. Keterlibatan Negara-negara Barat di Asia Tenggara mulai berkurang. Selain Inggris yang menarik pasukannya dari Malaysia dan Singapura, Amerika Serikat juga memutuskan untuk menarik diri dari Vietnam. Di lain pihak, keterlibatan negara-negara blok Timur semakin bertambah. Hal ini ditandai dengan keputusan



Uni Sovyet untuk melaksanakan Sistem Keamanan Kolektif Asia. Dengan keputusan tersebut, keterlibatan Uni Sovyet di Vietnam makin bertambah pula. Paham komunis yang dibawa Vietnam menyebar ke negara-negara lainnya yaitu Kamboja dan Laos, setelah paham kapitalis-demokrasi dari Amerika pergi dari Vietnam. Di samping itu, Cina juga tidak mau kalah untuk muncul sebagai kekuatan besar dan menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Keterlibatan yang semakin bertambah antar kedua negara berideologi komunis yaitu Uni Sovyet dan Cina, telah membuat rasa kekhawatiran bagi Malaysia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Ideologi komunis memang dikenalnya sebagai sebuah paham yang menggunakan cara radikal dalam menghadapi pemerintahan suatu negara. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bila negara dan kawasan ini ingin tetap hidup damai dan aman tanpa adanya penyebaran paham komunis di kawasan ini. Apalagi keterlibatan negara-negara Barat sudah berkurang. Jaminan keamanan yang diberikan oleh negara-negara Barat dalam menghadapi paham komunis sudah tidak bisa diandalkan lagi.

Berdasarkan situasi dan kondisi politik dunia tersebut, maka tepat saatnya Malaysia dan negara-negara lainnya di kawasan ini menggunakan kemampuannya sendiri yaitu melalui metode kerjasama. Malaysia menggunakan konsep netralitas sebagai dasar menjalani hubungan antar negara-negara tersebut. Dengan tidak memihak pada salah satu pihak, maka diharapkan negara-negara Besar dalam penyebaran ideologi masing-masing dapat dicegah, dalam hal ini adalah paham komunis.

Perubahan kepemimpinan Malaysia dari Tunku Abdul Rahman kepada Tun Abdul Razak telah membawa pada perkembangan yang positif bagi konsep netralitas. Jika di dalam masa pemerintahan Tunku konsep netralitas diabaikan, maka konsep tersebut mulai diketengahkan kembali semasa pemerintahan Tun Razak. Setelah Malaysia mengalami suatu peristiwa kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969, Malaysia mendapatkan pemimpin baru yaitu Tun Razak yang sebelumnya menaruh rasa kecewa dan menyadari ketidakseimbangan dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dijalani Tunku.

Tidak bisa dipungkiri keterlibatan Perdana Menteri dalam mengambil keputusan negara adalah juga berdasarkan watak atau kepribadian sang pemimpin tersebut. Tun Razak menyadari jika negara ini ingin hidup damai, maka melalui hubungan diplomatik antarnegara yang baik akan menjamin keamanan dan keselamatan negara. Berdasarkan hal tersebut, konsep netralitas mulai diperkenalkan untuk menjadi suatu konsep yang dapat diterapkan oleh Malaysia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, serta dapat dihargai oleh negara-negara Besar.

Usaha untuk memperkenalkan dan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya Malaysia lakukan di berbagai kesempatan. Misalnya, di dalam persidangan-persidangan yang melibatkan ASEAN, *Commonwealth*, Afro-Asia, hingga PBB. Dalam proses pengenalan dan untuk memperoleh dukungan tersebut, Malaysia menggunakan keadaan yang sedang terjadi di Vietnam yang merupakan akar dari penyebaran paham komunis di kawasan Asia Tenggara. Malaysia berharap ini saatnya negara-negara kawasan ini menentukan nasibnya sendiri tanpa melibatkan negara-negara Besar yang mencoba ikut campur dalam negeri suatu negara.

Dukungan yang dinanti-nanti Malaysia pada persidangan-persidangan tersebut akhirnya didapatkan setelah tahun 1971. Langkah selanjutnya, konsep netralitas tersebut harus dikukuhkan melalui suatu perjanjian tertulis jika ingin benar-benar terealisasi. Akhirnya pada tanggal 27 November 1971 mencapai kesepakatan untuk membuat suatu deklarasi bernama ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) melalui persidangan negara-negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur. ZOPFAN bermakna bahwa kawasan ini harus menjadi kawasan yang damai dari masalah dan konflik yang terjadi antarnegara Malaysia, bebas dari keterlibatan negara-negara Besar dalam hal campur tangan dalam negeri suatu negara, dan netral dari Perang Dingin yang sedang terjadi dengan harapan keterlibatan lebih jauh negara-negara Besar tersebut dapat dicegah.

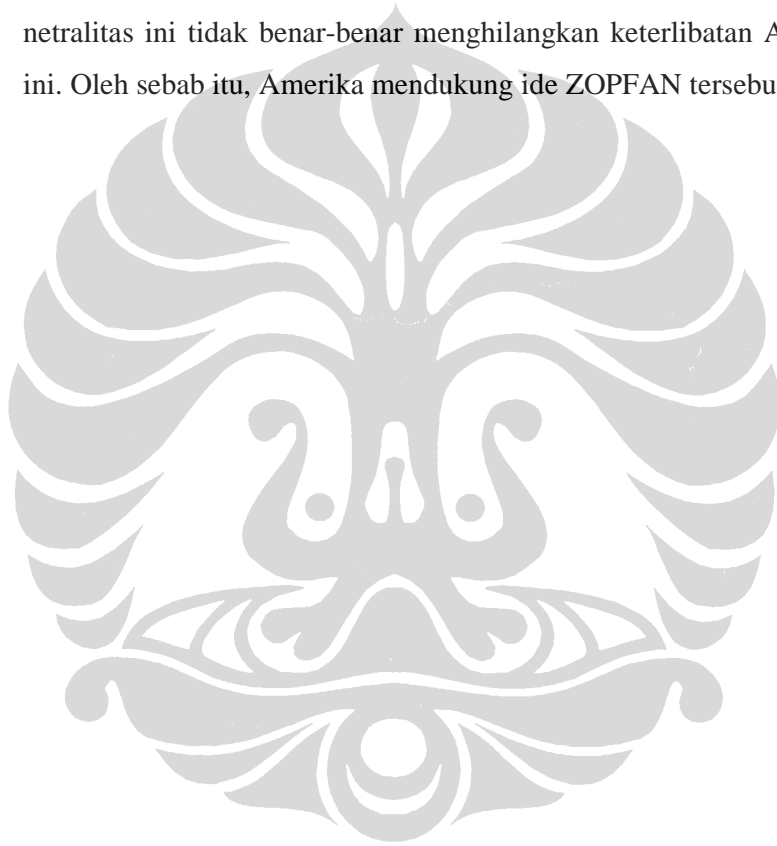
Dalam membentuk ide ZOPFAN tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena muncul berbagai sikap yang berbeda khususnya dari negara-negara anggota ASEAN. Pada awalnya setiap negara bersikap negatif karena

meragukan kemampuan Malaysia untuk membuat negara ini benar-benar netral, seperti sikap Indonesia. Di samping itu, masih banyak negara yang membutuhkan peran negara Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara misalnya Thailand, Singapura dan Filipina yang memiliki dua pangkalan militer Amerika di Teluk Subik dan Clark. Namun, mereka melihat netralitas yang dimaksud Malaysia adalah membenarkan kehadiran pangkalan militer sebagai suatu alternatif jangka pendek untuk menjamin keamanan di kawasan ini, selama tidak turut ikut campur tangan dalam negeri negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, negara-negara ASEAN pada akhirnya menyetujui dan mendukung ide ZOPFAN ini.

Walaupun ide ZOPFAN ini diperuntukkan bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi negara-negara lain yang bukan anggota ASEAN tidak ikut berpartisipasi aktif dalam merealisasikan ide tersebut. Sikap negara-negara lainnya berbeda terhadap usaha ASEAN tersebut. Brunei Darussalam dan Myanmar mendukung ide ZOPFAN tersebut. Namun, berbeda dengan negara-negara Indochina dalam mengambil sikap. Sejak Kamboja dan Laos dikuasai oleh komunisme Vietnam, Indochina menaruh sikap negatif untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi negara yang netral. Hal tersebut karena Indochina tidak bisa menolak kehadiran Uni Sovyet yang begitu besar di negara-negara ini. Bahkan, Vietnam menciptakan sendiri suatu konsep untuk Indochina sebagai perlawanan terhadap ide ZOPFAN.

Dalam merealisasikan ide ZOPFAN, ASEAN berharap negara-negara besar dapat menjadi penjamin. Namun, mereka menolaknya karena mereka melihat gagasan untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan damai, bebas, dan netral ini adalah bertujuan untuk mengusir mereka dari kawasan ini. Oleh karena mereka tidak mau menjadi penjamin, maka ASEAN mengharapkan dukungan dari mereka. Dukungan tidak diperoleh dari Uni Sovyet. Menurutnya, ide ZOPFAN ini tidak realistis, bagi mereka yang realistis adalah keputusan untuk mengadakan Sistem Keamanan Kolektif Asia yang pernah disampaikan jauh sebelumnya untuk menjamin keselamatan dan pertahanan kawasan ini. Berbeda sikap yang diambil oleh Cina yang mendukung ide tersebut. Namun,

dukungannya tersebut memiliki maksud lain yaitu agar hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara menjadi membaik sehingga Cina dapat mencegah keterlibatan komunis Uni Sovyet semakin meluas. Amerika Serikat juga mendukung ide ZOPFAN tersebut. Namun, dukungan Amerika ini menjadi sebuah keterpaksaan. Karena negara-negara yang mengajukan ide tersebut dekat dengan Amerika, maka tidak sulit bagi Amerika untuk mendukung, walaupun sebenarnya terpaksa dan mempunyai pendirian sendiri bahwa konsep netralitas merupakan konsep tidak bermoral. Malaysia berusaha meyakinkan bahwa konsep netralitas ini tidak benar-benar menghilangkan keterlibatan Amerika di kawasan ini. Oleh sebab itu, Amerika mendukung ide ZOPFAN tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd. Samad, Paridah. *Tun Abdul Razak: A Phenomenon in Malaysian Politics*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn. Bhd, 1998.
- Ahmad, Abdullah. *Tunku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia 1963—1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1987.
- Arifina. *Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963—1966*. Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1994.
- Pluvier, Jan. *South-East Asia From Colonialism to Independence*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.
- Arkib Negara Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri. *Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein 1971*. Kuala Lumpur: Ibrahim bin Johari PIS., Pemangku Ketua Pengarah Percetakan, 1976.
- Bandoro, Bantarto, dan Gondomono Ananta. *Asean dan Tantangan Satu Asia Tenggara*. Jakarta: CSIS, 1997.
- Barichaldi, Jimmy. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap ASEAN dalam Mengantisipasi Konsep ZOPFAN di Asia Tenggara (1975—1981)*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1997.
- Dahana, Abdullah. *Cina dan Malaysia dalam Arena Perang Dingin 1949—74*. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang 2000*. Jakarta: DEPLU RI, 2000.
- Jaafar, Faridah. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007.
- Kadir, Mokhtar A. *Keamanan Sejagat: Peranan Malaysia dalam Politik Antarabangsa*. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn. Bhd. 1991.
- Hanggi, Heiner. *ASEAN and the ZOPFAN Concept*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 1991.
- Hassan, Rozeman Abu. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.
- Irvine, R. *The Formative Years of ASEAN 1967—1975*. London: The Macmillan Press Ltd, 1982.
- Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI. *Studi Perebutan Pengaruh Super Power di Samudera Hindia dan Dampaknya Terhadap ZOPFAN*. Jakarta: LIPI, 1983.

- Means, Gordon P. *Malaysian Politics: the Second Generation*. Singapore: Oxford university press, 1991.
- Potichny, Peter J., ed. *From the Cold War to Detente*. New York: Praeger, 1976.
- Rajendran, M. *ASEAN's Foreign Relations: The Shift to Collective Action*. Kuala Lumpur: arenabuku Sdn. Bhd., 1985.
- Sabir, M. *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Saravanamuttu, Jayaratman. *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy 1957—1977*. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 1983.
- Sekretariat Nasional ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, 1992.
- Shaffie, Fuziah, dan Zainuddin, Ruslan. *Sejarah Malaysia*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000.
- Shafie, M. Ghazali. *Ghazali Shafie's Memoir on the Formation of Malaysia*. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1998.
- Shaw, William. *Tun Razak: His Life and Times*. Kuala Lumpur: Longman, 1979.
- Simon, Sheldon W. *ASEAN States and Regional Security*. Stanford: Hoover Institution Press, 1982.
- Singh, Bilveer. *ZOPFAN and The New Security Order in The Asia-Pacific Region*. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Bhd. 1992.
- Soon, Lau Teik. *New Directions in the International Relations of South East Asia: The Great Powers and Southeast Asia*. Singapura: Singapore University Press, 1973.
- Sudibjo., ed. *Asean dalam Berita, Harapan, dan Kenyataan 1967 – 1977*. Jakarta: CSIS, 1978.
- The Ministry Of Foreign Affairs. *Malaysia in Brief 1972*. Malaysia: The Ministry Of Foreign Affairs, 1972.
- Tim Peneliti/Penulis Pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. *Prospek Didirikannya Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone*. Ujung Pandang: Deplu, 1990.
- Wahid, Zainal Abidin Abdul. *Malaysia: Warisan dan Perkembangan*. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1990.
- Wariya, Chamil, dan Hamzah. B.A. *ZOPFAN: Mitos atau Realiti*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1992.

**Jurnal**

Alagappa, Muthiah. "The Major Powers and Southeast Asia." *International Journal*, Vol. 44, No.3 (Summer, 1989): 541—597.

Howell D. Llewellyn. "Looking East, Looking West: The International Political Attitudes of Malaysia's Successor Generation." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 17, No. 1 (Mar., 1986): 137-155.

Narine, Shaun. "ASEAN and the Management of Regional Security." *Pacific Affairs*, Vol. 71, No. 2 (1998): 195—214.

Ott, Marvin C. "Foreign Policy Formulation in Malaysia." *Asian Survey*, Vol. 12, No.3 (Mar., 1972): 225—241.

Shafie, Ghazali. "The Neutralisation of Southeast Asia". *Pacific Community*. Vol. 3, No.1 (Okt., 1971): 115

**Surat Kabar**

"Mighty Malaysia." *The Straits Times*, 29 Mei 1961.

"Peace: The Sooner the Better." *The Straits Times*, 2 Mei 1966.

"Rantau damai: ASEAN Setuju." *Utusan Malaysia*, 27 Januari 1971.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1

Tunku Abdul Rahman.



Sumber: Abdullah Ahmad. *Tunku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia 1963—1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1987.



(lanjutan)

Tun Abdul Razak.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

(lanjutan)

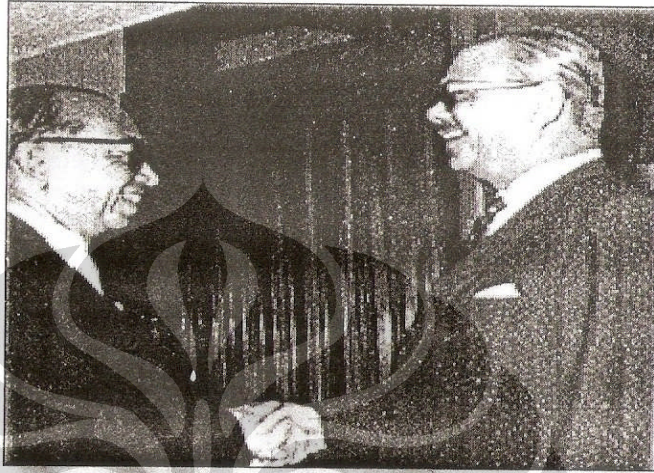
Tun Dr. Ismail.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

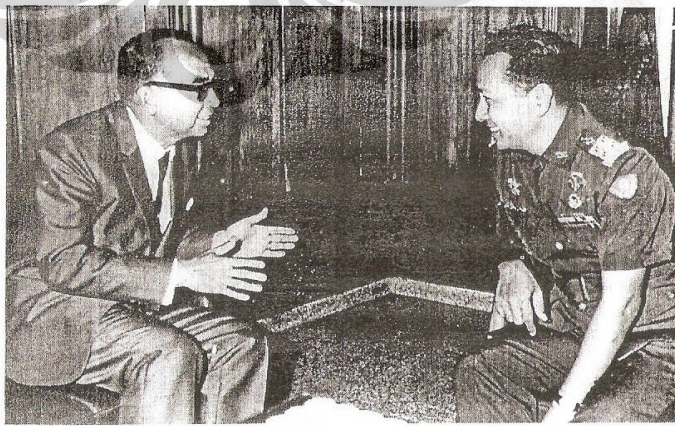
(lanjutan)

Dua orang bersahabat yang saling melingkupi ketika menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Tun Razak bagaikan “tangan kanan” Tunku ketika para pemimpin tersebut memegang pemerintahan negara pada tahun 1957—1970.



Sumber: Shaw, William. *Tun Razak: His Life and Times*. Kuala Lumpur: Longman, 1979.

Tun Abdul Razak mengunjungi Jenderal Soeharto, Ketua Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Indonesia pada tahun 1966. Peranan Tun Razak dalam hubungan luar negeri Malaysia sudah dimulai ketika ia masih menjadi Wakil Perdana Menteri. Terlihat dengan aktifnya beliau dalam menyelesaikan konfrontasi Malaysia-Indonesia.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

(lanjutan)

Tun Abdul Razak dipilih menjadi Ketua Pemerintahan Sementara MAGERAN, ketika pasca Malaysia menghadapi peristiwa kerusuhan rasial 13 Mei 1969.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

Lampiran 2.

Peta Malaysia pasca pembentukan Federasi Malaysia.



Sumber: <http://www.ros.gov.my/img/petamalaysia1.jpg>

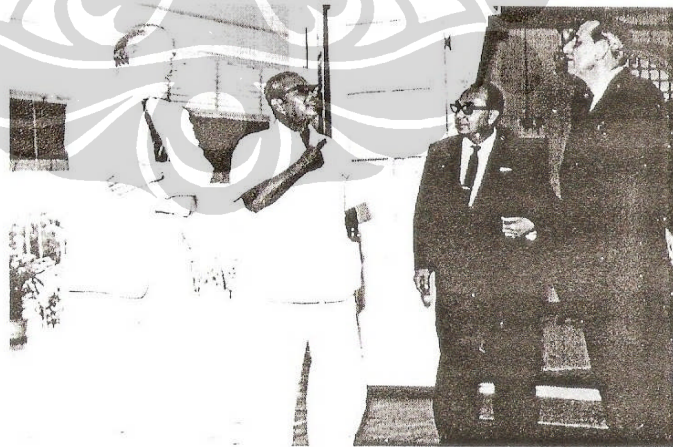
Lampiran 3.

Tunku Abdul Rahman sedang mencoba senapan otomatis di camp tentara Inggris. Tunku turut menunjukkan kebergantungannya terhadap Barat di dalam bidang pertahanan.



Sumber: Faridah Jaafar. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007.

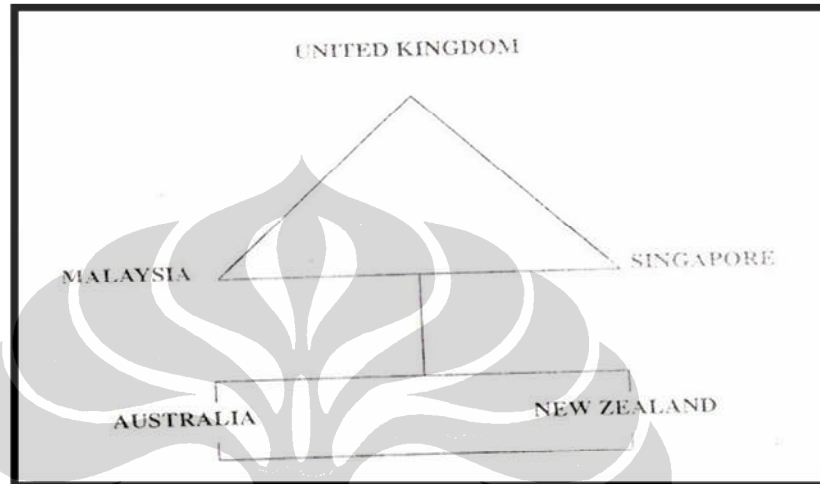
Tunku menerima kunjungan Menteri Pertahanan Inggris Mr. Peter Thorneycroft di Kuala Lumpur pada tahun 1964. Sikap Tunku yang pro-Barat membolehkan negara mendapat bantuan ketenteraan dari Inggris ketika menghadapi konfrontasi.



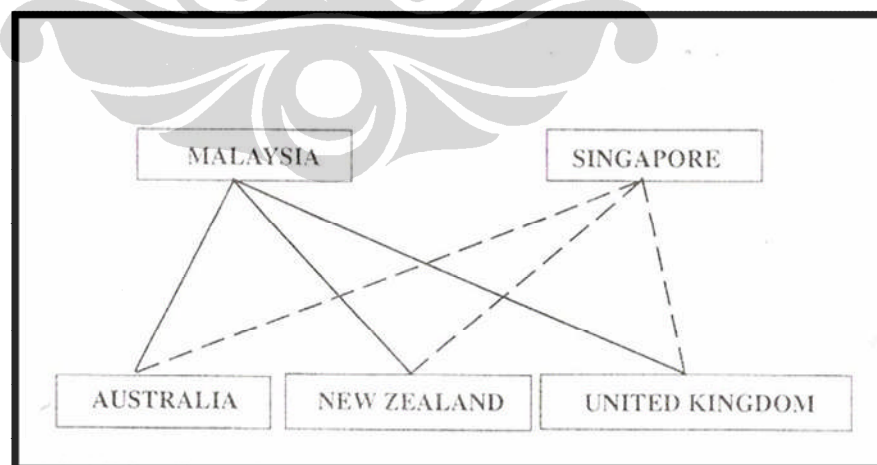
Sumber: Abdullah Ahmad. *Tunku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia 1963—1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1987.

(lanjutan)

Sistem pertahanan AMDA (*Anglo-Malays Defence Agreement*) merupakan perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1957 antara Inggris dan Malaysia yang berjanji akan saling membantu terhadap keselamatan Malaysia ataupun terhadap kepentingan Inggris di Timur Jauh.



Sistem pertahanan FPDA (*Five Power Defence Arrangement*) merupakan sebuah jaminan keselamatan dan pertahanan serta kerjasama antara Malaysia dan Singapura setelah perjanjian AMDA dihapuskan pada tahun 1971. Jika kedua negara tersebut menghadapi ancaman dari luar, maka kedua negara akan berbincang di antara satu sama lain agar dapat diambil tindakan yang sewajarnya.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

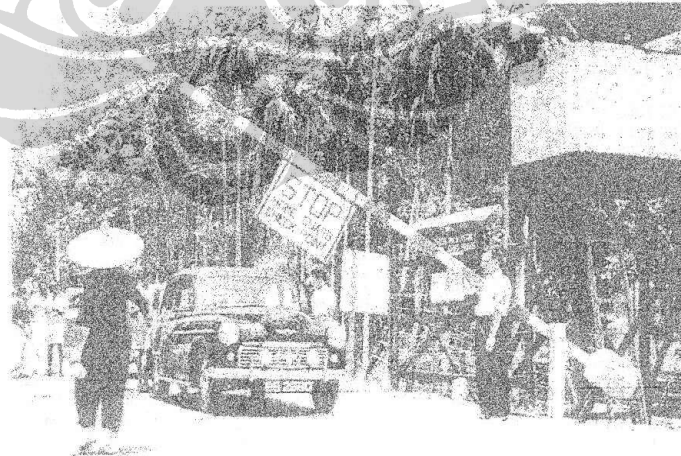
## Lampiran 4

Tunku Abdul Rahman sedang memimpin gerakan anti-komunis pada masa pemerintahannya. Perspektif Tunku yang tidak berkompromi dengan komunis mendorong beliau menggerakkan massa untuk berbuat sama dengannya.



Sumber: Faridah Jaafar. *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957—2005*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2007.

Pemeriksaan pasukan keamanan yang ketat untuk mencegah aktivitas komunis masuk ke Malaysia.



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.



(lanjutan)

Operasi dijalankan oleh pasukan keamanan untuk menghapus gerakan komunis.



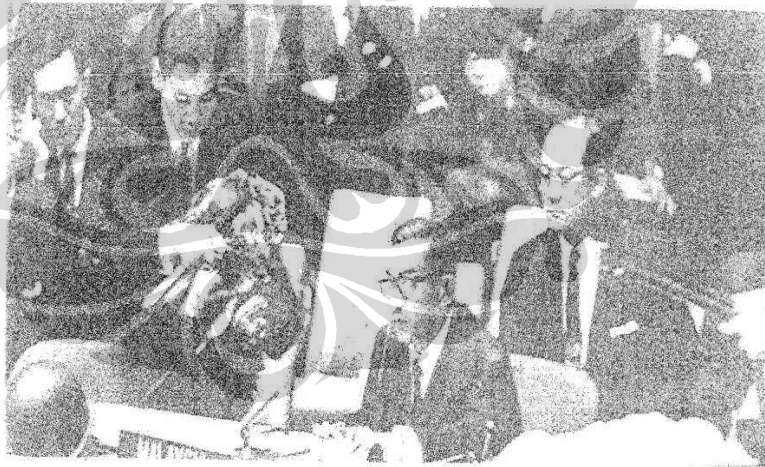
Sumber: Abdullah Ahmad. *Tunku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia 1963—1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1987.

Lampiran 5.

Sidang Ketiga Kementerian ASEAN di Kamerun pada tanggal 16 Desember 1969.



Tun Dr. Ismail berucap di Majelis Keamanan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).



Sumber: Rozeman Abu Hassan. *Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970—1976*. Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn, Bhd., 2003.

(lanjutan)

Tun Abdul Razak, sebelah kanan, sedang berbincang dengan wakil-wakil dari negara-negara ASEAN setelah menandatangani Deklarasi ZOPFAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971.



Sumber: Arkib Negara Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri. *Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein 1971*. Kuala Lumpur: Ibrahim bin Johari PIS., Pemangku Ketua Pengarah Percetakan, 1976.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Dina Pangestu Rini lahir di Jakarta, 1 Desember 1987. Dina merupakan anak kedua (dua bersaudara) dari Ir. Soedaryanto, M.M dan Reni Marsudita, S.Kep. Pendidikan formalnya dimulai dari TK Islam Al-Ikhsan (1993—1994), SDN Serua 6 (1994—2000), SMPN 2 Pamulang (2000—2003), SMUN 1 Tangerang Selatan (2003—2006), dan baru menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010 di Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, dengan menulis skripsi berjudul *Konsep Netralitas Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pada Tahun 1968—1971: Studi Kasus ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality)*. Dina juga sekarang masih meneruskan kuliah S1 di Program Studi Akuntansi Universitas Pancasila, sejak tahun 2008.

